

Dr. Itang, M.Ag.



— EFEKTIFITAS —

# DANA BLSM

DALAM MENANGGULANGI  
— KENAIKAN HARGA —



EFEKTIFITAS

# DANA BLSM

DALAM MENANGGULANGI  
KENAIKAN HARGA

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dasar BBM secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Meningkatnya harga barang kebutuhan pokok sebagai salah satu akibat langsung dari kenaikan harga dasar BBM, akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Imbas dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga menimbulkan dampak sosial berupa semakin menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net program*). Program tersebut melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Dengan program ini, rumah tangga sasaran diharapkan masih konsisten untuk melakukan fungsi sosialnya sehingga kondisi kenaikan kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga BBM tidak menjadikannya berpengaruh signifikan dan tetap dapat hidup sejahtera. Paparan terkait masalah tersebut dapat dilihat pada buku di tangan pembaca ini.

**Laksita**  
Indonesia

LAKSITA INDONESIA

Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24

Kota Serang Baru (KSB) Serang 42122

Phone: 0812 8450 4441

Email: [laksitaindonesia@gmail.com](mailto:laksitaindonesia@gmail.com)

Website : [www.penerbitlaksita.com](http://www.penerbitlaksita.com)

ISBN: 978-602-73931-4-1




9 786027 393141

Sumber Foto : Reuters

**EFEKTIFITAS DANA BLSM**  
**DALAM**  
**MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA**

---

---



---

---

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **EFEKTIFITAS DANA BLSM**

**DALAM**

**MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA**

**Dr. Itang, M.Ag.**



**Efektifitas Dana BLSM  
Dalam Menanggulangi Kenaikan Harga**

©Dr. Itang, M.Ag

*All right reserved*

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun  
seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

**Editor**

M. Nur Arifin

**Desain Sampul**

RGB Desain dan Cetak

**Tata Letak**

Gusri Wandu

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)  
Itang

**EFEKTIFITAS DANA BLSM**

**Dalam Menanggulangi Kenaikan Harga** /penyusun Itang--Jakarta:  
Perpustakaan Nasional , 2016

viii + 168 Halaman + Bibliografi: 14.5 cm x 20.5 cm

Cet. I, Lemlit IAIN SMH Banten

Cet. II, Laksita Indonesia 2016

ISBN : 978-602-73931-4-1

1. Efektifitas Dana BLSM Dalam Menanggulangi Kenaikan Harga–  
Penelitian I. Judul

II Perpustakaan Nasional

**Penerbit Laksita Indonesia**

Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24

Kota Serang Baru (KSB), Serang 42122

Phone: 081284504441

Email: [laksitaindonesia@gmail.com](mailto:laksitaindonesia@gmail.com)

Website: [www.penerbitlaksita.com](http://www.penerbitlaksita.com)

Anggota IKAPI

# **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan buku dengan judul Efektifitas Dana BLSM dalam Menanggulangi Kenaikan Harga ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam penulis peruntukkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang bagaimana cara menempuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini secara baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Penyusunan buku ini didasari kajian terhadap kebutuhan referensi bagi para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah. Serta memberikan kontribusi wawasan dalam perkuliahan di berbagai perguruan tinggi lainnya, yaitu STAIN, IAIN, UIN, UNTIRTA, PTAIS, PTN dan PTS.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan karya tulis ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat kami

deskripsikan dengan sempurna pula. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Di mana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Semoga buku ini dapat menjadi khasanah keilmuan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Penulis

Itang



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF KOTA SERANG .....</b>	<b>5</b>
A. Sejarah Berdirinya Kota Serang .....	5
B. Kondisi Geografis Kota Serang.....	11
C. Kondisi Demografis Kota Serang.....	17
D. Kondisi Sosiografis Kota Serang .....	25
<b>BAB III KENAIKAN HARGA DAN MASALAHNYA.....</b>	<b>39</b>
A. Pengertian Kenaikan Harga .....	39
B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Naik Turunnya Harga .....	45
C. Kebijakan Pemerintah dalam kenaikan harga.....	71

<b>BAB IV</b>	<b>DANA BLSM DALAM MENANGGULANGI</b>	
	<b>KENAIKAN HARGA .....</b>	<b>85</b>
	A. Tujuan Program BLSM.....	85
	B. Dampak Positif dan Negatif Dana BLSM .....	102
	C. Efektifitas Dana BLSM Dalam Menanggulangi	
	Kenaikan Harga .....	122
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>159</b>
	A. Kesimpulan.....	159
	B. Saran Saran .....	161
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>163</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dasar BBM, secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Meningkatnya harga barang kebutuhan pokok sebagai salah satu akibat langsung dari kenaikan harga dasar BBM, akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Imbas dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga menimbulkan dampak sosial berupa semakin menurun tingkat kesejahteraannya atau menjadi semakin miskin. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dalam bentuk program kompensasi (compensatory program) yang sifatnya khusus (crash program) atau program jaring pengaman sosial (social safety net Program). Program tersebut melalui penambahan nilai bantuan dan coverage program rutin yang sudah ada atau yang dikenal saat ini sebagai Percepatan dan

Perluasan Program Perlindungan Sosial (P4S), antara lain: Bantuan Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Harapan dengan adanya program BLSM ini, maka Rumah Tangga Sasaran diharapkan masih konsisten untuk melakukan fungsi sosialnya sehingga kondisi kenaikan kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga BBM tidak menjadikannya berpengaruh signifikan dan tetap dapat hidup sejahtera<sup>1</sup>

BLSM diluncurkan oleh pemerintah mulai 22 Juni 2013 dan diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan besaran Rp150.000,- per bulan selama empat bulan. Tahap awal BLSM diberikan dua bulan sekaligus, yaitu Rp 300.000,- di mana akan dibagikan bertahap sampai Juli. Pembagiannya fokus pada dua tempat, yaitu PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintahan. Penyaluran ini didahului dengan mencetak Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai bukti pengambilan dana BLSM dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Untuk mendanai BLSM tersebut, alokasi anggarannya mencapai Rp 9,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013.<sup>2</sup>

Tujuan Pemerintah meluncurkan program BLSM ini, antara lain: 1). Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 2). Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 3). Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.<sup>3</sup>

---

1 Anonymus, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Artikel*, Biro Humas Setda Prov. Sumbar, 2013.

2 Iwan Hermawan, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/1/P3DI/Juli/2013

3 Anonymus, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Artikel*, Biro Humas Setda Prov. Sumbar, 2013.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menstimulasi inflasi dan lebih lanjut, menurut Kurtubi, dapat menurunkan daya beli (purchasing power) masyarakat terhadap tingkat konsumsinya. Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah jumlah rakyat miskin hingga empat juta orang jika tanpa diberikan BLSM. Masyarakat miskin memiliki porsi pengeluaran terbesar adalah untuk pangan, sedangkan masyarakat menengah ke atas porsi pengeluaran untuk pangan relatif lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang lain, salah satunya konsumsi BBM bagi kendaraannya. Meskipun demikian, kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada harga bahan pangan yang mana diangkut dengan sarana transportasi.<sup>4</sup> Dari latar belakang program BLSM yang diluncurkan Pemerintah penulis ingin mengkaji lebih dalam yang dipaparkan dalam tulisan dengan judul **EFEKTIFITAS DANA BLSM DALAM MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA.**

---

4 Iwan Hermawan, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/1/P3D1/Juli/2013



# **BAB II**

## **KONDISI OBYEKTIF KOTA SERANG**

### **A. Sejarah Berdirinya Kota Serang**

#### **1. Asal Usul Kota Serang**

Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran, Kab Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 5 (enam) kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Taktakan, Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa dan Batas wilayah. Sebelah Utara yaitu Teluk Banten Sebelah Timur yaitu Kec. Pontang,

Kec. Ciruas dan Kec. Kragilan Kab. Serang, Sebelah Selatan yaitu Kec. Cikeusal, Kec. Petir dan Kec. Baros Kab. Serang, serta Sebelah Barat yaitu Kec. Pabuaran, Kec. Waringin Kurung dan Kec. Kramatwatu Kab. Serang. Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748, tertanegal 10 Agustus 2007. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mempercepat terwujudnya Pemerintahan Kota Serang telah mempersiapkan empat kelompok kerja (Pokja) yang akan bekerja sebelum ditetapkan Penjabat Walikota Serang. Keempat pokja tersebut terdiri dari Pokja Personil, Pokja Keuangarg Pokja Perlengkapanya dan Pokja Partai Politik.

Pembentukan dan susunan personil masing-masing pokja diisi oleh pejabat Pemprov Banten dan Pemkab Serang. Untuk menjalankan roda pemerintahan sebelum diselenggarakan Pilkada, Asisten Daerah (Asda) I Pemprov Banten Asmudji HW akhirnya terpilih sebagai Penjabat Walikota Serang. Asmudji HW terpilih setelah Depdagri menyaring tiga nama calon yang diajukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Asmudji dilantik di Jakarta oleh Mendagri pada 02 Nopember 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, Pertimbangan pembentukan Kota Serang adalah perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pada 5 Desember 2008 melalui pemilihan kepala daerah langsung/ dilantiklah Walikota dan Wakil Walikota Serang definitif. Sejak saat itu hingga 5 (lima) tahun ke depan Kota Serang akan



dipimpin oleh duet kepemimpinan H.Bunyamin dan Tb.Haerul Jaman yang mengusung visi terwujudnya landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan dan misi Menyiapkan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota Serang; Menyiapkan tata pemerintahan yang baik dan benar; Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang memadai dan berkualitas; Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi di berbagai sektor; Meningkatkan kualitas sumber Daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal yang terjangkau dan berkualitas; Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat kurang mampu; Menciptakan sistem pelayanan prima (mudah, murah, cepat, ramah dan berkualitas) dan Mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya serta pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan. <sup>1</sup>

Kota Serang terbentuk dan menjadi salah satu Kota di Propinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2007 dan diresmikan menjadi Kota Serang pada tanggal 10 November tahun 2007.<sup>2</sup>

Tulisan ini memaparkan sekilas perjalanan Kota Serang, diharapkan dapat jadi representasi keberadaan dan kinerja Pemerintah Kota Serang serta seberapa banyak Pemerintah Kota Serang berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat Kota Serang. Semoga apa yang selalu kita cita-citakan yaitu masyarakat Kota Serang yang lebih baik dan lebih berkualitas dapat segera terwujud, tentunya dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

---

1 Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota serang tahun 2011

2. Anonymous, "Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), *Draft Buku Putih Sanitasi Kota Serang*, Pokja PPSP Kota Serang 2011

## 2. Lambang Kota Serang dan Makna Filosofinya

Seiring terbentuknya Kota Serang maka terdapat dibuatnya lambang Kota Serang sebagai ciri dari kota tersebut, yaitu:



**Lambang Kota Serang**

### 2.1. Bentuk dasar logo = perisai segi 6 (enam), melambangkan:

- a. Awal berdirinya kota serang dibentuk oleh 6 (enam) kota kecamatan;Kasemen, Taktakan, Cipocok Jaya,Serang, Walantaka dan Curug.
- b. 6 (enam) Rukun Iman :
  - » Menunjukkan komitmen pemerintahan kota Serang yang dalam menjalankan ke pemerintahannya tidak akan lepas dari koridor agama.
  - » Menunjukkan kereligiusan masyarakat kotanya dan kehidupan bermasyarakat yang selalu berlandaskan pada agama.

- » Menunjukkan kereligiusan masyarakat kotanya dan kehidupan bermasyarakat yang selalu berlandaskan pada agama.
- c. Kegigihan dan ketahanan masyarakat Banten dalam memperjuangkan kemerdekaannya ada masa penjajahan.
- d. Kegigihan dan ketahanan masyarakat kota Serang dalam menghadapi semua tantangan di masa depan

## **2.2. Penjelasan Gambar:**

- a. Bintang segi 5 (lima), melambangkan Rukun Islam dan asas Ketuhanan yang Maha Esa
- b. Gapura (Kaibon)
  - » Kaibon merupakan ciri khas Banten yang sudah menjadi bagian dari sejarah Banten dan dengan sendirinya merupakan ciri khas dan bagian tak terpisahkan dari kota Serang juga.
  - » Gapura/pintu gerbang, menegaskan posisi kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten yang merupakan pintu gerbang Provinsi Banten. Gapura/pintu gerbang berarti pintu gerbang menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota Serang di semua bidang.

## **2.3. Penjelasan Warna**

- a. Warna Kuning:
  - » Kemuliaan, kesejahteraan, menunjukkan masa depan kota Serang yang cerah (digabungkan dengan gambar bintang segi 5 (lima) yang berwarna keemasan).
- b. Warna Hijau:
  - » Melambangkan sumber daya alam, menunjukkan daerah pertanian

dan kekayaan hortikultura yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat kota Serang pada umumnya.

- c. Warna Biru:
  - o melambangkan sumber daya manusia kota Serang yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun agama.
  - o Melambangkan sumber daya perikanan baik itu dari laut (mewakili Karangantu Kec. Kasemen) maupun tambak ikan air tawar yang menjadi salah satu andalan perekonomian masyarakat kota Serang.
- d. Warna Putih:
  - » Melambangkan pemerintahan kota Serang yang bersih
- e. Warna Merah:
  - » Melambangkan pemerintahan dan masyarakat kota Serang yang berani menghadapi setiap tantangan.
  - » Pengabungan Warna Merah-Putih: Menegaskan bahwa kota Serang merupakan bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
- f. Warna Hitam:
  - » Melambangkan ketegasan, keteguhan dan ketabahan pemerintah kota Serang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban amanat rakyat.
- g. Warna Emas:
  - » Melambangkan keberhasilan pemerintahan kota Serang dalam mencapai tujuan pemerintahannya mewujudkan masyarakat kota serang yang Madani.
  - » Melambangkan pemerintahan kota yang adil, agung dan berwibawa

## 2.4. Arti Slogan Kota Serang Madani

Menegaskan tujuan pemerintahan kota Serang untuk mewujudkan Kota Serang yang Madani, yang pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Menghormati kebebasan beragama (5 agama yang diakui pemerintah dalam undang-undang)
- b. Menjaga persaudaraan antar umat beragama
- c. Menjaga perdamaian dan kedamaian
- d. Menjaga persatuan
- e. Etika politik yang bebas bertanggung jawab
- f. pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga Negara (masyarakat)
- g. Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan
- h. Terciptanya masyarakat yang demokratis
- i. Menghormati hak-hak azasi individu
- j. Selalu berada dalam koridor agama

Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam pemerintahan kota yang bersih, adil, bertanggung jawab, agung, dan berwibawa, sehingga bisa menciptakan masyarakat kota Serang yang sejahtera di semua bidang (sosial, politik, budaya dan pendidikan)

## B. Kondisi Geografis Kota Serang

Kota Serang secara geografis terletak antara 50 99' – 60 22' Lintang Selatan dan 1060 07' – 1060 25' Bujur Timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (Universal Transfer Mercator) Zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari

Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara keselatan adalah sekitar 21,7 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Sebelah utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, begitu juga di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan provinsi Banten, juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (hinterland) Ibukota Negara, karena dari Kota Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. Wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran tertinggi dalam sebulan 55 mm dan rata-rata 17 hari hujan.<sup>3</sup> Luas wilayah Kota Serang menurut ketinggian dari permukaan laut dan wilayah pembangunan, yaitu:

*Tabel 2.1*

*Luas Wilayah (Ha) Kota Serang Menurut Ketinggian Dari Permukaan Laut dan Wilayah Pembangunan<sup>4</sup>*

Wilayah Pembangunan	Ketinggian dari Permukaan Laut					
	0-3	3-25	25-100	100-500	500-1000	> 1000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Serang Barat	-	-	3.004	1.051	133	-
Serang Selatan	-	2.866	-	-	-	-
Serang Timur	-	2.958	-	-	-	-
Serang Utara	3.396	2.940	-	-	-	-
Serang Tengah	-	3.164	-	465	-	-
Jumlah / Total	3.396	11.928	3.004	1.516	133	-

3. Anonymous, Kota Serang dalam Angka (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 3

4. Anonymous, Kota Serang dalam Angka (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 4

Dari tabel di atas (2.1) luas wilayah (ha) Kota Serang menurut ketinggian dari permukaan laut dan wilayah pembangunan, yaitu: Serang Barat 3.004 (25 – 100), 1.051 (100 – 500), 133 (500 – 1000). Serang Selatan 2.866 (3 – 25), Serang Timur 2.958 (3 – 25), Serang Utara 3.396 (0 – 3), 2.940 (0 – 3), Serang Tengah 3.164 (0 – 3). Luas wilayah (ha) Kota Serang menurut sebaran jenis tanah dan wilayah pembangunan, yaitu:

*Tabel 2.2*

*Luas Wilayah (Ha) Kota Serang Menurut Sebaran Jenis Tanah dan Wilayah Pembangunan<sup>5</sup>*

Wilayah Pembangunan	Jenis Tanah					
	Alluvial	Glei	Latosol	Regosol	Padsolik	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Serang Barat	329	-	-	3.641	818	-
Serang Selatan	436	-	-	188	4.336	-
Serang Timur	403	-	-	161	4.284	-
Serang Utara	3.802	-	-	270	2.264	-
Serang Tengah	634	-	-	942	4.166	-
Jumlah / Total	5.604	-	-	5.202	15.868	-

Dari tabel di atas (2.2) Luas wilayah (ha) Kota Serang menurut sebaran jenis tanah dan wilayah pembangunan, yaitu: Serang Barat 329 (alluvial), 3.641 (regosol) dan 818 (padsolik). Serang Selatan 436 (alluvial), 188 (regosol), 4.336 (padsolik). Serang Timur 403 (alluvial), 161 (regosol), 4,284 (padsolik). Serang Utara 3.802 (alluvial ), 270 (regosol), 2.264 (padsolik). Serang Tengah 634 (alluvial), 942 (regosol), 4.166 (padsolik).

5. Anonymous, *Kota Serang Dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 6

*Tabel 2.3*  
*Keadaan Iklim Di Kota Serang<sup>6</sup>*

Wilayah	Bulan Basah	Bulan Kering	Tipe Iklim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Serang Barat Zom 58	5	7	D3	Metode Klasifikasi Iklim Menurut (Oldeman) Zom = Zona Musim
Serang Selatan (Sebelah Barat Daya) Zom 56	8	4	C1	
Serang Selatan (Sebelah Tenggara) Zom 59	3	9	C3	

Keadaan cuaca di Kota Serang sebagaimana terlihat dalam tabel 2.4, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2.4*  
*Keadaan Cuaca Di Kota Serang<sup>7</sup>*

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Relatif		
	Temperature (0C)			Relative Humidity (%)		
	Terendah	Rata-rata	Tertinggi	Terendah	Rata-rata	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	23,7	26,8	30,6	78	85	92
Februari	23,7	27,1	31,8	72	83	89
Maret	23,6	27,4	32,6	69	82	93
April	24,1	27,3	31,9	77	85	93

6. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 7

7. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 8



Mei	23,8	27,3	32,1	76	85	92
Juni	23,5	27,0	31,5	76	84	95
Juli	22,9	26,2	30,6	82	87	97
Agustus	22,2	26,8	32,9	74	81	90
September	22,7	27,1	32,6	75	79	85
Oktober	23,1	27,3	32,9	73	79	87
November	23,2	27,0	32,1	64	79	91
Desember	23,4	26,6	31,4	74	84	93
Jumlah/ Total	12.082	6	12.082	6	12.082	6
Rata-rata	1.006	9	1.006	9	1.006	9

Keadaan luas lahan menurut penggunaan di Kota Serang sebagaimana terlihat dalam tabel 2.5, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2.5*

*Luas Lahan Menurut Penggunaan Di Kota Serang<sup>8</sup>*

<b>Penggunaan</b>	<b>Ha</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Hutan	177,323
Industri/Pergudangan	176,771
Perairan	1.012,588
Tanah Jasa	188,155
Tanah Perumahan	4.875,210
Tanah Perusahaan	1.143,789
Pertanian	18.882,177
Jumlah	26.456,014

8. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 13

Jarak antar kecamatan di Kota Serang [Km] sebagaimana terlihat dalam tabel 2.6, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2.6*  
*Jarak Antar Kecamatan Di Kota Serang [Km]<sup>9</sup>*

Kecamatan District	Curug	Walantaka	Cipocok Jaya	Serang	Taktakan	Kasemen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Curug	-	11	5	9	18	17
Walantaka	11	-	17	12	20	19
Cipocok Jaya	5	17	-	5	13	12
Serang	9	12	5	-	8	7
Taktakan	18	20	13	8	-	15
Kasemen	17	19	12	7	15	-

Keadaan pemerintahan dan catatan sipil di Kota Serang yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemerintahan

Kota Serang pada tahun 2013 terdiri dari 6 kecamatan dan 66 kelurahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang pada tahun 2013, mempunyai 4 komisi dan 5 fraksi dengan total anggota 45 orang. Pemerintah Kota Serang selama tahun 2014 didukung oleh 5.269 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 17 orang PNS Golongan I, 589 orang Golongan II, 2.914 orang Golongan III dan 1.748 orang Golongan IV.

#### 2. Catatan Sipil

Gambaran mengenai kegiatan pencatatan sipil di Kota Serang disajikan pada Tabel 2.7 dan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.

---

9. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 14

Tabel 2.7

Jumlah Penerbitan Akta Catatan Sipil Di Kota Serang Tahun 2012 – 2013<sup>10</sup>

Kecamatan	Akta Kelahiran		Akta Kematian	
	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Curug	348	2.697	-	3
Walantaka	792	3.583	-	6
Cipocok Jaya	1.139	4.120	3	4
Serang	3.445	6.673	26	31
Taktakan	765	5.209	2	0
Kasemen	519	6.887	6	8
Jumlah	7.008	29.169	37	53

### C. Kondisi Demografis Kota Serang

Jumlah penduduk Kota Serang Pada tahun 2013 sebesar 618.802 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 317.501 jiwa dan lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang sebesar 301.301 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk selama periode (2012-2013) sebesar 1,13 persen, dan tingkat kepadatan penduduk mencapai sekitar 2.320 jiwa per kilometer persegi dimana sebagian besar penduduknya mendiami daerah perkotaan.

Jumlah Pencari Kerja di Kota Serang pada tahun 2013 mencapai 11.852 orang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Serang. Dari 9.310 orang yang mendaftar sebagai pencari kerja, 64,00 persen merupakan lulusan SMU dan 16,81 persen adalah lulusan universitas.

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk, yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah

10. Anonymous, Kota Serang dalam Angka (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 31

dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Selain sensus penduduk, untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan diantara dua periode sensus, BPS melakukan survei Penduduk Antar Sensus (Supas). SUPAS telah dilakukan sebanyak empat kali, tahun 1976, 1985, 1995 dan terakhir tahun 2005.

Pada Sensus Penduduk, pen-cacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wi-layah geografis Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya. Berbeda dengan pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya, Sensus Penduduk 2010 melaksanakan me-tode pencacahan lengkap dengan jumlah variabel yang lebih banyak. Sensus penduduk 2010 dilaku-kan serentak di seluruh tanah air mulai tanggal 1-31 Mei 2010. Me-tode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Cara pen-cacahan yang dipakai dalam sensus penduduk adalah kombinasi antara de jure dan de facto. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dipakai cara de jure sedangkan untuk pen-duduk yang tidak bertempat tinggal tetap dilakukan dengan cara de facto, yaitu dicacah dimana mereka ditemukan petugas sensus biasanya pada malam “hari sensus“. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera In-donesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas keluar wilayah lebih dari enam bulan, tidak di cacah di tempat tinggalnya. Sebaliknya, seseorang atau keluarga menempati suatu bangunan belum mencapai enam bulan tetapi bermaksud me-netap disana dicacah ditempat ter-sebut.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Rata – rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat

pertumbuhan penduduk pertahun dalam waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Kepadatan penduduk adalah ba-nyaknya penduduk per Km persegi. Rasio jenis kelamin adalah per-bandungan antara banyaknya pen-duduk laki – laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki- laki untuk 100 penduduk perempuan.

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari – harinya dikelola bersama – sama menjadi satu. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada dirumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata – rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survey ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survey sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi) Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka yaitu disamping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula

kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, dan kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia ( KLUI ) dalam 1 digit.<sup>11</sup>

Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Serang sebagaimana terlihat dalam tabel 2.8, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2.8*  
*Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan*  
*Dan Jenis Kelamin Di Kota Serang Tahun 2013*<sup>12</sup>

Kecamatan	Penduduk		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Curug	25.486	23.695	49.181
2. Walantaka	42.296	40.782	83.078
3. Cipocok Jaya	47.730	45.351	93.081
4. Serang	110.868	106.636	217.504
5. Taktakan	43.396	40.710	84.106
6. Kasemen	47.725	44.127	91.852
Jumlah	317.501	301.301	618.802

11. Dikutip dari *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 37-41

12. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 45

Kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> menurut kecamatan dan rasio jenis kelamin di Kota Serang Tahun 2013 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.9, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2.9*

*Kepadatan Penduduk Per Km<sup>2</sup> Menurut Kecamatan Dan Rasio Jenis Kelamin Di Kota Serang Tahun 2013<sup>13</sup>*

Kecamatan	Penduduk	
	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
1. Curug	992	107,56
2. Walantaka	1.714	103,71
3. Cipocok Jaya	2.951	105,25
4. Serang	8.404	103,97
5. Taktakan	1.757	106,60
6. Kasemen	1.450	108,15
SERANG	2.320	105,38

Jumlah penduduk laki-laki menurut kelompok umur di Kota Serang Tahun 2013 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.10, yaitu sebagai berikut:

---

13. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 46

Tabel 2.10

*Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur Di Kota Serang Tahun 2013<sup>14</sup>*

KECAMATAN	KELOMPOK UMUR				
	0 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Curug	2.606	2.719	2.754	2.754	2.492
2. Walantaka	4.893	4.319	4.199	3.886	3.741
3. Cipocok Jaya	5.569	4.796	4.520	4.848	4.699
4. Serang	11.412	10.457	10.226	10.641	11.041
5. Taktakan	5.070	4.654	4.533	4.065	4.132
6. Kasemen	5.391	5.525	5.470	5.178	4.566
SERANG	34.941	32.470	31.702	31.372	30.671

» Lanjutan Tabel 2.10

KECAMATAN	KELOMPOK UMUR				
	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Curug	2.215	1.986	1.943	1.706	1.446
2. Walantaka	3.866	4.046	3.792	3.134	2.165
3. Cipocok Jaya	4.281	4.349	4.131	3.404	2.471
4. Serang	10.140	9.512	8.970	8.536	6.788
5. Taktakan	3.780	4.083	3.386	2.913	2.389
6. Kasemen	3.913	3.362	3.325	3.032	2.494
SERANG	28.195	27.338	25.547	22.725	17.753

14. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 47-49



» Lanjutan Tabel 2.10

KECAMATAN	KELOMPOK UMUR				
	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 +	Jumlah
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. Curug	1.092	679	482	612	25.486
2. Walantaka	1.562	1.162	667	864	42.296
3. Cipocok Jaya	1.783	1.254	719	906	47.730
4. Serang	5.158	3.626	1.960	2.401	110.868
5. Taktakan	1.744	1.159	721	767	43.396
6. Kasemen	2.078	1.408	927	1.056	47.725
SERANG	13.417	9.288	5.476	6.606	317.501

Jumlah penduduk perempuan menurut kelompok umur di Kota Serang Tahun 2013 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.10, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2.11*

*Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur Di Kota Serang Tahun 2013<sup>15</sup>*

Kecamatan	Kelompok Umur				
	0 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Curug	2.568	2.487	2.572	2.370	2.325
2. Walantaka	4.691	4.231	4.087	3.797	3.568
3. Cipocok Jaya	5.246	4.686	4.316	4.936	4.565
4. Serang	11.068	9.870	9.714	10.609	10.618
5. Taktakan	4.807	4.284	4.171	4.006	3.861
6. Kasemen	5.133	5.055	5.091	4.654	3.807
Serang	33.513	30.613	29.951	30.372	28.744

15. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 50-52

» Lanjutan Tabel 2.11

Kecamatan	Kelompok Umur				
	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Curug	2.037	1.890	1.880	1.575	1.255
2. Walantaka	3.845	4.119	3.522	2.552	2.007
3. Cipocok Jaya	4.253	4.428	3.849	2.786	2.094
4. Serang	9.479	9.361	9.123	7.962	6.142
5. Taktakan	3.712	3.691	3.144	2.719	2.107
6. Kasemen	3.375	3.284	3.284	2.844	2.455
Serang	26.701	26.773	24.802	20.438	16.060

» Lanjutan Tabel 2.11

Kecamatan	Kelompok Umur				
	507 – 54	55 – 59	60 – 64	65 +	Jumlah
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. Curug	850	673	468	745	23.695
2. Walantaka	1.509	1.073	698	1.083	40.782
3. Cipocok Jaya	1.500	1.027	660	1.005	45.351
4. Serang	4.475	3.261	1.839	3.115	106.636
5. Taktakan	1.495	1.108	679	926	40.710
6. Kasemen	1.867	1.156	837	1.285	44.127
Serang	11.696	8.298	5.181	8.159	301.301

Banyaknya pencari kerja yang terdaftar menurut jenis kelamin di Kota Serang Tahun 2013 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.12, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 2.12*  
*Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut*  
*Jenis Kelamin Di Kota Serang Tahun 2013*<sup>16</sup>

<b>Bulan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Januari	363	389
Februari	412	386
Maret	466	516
April	313	308
Mei	384	387
Juni	819	1.071
Juli	736	693
Agustus	378	406
September	657	685
Oktober	361	348
November	361	473
Desember	423	322
Jumlah/ 2013	5.673	5.984
Jumlah/ 2012	4.741	4.569

#### **D. Kondisi Sosiografis Kota Serang**

Sebagai ibukota di Provinsi Banten, Kota Serang adalah wilayah yang berpotensi sebagai pusat administrasi pemerintahan dan ekonomi yang menjanjikan. Kota Serang berada tepat di sebelah utara Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur; dan Laut Jawa di sebelah utara. Seiring dengan detak jantung pembangunannya, Kota Serang menjadi daerah padat

---

<sup>16</sup> Anonymous, Kota Serang dalam Angka (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 62

penduduk yang telah mengubahnya baik dari dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan sosial dan budaya.<sup>17</sup>

## 1. Pendidikan

Pendidikan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam mendukung kemajuan wilayah, termasuk dalam mendukung proses pembangunan sanitasi suatu wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sarana pendidikan yang terdapat di Kota Serang, baik negeri maupun swasta pada tahun 2010 antara lain 100 sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 237 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 67 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), sebanyak 26 Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah (SMU/MA) dan 29 Sekolah Menengah Kejuruan. Sarana untuk masing-masing tingkatan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, digunakan oleh sejumlah murid yang mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun. Selama tahun 2010 terdapat murid TK sebanyak 4.350 siswa, murid SD/MI sebanyak 78.694 siswa dan murid SMP/MTs sebanyak 24.287 siswa, murid SMU/MA sebanyak 8.901 siswa, sedangkan murid SMK berjumlah 12.235 siswa.

Sementara tenaga guru yang tersedia pada tahun 2010 pada masing-masing sekolah adalah Guru Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 288 orang, Guru SD/MI sebanyak 3.351 orang, Guru SMP/MTs sebanyak 1.197 orang, Guru SMU/MA sebanyak 758 orang guru, serta Guru SMK sebanyak 899 orang. Gambaran mengenai keseimbangan murid dan guru tahun 2010 ditunjukkan dengan rasio murid-guru dimana rasio murid guru TK adalah sebesar 15,10; rasio murid-guru untuk SD/MI dan SMP/MTs adalah masing-masing sebesar 23,48 dan 20,28 ; SMU/MA adalah sebesar

---

17. Iklima Nur Annisa, “ Pengaruh Tingkat Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang Terhadap lingkungan Setempat” *Makalah*, 2013

11,74, sedangkan untuk kejuruan sebesar 13,61.

*Tabel 2.13*  
*Sarana Pendidikan Di Kota Serang Tahun 2013<sup>18</sup>*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah			Rasio Murid: Guru
		Sekolah	Murid	Guru	
1	TK	100	4.350	288	15,10
2	SD/MI	237	78.694	3.351	23,48
3	SMP/MTs	67	24.287	1.197	20,28
4	SMU/MA	26	8.901	758	11,74
5	Kejuruan (SMK)	29	12.235	899	13,61

Tingkat pendidikan penduduk, dalam hal ini adalah angka melek huruf, masih dipakai sebagai indikator tingkat kesejahteraan keluarga dalam kaitannya dengan kemampuan keluarga dalam meningkatkan penghasilannya. Untuk Kota Serang, pada tahun 2010 Angka Melek Huruf mencapai 5,94%. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD/MI tahun 2010 yaitu 135,4%, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 84,62% dan untuk tingkat SMA/MA sebesar 52,7%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD/MI tahun 2010 yaitu 93,06%, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 91,66% dan untuk tingkat SMA/MA sebesar 51,95%.

## **2. Kesehatan**

Kesehatan pada dasarnya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dianggap cukup signifikan, dimana tingkat kesehatan yang tinggi akan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang baik. Untuk mewujudkan derajat kesehatan di Kota Serang yang

18. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 74

optimal, haruslah didukung oleh sumber daya manusia tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan kesehatan yang memadai, serta kebijakan pembangunan kesehatan untuk melaksanakan berbagai program yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kesehatan terutama bagi lingkungan dan perilaku masyarakat. Agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kota Serang, saat ini pemerintah telah melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri atas rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu klinik bersalin dan puskesmas keliling. Pada tahun 2010, jumlah rumah sakit di Kota Serang adalah sebanyak 4 unit, yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serang 2 unit, Rumah Sakit Bersalin 1 unit, Rumah Sakit Khusus 1 unit, jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu sebanyak 11 unit Puskesmas dan 13 puskesmas pembantu, Jumlah Poliklinik 11 unit, dan Apotek 48 unit, Posyandu 577 unit yang tersebar di 6 Kecamatan. Dengan keberadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara optimal.

*Tabel 2.14*  
*Jumlah Sarana Kesehatan Kota Serang*

SARANA KESEHATAN	TAHUN		
	2010	2011	2012
RUMAH SAKIT BERASALIN	1	1	1
RUMAH SAKIT UMUM	2	2	2
RUMAH SAKIT KHUSUS	1	1	1
POLIKLINIK	64	15	11
PUSKESMAS	10	10	11
PUSKESMAS PEMBANTU	13	13	13
PRAKTEK DOKTER BERSAMA	13	31	6
PRAKTEK DOKTER PERORANG	91	87	70
PRAKTEK BIDAN	56	31	48
APOTEK	38	43	48
POSYANDU	527	545	577

### **3. Sosial Masyarakat**

Masyarakat Kota Serang terbentuk dari beberapa suku asli dan para pendatang, dengan kondisi seperti ini, di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, selama ini tidak terjadi konflik yang serius dan menyebar seperti yang terjadi di daerah-daerah lain di tanah air. Hal ini disebabkan tingginya rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. kondisi seperti ini modal dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pembangunan.

Adanya polarisasi permukiman berdasarkan kelompok etnis tertentu dan atau adanya kelas sosial tertentu dapat membentuk proses sosial dan dinamika masyarakat, baik yang sifatnya asosiatif maupun yang disosiatif. Asosiatif dapat berupa bentuk kerjasama antar mereka, sedangkan yang disosiatif berupa kompetisi atau persaingan termasuk di dalamnya konflik sosial. Dalam proses sosial ini dapat melahirkan solidaritas sosial dalam bentuk tata nilai yang melembaga dalam masyarakat sebagai himpunan pemahaman bersama atau shared understanding untuk mengatasi berbagai perbedaan dalam masyarakat meski tidak tertulis maupun kesenjangan sosial yang semakin melebar, sehingga hal ini merupakan potensi konflik terhadap proses sosial tersebut. Potensi konflik inilah yang menjadi benih munculnya kerusuhan di perkotaan, sehingga setiap kali kerusuhan yang menjadi sasaran adalah daerah perkotaan.

### **4. Data Jumlah Fasilitas Peribadatan**

Kepercayaan dan agama penduduk Kota Serang beragam, namun mayoritas warga masyarakat memeluk agama Islam. Dari segi sarana tempat peribadatan tahun 2013 Kota Serang memiliki mesjid sebanyak 507 buah, langgar sebanyak 708 buah, musholla sebanyak 42 buah, gereja katolik sebanyak 4 buah, gereja protestan sebanyak 2 buah, vihara sebanyak 3 buah, dan pura sebanyak 1 buah.

*Tabel 2.15*  
*Jumlah Tempat Peribadatan Bagi Pemeluk Agama Islam di Kota Serang Tahun 2013<sup>19</sup>*

NO	KECAMATAN	MASJID	LANGGAR	MUSHOLLA	JUMLAH
1	SERANG	151	124	17	292
2	CIPOCOK JAYA	45	130	6	181
3	KASEMEN	82	122	5	209
4	TAKTAKAN	76	102	4	182
5	WALANTAKA	67	136	5	208
6	CURUG	86	94	5	185
	TOTAL	507	708	42	1257

### 5. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Kehidupan beragama antar penganut agama yang berlainan di Kota Serang cukup baik dan dalam situasi rukun serta damai, dimana masing-masing tokoh agama berperan aktif dalam usaha pembinaan kehidupan religius. Walaupun demikian Pemerintah Kota masih perlu secara aktif memberikan dan meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dengan mengadakan bimbingan, membangun dan memelihara sarana peribadatan bagi masing-masing agama; serta melakukan kerjasama dengan elemen-elemen masyarakat dalam menyusun dan pelaksanaan program-program pembangunan bidang agama.

*Tabel 2.16*  
*Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2013*

1	Serang	172576	2015	3262	115	2376
2	Cipocok Jaya	62196	53	49	26	12
3	Kasemen	74297	-	16	-	35
4	Taktakan	63394	70	-	6	34
5	Walantaka	61275	-	-	-	18
6	Curug	46950	63	9	-	16
	Total	480688	3001	3336	147	2491

19. Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014), h. 161



## 6. Data Jumlah dan Sebaran Penduduk Miskin

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Serang sampai akhir tahun 2010 tercatat sebesar 20.984 keluarga miskin atau jika diprosentasekan maka terdapat angka kemiskinan di Kota Serang sebesar 25,07% dan untuk rincinya dapat dilihat Tabel 2.17

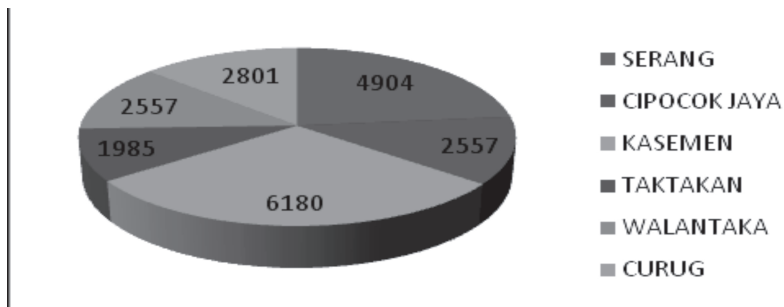
*Tabel 2.17  
Jumlah dan Sebaran Rumah Tangga Miskin di Kota Serang*

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	RT	RTM	RTM%
1	SERANG	180055	21215	4904	23.12%
2	CIPOCOK JAYA	68298	11225	2557	22.78%
3	KASEMEN	81695	23502	6180	26.30%
4	TAKTAKAN	63762	6465	1985	30.70%
5	WALANTAKA	61451	9144	2557	27.96%
6	CURUG	42346	12134	2801	23.08%
	TOTAL	497910	83685	20984	25.07%

*Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2010*

Jika dilihat dari data diatas sebaran Rumah Tangga Miskin di Kota Serang, Kecamatan yang tertinggi angka kemiskinannya adalah Kecamatan Kasemen (6180 RTM) sedangkan terendah yaitu Kecamatan Taktakan (1985 RTM) dan Kelurahan tertinggi angka Rumah Tangga Miskinnya adalah Kelurahan Banten (1.454 RTM) dan terendah kelurahan Lialang (64 RTM). Terlihat sebaran data kemiskinan yang paling banyak di Kota Serang ada di wilayah pesisir yaitu Kecamatan kasemen yang lebih banyak penduduk di wilayah ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

*Diagram Sebaran Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan di Kota Serang*



Berikut ini terdapat Rumah Tangga Miskin di Kota Serang sampai ketinggian Kelurahan dapat dilihat dari Tabel 2.18

*Tabel 2.18*

*Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Serang Tahun 2010*

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah		
			Penduduk	RT	RTM
1	Serang	Serang	24531	1887	454
		Cipare	21087	2324	541
		Sumurpecung	19219	1584	393
		Cimuncang	17980	2115	595
		Kotabaru	6785	865	207
		Lontarbaru	7533	688	159
		Kagungan	12336	1915	433
		Lopang	14331	1405	346
		Unyur	32900	3068	700
		Kaligandu	12296	1659	397
		Terondol	6125	1305	319

		Sukawana	4932	2400	360
<b>Serang Total</b>			180055	21215	4904
2	Cipocok Jaya	Gelam	8335	1252	306
		Dalung	4651	434	94
		Tembong	5611	1570	335
		Karundang	5246	1182	275
		Cipocok Jaya	11880	1632	341
		Banjarsari	11244	1415	378
		Banjaragung	10900	1084	262
		Panancangan	10431	2656	566
<b>Cipocok Jaya Total</b>			68298	11225	2557
3	Curug	Kamanisan	5474	1051	303
		Pancalaksana	4051	1374	309
		Tinggar	4102	1295	339
		Cipete	3706	1027	315
		Curugmanis	5322	1379	357
		Sukalaksana	3727	1426	376
		Sukawana	3070	2400	185
		Curug	3573	612	161
		Sukajaya	2975	638	196
		Cilaku	6346	932	260
<b>Curug Total</b>			42346	12134	2801
		Lebakwangi	2667	400	120
		Cigoong	3157	766	225
		Tegalsari	3549	301	108

		Pasuluhan	3673	670	201
		Pabuaran	2495	558	178
		Walantaka	2576	407	123
		Pengampelan	6163	995	247
		Pipitan	9163	668	221
		Kiara	7186	693	192
		Pageragung	3966	855	249
		Kalodran	4899	495	132
		Kepuren	4006	453	123
		Teritih	4867	1476	303
<b>Walantaka Total</b>			<b>61451</b>	<b>9144</b>	<b>2557</b>
5	Kasemen	Kasemen	10957	1986	540
		Warung Jaud	7625	1638	375
		Mesjid Priyayi	7510	2054	480
		Bendung	6689	2391	594
		Terumbu	7904	1813	582
		Sawah Luhur	9864	1622	535
		Kilasah	8424	1853	494
		Margaluyu	5809	2179	614
		Kasunyatan	6673	1869	512
		Banten	10240	6097	1454
<b>Kasemen Total</b>			<b>81695</b>	<b>23502</b>	<b>6180</b>
6	Taktakan	Cilowong	5157	1648	399
		Sayar	6302	1127	307
		Sepang	3778	454	133

	Pancur	4746	380	126
	Kalang Anyar	3069	337	110
	Kuranji	2860	423	125
	Panggungjati	6250	227	141
	Drangong	4950	443	191
	Taktakan	13572	535	183
	Umbul Tengah	4578	317	139
	Lialang	3718	274	64
	Tamanbaru	4782	300	67
Taktakan Total		63762	6465	1985
Total Keseluruhan		497910	83685	20984

*Sumber: BPS Kota Serang*

## 7. Data Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh sebagian besar terdapat di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan pada umumnya menempati kawasan-kawasan yang strategis seperti dekat dengan pusat kota, dekat dengan pusat perdagangan dan jasa namun ada juga kawasan kumuh bermata pencaharian sebagai pedagang kecil, nelayan dan buruh tani dengan tingkat pendapatan relative kecil. Kondisi bangunan di kawasan kumuh kurang representative dan kurang terawat dengan baik karna ketidak mampuan warganya. Secara keseluruhan terdapat sekitar 12.602 Ha kawasan kumuh yang tersebar di masing-masing kecamatan di kota serang yang didiami oleh sekitar 2015 rumah. Kawasan kumuh terluas terdapat di kecamatan taktakan , serang dan di cipocokjaya, yang masuk dalam wilayah pusat kota serang.

*Tabel 2.19*  
*Lokasi dan Luas Kawasan Kumuh di Kota Serang*

No	Kecamatan	Luas (ha)	Lokasi
1	Serang	3621	Pasar Lama, Kantin, Kebon Sawo, Jiwantaka,
			Pegantungan, Lialang, Umbul Tengah, Taktakan,
			Drangong, Panggung Jati, Kuranji, Pancur,
			Karang Anyar, Kasemen.
2	Taktakan	3745	Warung Jaud, Kepuren, Kalodran, Pangarangan.
3	Kasemen	340	
4	Walantaka	1585	
5	Cipocok Jaya	2701	
6	Curug	610	
JUMLAH		12602	

*Sumber : Bappeda Kota Serang, 2010*

Masih cukup banyak rumah penduduk di kota serang yang kondisinya dibawah standar baik keselamatan, kesehatan maupun keindahan. Beberapa penyebab masih banyaknya rumah tidak layak huni di kota serang adalah sebagai berikut ;

1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah ;
2. Kemampuan ekononmi masyarakat masih rendah ;
3. Akses pembiayaan perumahan masih cukup rumit;
4. Penghuni rumah bukan pemilik sendiri.

Kondisi perumahan yang tidak layak huni sebagian wilayah kota serang di perparah oleh kondisi prasarana pemukiman yang belum memadai, seperti kurangnya fasilitas air bersih, jalan setapak/jalan lingkungan yang rusak atau tanah, belum berjalannya mekanisme

penanganan sampah serta kurangnya sarana drainase mikro sehingga masih terjadi genangan atau banjir pada lokasi-lokasi tertentu. Selain kesadaran untuk membangun rumah yang layak huni, kesadaran masyarakat kota Serang untuk memelihara sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman masih sangat rendah.

*Tabel 2.20*

*Sebaran Permukiman Kumuh dan Squatter di Kota Serang*

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK (orang)			Jumlah
		Kaw.Ku- muh	Bantaran Sungai	Kaw.Teg. Tinggi	
<b>KECAMATAN SERANG</b>					
1	Sumur Pecung	-	-	14	14
2	Cipare	215	24	-	239
3	Serang	-	-	16	16
4	Kagungan	-	36	74	110
5	Kota Baru	243	9	-	252
6	Cimuncang	585	-	-	585
7	Unyur	114	81	-	195
8	Kaligandu	-	-	4	4
9	Terondol	96	-	102	198
Jumlah		1253	150	210	1613
<b>KECAMATAN CIPOCOK JAYA</b>					
1	Penancangan	-	-	44	44
2	Tembong	-	13	12	25
Jumlah			13	56	69
<b>KECAMATAN KASEMEN</b>					
1	Bendung	45	-	-	45
2	Masjid Priyayi	45	-	-	45
3	Terumbu	45	-	-	45
4	Banten	6	116	-	122

5	Kilasah	51	-	-	51
Jumlah		192	116	-	308
KECAMATAN TAKTAKAN					
1	Panggung Jati	-	-	71	71
2	Lialang	-	-	32	32
3	Umbul Tengah	-	-	7	7
Jumlah				110	110
KECAMATAN WALANTAKA.					
1	Pager Agung	-	-	5	5
Jumlah		-	-	5	5

*Sumber : Bappeda Kota Serang, 2010*



# **BAB III**

## **KENAIKAN HARGA DAN MASALAHNYA**

### **A. Pengertian Kenaikan Harga**

Kenaikan harga adalah naiknya harga barang di pasar atau melonjaknya harga barang di pasar. Kenaikan harga atau sering dikenal dengan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi menunjukkan kecenderungan naiknya harga-harga umum barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga tidak harus selalu dalam nilai atau persentasi yang sama. Kenaikan harga yang terjadi satu kali atau tidak terus menerus, atau hanya temporer, atau tidak berdampak luas, maka tidak dikategorikan sebagai inflasi.

Berbagai definisi tentang inflasi telah dikemukakan oleh para

ahli, di antaranya: Muana Nanga<sup>1</sup> menyatakan bahwa inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalamkenaikan secara terus-menerus. Kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktu saja tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. Menurut Rahardja<sup>2</sup> inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, tetapi jika kenaikan meluas kepada sebagian besar harga barang-barang maka hal ini disebut inflasi. Sementara itu Eachern<sup>3</sup> menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga. Jika tingkat harga berfluktuasi, bulan ini naik dan bulan depan turun, setiap adanya kenaikan kerja tidak berarti sebagai inflasi.

Sedangkan Sukirno<sup>4</sup> memberikan definisi bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Selanjutnya BPS<sup>5</sup> mendefinisikan inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus-menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Kenaikan yang sifatnya sementara tidak dikatakan inflasi dan

---

1 Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Graфика Persada, Edisi Kedua, 2005), h.237

2 Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 37).

3 William Eachern, A. Mc. *Ekonomi Makro: Pendekatan Temporer*, Terjemahan (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 133.

4 Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 27.

5 Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2000, h. 10.

kenaikan harga terhadap satu jenis komoditi juga tidak dikatakan inflasi.

Ada beberapa cara yang dikemukakan untuk menggolongkan jenis-jenis inflasi. Penggolongan pertama didasarkan pada parah atau tidaknya inflasi tersebut. Sukirno membedakan beberapa macam inflasi yaitu:<sup>6</sup>

1. Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun)
2. Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun)
3. Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun.

Sedangkan menurut Nanga dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dapat dipilah dalam tiga kategori:<sup>7</sup>

1. Inflasi sedang (moderate inflation), yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat, dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif.
2. Inflasi ganas (galloping inflation), yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20, 100 atau 200 persen pertahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian.
3. Hyperinflasi (Hyperinflation), yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen pertahun, merupakan jenis yang mematikan.

Macam macam Inflasi, yaitu:

1. Berdasarkan tingkat kualitas parah atau tidaknya

Ada beberapa inflasi berdasarkan tingkat kualitas parah atau tidaknya yaitu:

---

6 Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi. Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11

7 Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Kedua, 2005), h.247

- a. Inflasi ringan, yaitu: Inflasi ringan atau inflasi merangkak (*creeping inflation*) adalah inflasi yang lajunya kurang dari 10% per tahun, inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan.
  - b. Inflasi sedang, yaitu: Inflasi ini memiliki ciri yaitu lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi. Perlu diingat laju inflasi ini secara nyata dapat dilihat gerak kenaikan harga. Pendapatan riil masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti buruh, mulai turun dan kenaikan upah selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan harga.
  - c. Inflasi berat, yaitu: Inflasi berat adalah inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100%. Kenaikan harga sudah sulit dikendalikan. Hal ini diperburuk lagi oleh pelaku-palaku ekonomi yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan spekulasi.
  - d. Inflasi liar (*hyperinflation*), yaitu: Inflasi liar adalah inflasi yang lajunya sudah melebihi dari 100% per tahun. Inflasi ini terjadi bila setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (*Hyperinflation*).
2. Inflasi Berdasarkan Penyebabnya
- a. Inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan (*demand full inflation*), yaitu: Inflasi ini merupakan inflasi yang disebabkan oleh besarnya permintaan masyarakat akan barang-barang. Permintaan total yang berlebihan biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi

tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

- b. Inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi (*cost push inflation*), yaitu: Inflasi ini terjadi karena adanya perubahan tingkat penawaran. Kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll.), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll. sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Jenis inflasi ini dibedakan menjadi dua :

- 1) Inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga (price push inflation) karena kenaikan harga bahan-bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya OPEC menaikkan harga minyak;
  - 2) Inflasi yang disebabkan karena kenaikan upah (wages cosh inflation) misalnya karena kenaikan gaji pegawai negeri yang diikuti usaha-usaha swasta pula, maka harga-harga barang barang lain juga ikut naik. Biasanya inflasi karena kenaikan upah atau gaji sangat ditakuti karena akan bias menimbulkan inflasi secara berkelanjutan. Karena upah naik, harga-harga akan naik. Karena harga barang naik, maka upah harus dinaikkan dan ini kemungkinan akan terus berkelanjutan.
3. Inflasi Berdasarkan Asalnya

Inflasi dari segi asalnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Inflasi yang berasal dalam negeri seperti defisit anggaran belanja Negara yang terus menerus.
- b. Dalam keadaan seperti ini biasanya pemerintah mengintruksikan Bank Indonesia mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Selain itu inflasi dari dalam negeri juga dapat disebabkan oleh adanya gagal panen dan sebagainya.
- c. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). Inflasi ini timbul karena adanya karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya banyak dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang yang notabene sebagian besar usaha produksinya mempergunakan bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena dari adanya perdagangan internasional.

4. Jenis inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya, yaitu:<sup>8</sup>
  - a. Inflasi tarikan permintaan Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.
  - b. Inflasi dorongan biaya Inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

Inflasi struktural Inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

## **B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Naik Turunnya Harga**

Faktor faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga atau inflasi. Menurut Endang Puspitawati, dkk.<sup>9</sup> ada beberapa teori yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya inflasi. Masing-masing teori melihat aspek-aspek tertentu dalam proses inflasi. Pandangan beberapa teori tentang sebab terjadinya inflasi antara lain sebagai berikut.

### **1. Teori Kuantitas**

Pernyataan sederhana dari teori ini adalah kenaikan harga akan terjadi apabila kuantitas (jumlah) uang yang beredar bertambah. Menurut teori ini harga-harga adalah proporsi langsung dari jumlah uang, atau ditulis sebagai berikut. Menurut teori kuantitas ada dua penyebab terjadinya inflasi yaitu:

---

8 Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada. Edisi Kedua, 2005), h.245.

9 Dikutip dari Ari Sucipta, “Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Inflasi, *Artikel*, Tahun 2013, h. 1

- a. Jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan masyarakat. Maksudnya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat berlebihan, merupakan faktor utama pendorong terjadinya inflasi. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak diantaranya karena terjadi defisit anggaran dan ditutup dengan mencetak uang. Semakin besar deficit yang dibiayai dari mencetak uang inflasi akan semakin parah.
- b. Harapan psikologis akan terjadinya kenaikan harga di masa yang akan datang akan memperparah terjadinya inflasi. Maksudnya, apabila masyarakat mengharapkan dan memperkirakan bahwa harga dimasa mendatang akan mengalami kenaikan, maka masyarakat akan membelanjakan uangnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian dala memegang uang. Keadaan ini akan semakin parah bila masyarakat sudah menyakini kenaikan harga makin besar dari waktu ke waktu hingga masyarakat akan membelanjakan uangnya melebihi uang beredar. Hal ini dapat berakibat terjadinya hiperinflasi.

## 2. Teori Keynes

Para ahli ekonomi Keynesian (pengikut Keynes) menjelaskan seluruh proses ekonomi tanpa mementingkan peranan uang. Yang penting dalam kehidupan ekonomi nasional adalah produksi (penawaran) dan pembelanjaan (permintaan) dalam lingkaran ekonomi, sedangkan jumlah uang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat oleh dunia perbankan.

Dalam pandangan Keynes, permintaan masyarakat (*effective demand*) lah yang paling menentukan kestabilan kehidupan ekonomi nasional. Para konsumen, para produsen, pemerintah dan luar negeri bersama-sama membeli banyak barang dari yang dihasilkan oleh kapasitas produksi yang ada. Hal ini menyebabkan ketegangan-ketegangan di pasaran. Produksi tidak bisa dinaikkan karena dibatasi kapasitas produksi.



Rendahnya jumlah barang/jasa yang diproduksi berakibat terhadap harga. Tentu harga-harga dari komoditi barang/jasa akan naik, hal ini akan berimplikasi pada munculnya masalah inflasi.

### 3. Teori Strukturalis

Menurut teori ini, ada dua hal penting dalam perekonomian Negara-negara yang sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakelastisan Penerimaan Ekspor. Nilai ekspor tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sector-sektor lain. Adapun penyebab kelambanan tersebut sebagai berikut:
  - 1) Di pasar dunia, harga barang-barang ekspor dari Negara tersebut semakin memburuk.
  - 2) Produksi barang-barang ekspor tidak responsive terhadap kenaikan harga.
- b. Ketidak Elastisan Penawaran atau Produksi Bahan Makanan di Dalam Negeri. Produksi bahan makanan didalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan pendapatan perkapita. Hal ini menyebabkan harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk naik, sehingga melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya tuntutan karyawan untuk mendapatkan kenaikan upah atau gaji. Naiknya upah karyawan menyebabkan kenaikan ongkos produksi. Hal ini berarti akan menaikkan harga barang-barang. Kenaikan harga barang-barang tersebut mengakibatkan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah selanjutnya diikuti oleh kenaikan harga barang-barang, begitu seterusnya. Proses ini akan berhenti apabila harga bahan makanan tidak mengalami kenaikan. Namun, karena faktor strukturalis

harga bahan makanan akan terus naik sehingga proses dorong-mendorong antara upah dengan harga tersebut selalu mendapat umpan baru dan tidak berhenti.

Dari ketiga teori menyatakan penyebab terjadinya inflasi di atas, disebabkan oleh:

1. Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor Jika ekspor suatu negara lebih besar daripada impor, akan mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena semakin besar jumlah uang yang beredar di dalam negeri akibat penerimaan devisa.
2. Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara Sektor penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang defisit menjadi penyebab inflasi. Karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, maka untuk menutupi keadaan tersebut akan dilakukan dengan mengeluarkan uang baru, pengeluaran uang baru menimbulkan tekanan inflasi.
3. Inflasi disebabkan oleh sektor swasta Pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadinya inflasi.

Jadi jelas penyebab inflasi atau kenaikan harga di atas bahwa pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan naik turunnya harga. Berikut ini akan dipaparkan teori permintaan dan penawaran secara umum dan secara Islami.

## **1. Teori Permintaan Umum dan Islami**

Pada bahasan ini akan diuraikan mengenai teori permintaan umum dan teori permintaan secara Islami, yaitu:

### a. Teori Permintaan Umum

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Permintaan dapat juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang dan perkhidmatan pada pelbagai tingkat harga dan tingkat masa tertentu. Permintaan, dapat diartikan sebagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar untuk suatu produk adalah jumlah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu dalam wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan dalam lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Winardi permintaan adalah jumlah benda yang para pembeli bersedia untuk membelinya dalam harga tertentu, pasar tertentu, dan waktu tertentu. Sedangkan. Menurut Hartowo permintaan adalah jumlah yang dibeli dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku dipasar dalam periode tertentu. Menurut Masykur Wiratno permintaan adalah sebuah daftar atau kurva yang menghubungkan berbagai jumlah yang akan dibeli setiap waktu yang ditentukan pada harga-harga alternative "*ceteris paribus*".

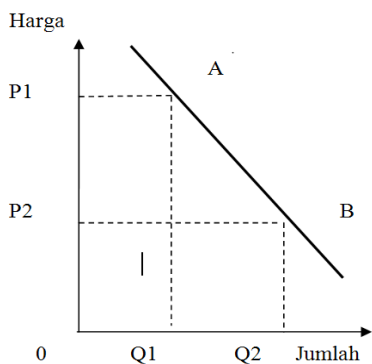
Jadi permintaan adalah jumlah barang, benda dan jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga tertentu, pasar tertentu, dan waktu tertentu, dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang. Permintaan adalah kebutuhan masyarakat/ individu terhadap suatu jenis barang tergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut: (1). Harga barang itu sendiri (2). Harga barang lain (3). Pendapatan konsumen (4). Cita masyarakat/selera (5). Jumlah penduduk (6). Musim/iklim (7). Prediksi masa yang akan datang. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh

---

<sup>10</sup> Philip Kotler, Manajemen pemasaran di Indonesia, terjemahan AB Susanto, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 325.

konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu.<sup>11</sup>

Konsep permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta ( $Q_d$ ) dengan harga ( $P$ ) berbagai tingkat harga. Hukum permintaan (*law of demand*) menerangkan bahwa dalam keadaan hal lain tetap (*ceteris paribus*) apabila harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan berkurang, dan sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa pada saat harga turun dari  $P_1$  ke  $P_2$ , maka permintaan terhadap suatu barang meningkat dari  $Q_1$  ke  $Q_2$ . Bentuk kurva permintaan diatas arahnya turun, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah (*downward sloping to the right*) yang menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan merupakan hubungan yang terbalik (negatif).<sup>12</sup> Hal ini dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:<sup>13</sup>



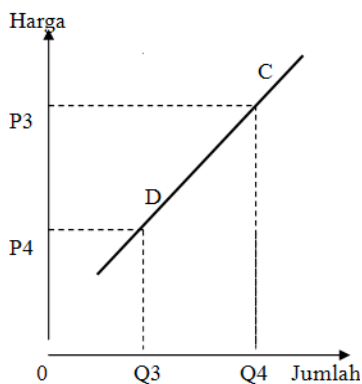
Fenomena yang terjadi pada saat adanya kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedang pada saat barang melimpah maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Fenomena ini dikritisi oleh Abu Yusuf, bahwa tidak selalu terjadi bila barang sedikit maka harga akan mahal dan bila persediaan barang melimpah maka harga akan murah.

11 A. Zambrana “Hukum Permintaan dan Penawaran “ *Artikel*, <http://www.buletinekonomi.blogspot.com/2008/04/kekuatan-penawaran-dan-permintaan.html>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.

12 Umar Faruq, “Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional” *Artikel*, Pascasarjana UIN “Sunan Gunung Djati” Bandung.

13 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 28.

Pernyataan Abu Yusuf<sup>14</sup> bahwa tidak selalu terjadi bila barang sedikit maka harga akan mahal dan bila persediaan barang melimpah maka harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini:<sup>15</sup>



Menurut Abu Yusuf tetap saja harga tetap mahal (P3) ketika persediaan barang melimpah (Q3). Sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q4).

Pernyataan Abu Yusuf ini mengkritisi kebiasaan umum yang mengatakan harga berbanding terbalik dengan jumlah persediaan barang.

Teori permintaan, bahwa permintaan akan bertambah apabila harga turun dan akan berkurang apabila harga naik. Hukum permintaan tersebut dilatari oleh kenyataan bahwa orang harus memenuhi kebutuhannya sebatas anggaran atau pendapatan tertentu. Hukum permintaan menyatakan, bahwa bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas (jumlah) barang yang diminta akan berkurang atau menurun, dengan asumsi *ceteris paribus* (diluar obyek yang diselidiki, keadaannya tetap tidak berubah). Apabila dinyatakan dalam bentuk tabel, “permintaan” dapat dimisalkan sebagai berikut :

Daftar berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga

14 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 29

15 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 29.

Harga Barang X (Rp)	Kuantitas barang X yang diminta (unit)	Titik Korespondensi
100	10	A
110	8	B
120	6	C
150	1	D

Apabila dinyatakan dalam bentuk matematis dapat ditulis :

$$Q_d = f(H, H_s, H_k, Y, t)$$

dimana :  $Q_d$  = Jumlah barang yang diminta  
 $H$  = Harga barang yang bersangkutan  
 $H_s$  = Harga barang substitusi  
 $H_k$  = Harga barang komplementer  
 $Y$  = Pendapatan konsumen  
 $t$  = Selera (*taste*), biasanya faktor ini dihilangkan karena sulit untuk mengukurnya secara kuantitatif.

Rumusan tersebut dapat dibaca sebagai berikut: Jumlah barang tertentu yang diminta tergantung atas tingkat harga barang tersebut, harga barang lain yang bersifat substitusi, tingkat harga barang lain yang bersifat komplementer, pendapatan konsumen dan selera. Keunggulan pendekatan matematis dibanding dengan grafis yaitu tidak diharuskan pernyataan *ceteris paribus*. Hukum permintaan menyatakan apabila harga sesuatu barang meningkat kuantiti yang diminta jatuh, dan apabila harga sesuatu barang jatuh maka kuantiti yang diminta akan meningkat, *ceteris paribus*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Anonymous, "Hukum Permintaan dan Penawaran" *Artikel*. <http://www.psb-psma.org/content/powerpoint/hukum-permintaan-dan-penawaran>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.

Faktor – faktor yang mempengaruhi teori permintaan, yaitu:

1. Harga barang lain.

Permintaan akan dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Dengan catatan barang lain itu merupakan barang substitusi (pengganti) atau pelengkap (komplementer). Apabila barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan turun.

2. Tingkat pendapatan.

Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli konsumen kuat, sehingga akhirnya akan mendorong permintaan terhadap suatu barang.

3. Selera, kebiasaan, mode.

Selera, kebiasaan, mode atau musim juga akan memengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat.

4. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk mencerminkan jumlah pembeli. Sifat hubungan jumlah penduduk dengan permintaan suatu barang adalah *positif*, apabila jumlah penduduk meningkat, maka konsumen terhadap barangpun meningkat.

5. Perkiraan harga dimasa datang

Apabila kita memperkirakan harga suatu barang di masa mendatang naik, kita lebih baik membeli barang tersebut sekarang guna menghemat belanja di masa mendatang, maka permintaan terhadap barang itu sekarang akan meningkat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara permintaan dan perkiraan harga di masa mendatang adalah *positif*.

## b. Teori Permintaan Islami

Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil al-syai*. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib.

Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, apabila barang tersebut tidak dimakan akan membahayakan dirinya. Di saat darurat seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram seperlunya. Selain itu, dalam ajaran Islam orang yang mempunyai uang banyak tidak serta merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran (*budget constrain*) belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan (*israf*), dan harus mengutamakan kebaikan (*maslahah*). Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan dan kemubadziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab, untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak dan shadaqah.

Permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga, apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya, dengan asumsi *ceteris paribus*. Apabila menghadapi pilihan antara barang halal dan haram, maka *optimal solution*nya adalah *corner solution*, yaitu keadaan dimana kepuasan maksimal terjadi di kurva indifferen dengan konsumsi barang haramnya di titik 0. Dengan kata lain, gunakan anggaran untuk mengkonsumsi



barang halal seluruhnya. Apabila Y adalah barang haram dan X adalah barang halal, maka *optimal solution* nya adalah pada titik dimana konsumsi barang haram berada di titik O.

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dalam kitab *Majmu' Fatawa* menjelaskan, bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain:

- 1) Keinginan atau selera masyarakat (*Ragbbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut.
- 2) Jumlah para peminat (*Tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Dalam hal ini dapat disamakan dengan jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah para peminat terhadap suatu barang.
- 3) Kualitas pembeli (*Al-Mu'awid*). Di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka kualitas masyarakat untuk membeli suatu barang akan naik.
- 4) Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut tinggi.
- 5) Cara pembayaran yang dilakukan, tunai atau angsuran. Apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, maka permintaan tinggi.
- 6) Besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan meningkat

### c. Perbedaan Teori Permintaan Umum dengan Permintaan Islami

Definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan, antara permintaan umum dan Islam mempunyai kesamaan. Ini dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan dilapangan (empiris) dari tiap-tiap unit ekonomi. Namun terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya, diantaranya:

- 1) Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah SWT. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan (*revelation*), yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religi dalam mekanisme sistemnya. Sementara itu dalam ekonomi umum filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi umum adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreatifitas, daya olah informasi dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan, dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan.
- 2) Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 87-88:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ  
 لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾  
 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
 أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah: 87-88).<sup>17</sup>

Oleh karenanya dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan umum, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan.

- 3) Motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut sedangkan motif permintaan umum/konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan (*interest*). Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia.

<sup>17</sup> Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 111.

- 4) Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat (*falāh*) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Perbedaan yang menjadi asumsi dasar konsep permintaan umum maupun Islami memiliki keterkaitan langsung terhadap implementasi konsep permintaan tersebut. Perbedaan yang perlu diperhatikan terutama pada permintaan dalam Islam adalah sumber hukum dan adanya batasan syariah, sudut pandang barangnya, motif dari permintaan dan tujuannya. Dengan asumsi bahwa tidak ada hubungan keterkaitan antara permintaan dalam ekonomi konvensional dengan permintaan dalam ekonomi Islam, maka harus memilih salah satu dari keduanya. Oleh karenanya diharapkan bahwa permintaan dalam ekonomi Islam ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehingga tercipta perekonomian masyarakat yang Islami.<sup>18</sup>

## 2. Teori Penawaran Umum Dalam Islami

Pada bahasan ini akan diuraikan mengenai teori penawaran umum dan teori penawaran secara Islami, yaitu:

### a. Teori Penawaran Umum

Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Penawaran dapat juga diartikan sebagai kemampuan produsen dalam menyediakan permintaan masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang ada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu: (1). Harga barang itu sendiri. (2). Harga-harga barang lain. (3). Biaya produksi. (4). Tujuan perusahaan. (5). Tingkat produksi

---

<sup>18</sup> Umar Faruq, "Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional" *Artikel*, Pascasarjana UIN "Sunan Gunung Djati" Bandung.

yang digunakan. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu.

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Hukum penawaran yaitu apabila harga naik jumlah yang ditawarkan akan bertambah dan apabila harga turun jumlah yang ditawarkan akan berkurang.<sup>19</sup>

Perbedaan definisi penawaran dengan definisi permintaan hanya terletak pada satu kata. Jika pada permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata menjual. Seperti juga dalam permintaan, analisis penawaran juga mengasumsikan suatu periode waktu tertentu, dan bahwa faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang tersebut dianggap tidak berubah atau konstan (*ceteris paribus*).<sup>20</sup> Dijelaskan bahwa penawaran berkorelasi positif terhadap harga ( $P$ ). Ini berarti bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan karena makin rendah suatu harga, makin kecil suatu keuntungan atau malah timbul kerugian. Sebagai agen ekonomi yang rasional, produsen akan memutuskan produksinya.

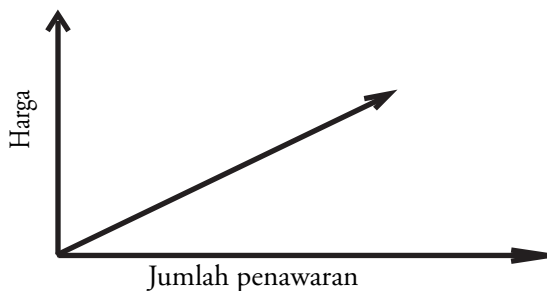
19 Anonymous, "Hukum Permintaan dan Penawaran" *Artikel*. <http://www.psb-psma.org/content/powerpoint/hukum-permintaan-dan-penawaran>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012

20 Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 90.

Dengan demikian dapatlah digambarkan dalam sebuah diagram di mana sumbu vertikal adalah harga dan sumbu horizontal adalah jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Di samping itu, ongkos produksi juga merupakan faktor penting dalam menentukan penawaran suatu produk. Ongkos produksi pada gilirannya ditentukan oleh harga dari faktor input. Perubahan dalam harga-harga faktor input umumnya dikarenakan adanya perubahan dalam laju pajak dan subsidi. Sekalipun diasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan dalam kebijakan fiskal pemerintah berkaitan dengan perpajakan atau subsidi, masih ada faktor lain yang sangat berperan dalam menentukan kedudukan penawaran dalam perekonomian umum/konvensional. Kemajuan teknologi berperan sangat penting dalam mengurangi ongkos produksi karena perubahan dalam teknologi yang lebih maju memungkinkan dipakainya cara-cara produksi yang jauh lebih efisien dan tentu saja lebih murah dari pada sebelumnya<sup>21</sup>

Secara grafis, hukum penawaran dinyatakan dalam grafik yang naik dari bawah ke kanan atas, seperti terlihat di bawah ini:



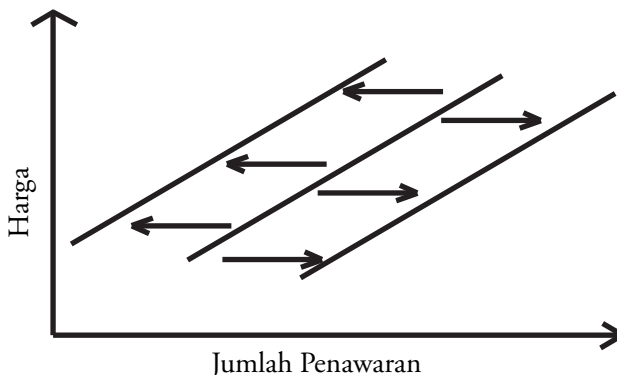
---

21 Anonymous, "Teori Penawaran Islami" *Artikel*, [http://dimel2002.multiply.com/journal/item/12/Teori\\_Penawaran\\_islami](http://dimel2002.multiply.com/journal/item/12/Teori_Penawaran_islami). Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

Kurva di atas sebuah diagram di mana sumbu *vertikal* adalah harga dan sumbu *horizontal* adalah jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam menganalisis penawaran, perlu pula dibedakan antara penawaran (*supply*) dan jumlah penawaran (*quantity supplied*), pembedaan di antara keduanya sama, seperti membedakan antara permintaan (*demand*) dengan jumlah permintaan (*quantity demanded*). Secara ringkas bisa dikatakan bahwa: Perubahan pada harga barang/jasa mengakibatkan perubahan pada jumlah penawaran barang/jasa tersebut. Tercermin dalam grafik sebagai pergerakan di dalam kurva penawaran.

Perubahan pada variabel-variabel lain di luar harga barang/jasa akan mengakibatkan perubahan penawaran barang/jasa tersebut. Hal ini tercermin dalam grafik sebagai pergeseran kurva penawaran baik ke atas maupun ke bawah.



Grafik di atas adalah pergeseran kurva penawaran. Seperti juga permintaan penawaran suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Banyak faktor faktor lain yang mempengaruhi penawaran suatu barang selain harga barang tersebut. Sebagaimana telah diterangkan

di atas, perubahan pada faktor faktor selain harga yang akan diuraikan di bawah ini, akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Adapun arah pergeseran apakah ke atas atau ke bawah tentu bergantung kepada efek perubahan masing masing variabel terhadap jumlah penawaran pada tingkat harga yang tetap.<sup>22</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, diantaranya:

1) Biaya produksi

Harga bahan baku yang mahal akan mengakibatkan tingginya biaya produksi dan menyebabkan produsen menawarkan barang dalam jumlah terbatas untuk menghindari kerugian karena takut tidak laku.

2) Teknologi

Adanya kemajuan teknologi akan menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan produsen dapat menawarkan barang dalam jumlah yang lebih besar lagi.

3) Harga barang pelengkap dan pengganti

Apabila harga barang pengganti mengalami kenaikan maka produsen akan memproduksi lebih banyak lagi karena berasumsi konsumen akan beralih ke barang pengganti karena harganya lebih murah.

4) Pajak

Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan.

5) Perkiraan harga barang di masa datang

Apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya

---

22 Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 90-91.



produksi berkurang dan tingkat harga barang dan jasa naik, maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Tetapi bila pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain.

6) Tujuan dari perusahaan

Bila perusahaan berorientasi untuk dapat menguasai pasar, maka dia harus mampu menekan harga terhadap barang dan jasa yang ditawarkan sehingga keuntungan yang diperoleh kecil. Bila orientasinya pada keuntungan maksimal maka perusahaan menetapkan harga yang tinggi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya.<sup>23</sup>

### b. Teori Penawaran Islami

Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. *Pertama* adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi (*zuhud*) dan ekonomis (*iqtishad*). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup *Islamic man*. *Kedua* adalah norma-norma Islam yang selalu menemani

---

23 Anonymous, "Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ilmu Ekonomi" *Artikel*, <http://dhewiiiwyyy.blogspot.com/2011/04/hukum-permintaan-penawaran-dalam-ilmu.html>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakekatnya adalah barang-narang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi dirinya dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik itu.

Dengan kedua batasan ini maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit dari pada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan demikian terdapat dua penyaringan (*filtering*) yang membuat wilayah penawaran (*domain*) dalam ekonomi Islam menyempit yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma moral Islam.

### **Asumsi-Asumsi**

Sekalipun jarang diungkapkan atau bahkan sengaja disembunyikan oleh buku-buku teks ekonomi konvensional, pada hakekatnya asumsi-asumsi tertentu telah berfungsi sebagai landasan teori-teori baginya. Ketidak terusterangan dalam persoalan ini bisa saja dipicu oleh kepercayaan Barat bahwa apa yang menjadi nilai baginya sebenarnya berlaku juga bagi masyarakat lain. Tokoh ekonom Barat yang paling egaliter semacam Gunnar Myrdal sekalipun masih menyimpan sikap *etnosentris* yang menganggap bahwa nilai-nilai yang menjadi pondasi kemajuan ekonomi Barat sebenarnya sangat asing bagi masyarakat Asia. Karena itulah perlu kiranya menjelaskan di sini beberapa asumsi yang memiliki implikasi dalam aspek penawaran.

Pertama, *homo economicus*. Dalam ekonomi konvensional, para pelaku dan pemain ekonomi (*economic agent*) dipandang sebagai suatu makhluk ekonomi yang berusaha untuk melampiaskan keinginannya

dengan cara apapun. Nafsu ingin memenuhi segala keinginannya dan cara yang dipakai untuk memenuhinya seringkali atau pada umumnya tidak dihubungkan secara langsung atau tidak langsung dengan norma moral, baik yang diambil dari ajaran agama maupun dari filsafat (*etiket*). Hal ini menimbulkan dorongan tanpa batas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya yang tersedia di alam bagi pemenuhi keinginan manusia. Selama usaha manusia dipertaruhkan untuk memenuhi keinginannya, mengejar keuntungan dalam teori penawaran, selama itu pula ia dianggap sebagai sebuah usaha yang baik. Hal ini menimbulkan pengurasan sumber daya alam yang tersedia sehingga berakibat pada terancamnya keseimbangan ekologi terutama bagi generasi mendatang.

Semua kreasi dan inovasi dipacu dan terus digenjot atas nama ekonomi. Padahal tidak semua barang atau jasa yang diproduksi tersebut penting untuk diciptakan bagi kepentingan manusia. Sebagian dari barang yang diproduksi itu pada hakekatnya suatu bentuk kemubaziran karena sebenarnya tidak perlu diproduksi atau sebenarnya ada barang lain yang menempati ranking lebih penting harus terlebih dahulu diproduksi. Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian menjadi tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*).

Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang sellau menemaninya ke mana saja dan di mana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan riil dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri (*maqoshidu syariah*). Dalam perspektif ini tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i.

Kedua, *rasionalitas*. Asumsi kedua ini merupakan turunan dari asumsi yang pertama. Jika ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa manusia adalah *economic man* yang selalu didorong untuk melampaikan keinginannya dengan cara apapun, maka asumsi rasionalitas merupakan ruhnya yang mengilhami seluruh usahanya dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut. Selama manusia menguras tenaga dan pikirannya untuk memenuhi keinginannya dengan cara apapun, manusia adalah makhluk rasional. Ketika produsen berusaha memaksimalkan keuntungan *an sich*, dengan mengabaikan tanggung jawab sosial, manusia adalah makhluk rasional dan tidak perlu dikhawatirkan. Begitu juga dengan konsumen yang ingin memaksimalkan nilai guna (*utility*) ketika membeli suatu produk, maka ia berjalan pada jalur rasionalitas dan hal itu secara ekonomi adalah baik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi ini tetap menjadi acuan tetapi dengan beberapa catatan dan tambahan. Adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Gaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi serta selalu memperhatikan batas halal dan haram merupakan rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada *Islamic man*.

Ketiga, netral terhadap nilai (*value neutral*). Asumsi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari disiplin ilmu ekonomi konvensional yang dipandang sebagai disiplin positif. Tugas dari suatu disiplin yang positif adalah menggambarkan realitas atau suatu fenomena secara objektif tanpa ada unsur campur tangan dari pengamat. Di awal-awal perkembangan ilmu ekonomi menjadi suatu disiplin ilmiah, banyak pakarnya yang cenderung menjadikannya sebagai suatu ilmu positif dan eksak layaknya fisika atau kimia.

Sekalipun hingga sekarang terbukti bahwa ilmu ekonomi

konvensional tidak selalu positif, tetapi buku-buku teks masih selalu alergi jika dikaitkan dengan moral terutama yang berasal dari nilai-nilai keagamaan. Gejala ini disebabkan karena sekulerisme dalam ilmu pengetahuan telah mencapai akar-akarnya sehingga buah yang muncul dari ilmu pengetahuan itu sudah terkena racun sekulerisme. Namun perlu dicatat bahwa asumsi netral terhadap nilai ini tidak selalu dapat dipertahankan. Umumnya dalam bidang ilmu mikro ekonomi akar netralitas ini begitu kuat dan menghujam, tetapi dalam makro ekonomi tidak demikian. Malahan dapat melihat bahwa semua tujuan-tujuan pokok dalam bidang makroekonomi pada hakekatnya adalah bermuatan nilai (*value laden*) misalnya tentang kesempatan kerja penuh (*full employment*), stabilitas nilai tukar dan harga dan lain-lain. Bahkan kebijakan pemerintah di hampir semua bidang tidak pernah terlepas dari nilai-nilai.

Adanya keterikatan kepada nilai dalam penawaran tidak menjadikan kinerja produksi dan penawaran dalam perspektif Islam kekurangan insentif. Dengan injeksi moral Islam justru membuka dan mempeluas horizon dan berfungsi mendorong agen ekonomi untuk berusaha dengan lebih baik dan efisien. Baginya yang memahami Islam secara parsial dan tidak komprehensif merasa bahwa semua nilai-nilai ini hanya berfungsi sebagai hambatan dalam ekonomi dan pembangunan.<sup>24</sup>

### **3. Pembentukan Keseimbangan Harga**

Teori harga keseimbangan sering disebut juga pasar. Harga keseimbangan merupakan harga dan jumlah barang yang disepakati oleh konsumen dan produsen atau permintaan dan penawaran.<sup>25</sup> Permintaan

24 Anonymous, "Teori Penawaran Islami" *Artikel*, [http://dimel2002.multiply.com/journal/item/12/Teori\\_Penawaran\\_islami](http://dimel2002.multiply.com/journal/item/12/Teori_Penawaran_islami). Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

25 Anonymous, "Pembentukan Harga Keseimbangan" *Artikel*. <http://aburaffi.wordpress.com/tag/harga-keseimbangan>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

dan penawaran tersebut telah mendorong penjual dan pembeli melakukan proses tawar menawar untuk menentukan harga yang disepakati atau harga pasar. Jadi harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar menawar. Harga pasar ini sering dikenal sebagai harga keseimbangan.

#### a. Proses Terbentuknya Harga Pasar.

Proses terbentuknya harga keseimbangan berawal dari interaksi permintaan dan penawaran. Dalam menganalisa interaksinya harus didasari oleh konsep hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan menjelaskan apabila terjadi penurunan harga, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah (*ceteris paribus*). Terjadinya harga keseimbangan melalui proses bertemunya dua kekuatan yaitu permintaan dengan kekuatan penawaran pada titik yang sama. Untuk lebih jelasnya akan digabungkan tabel permintaan dan penawaran, yaitu:

Harga Rp 1000 jumlah barang yang diminta 5000 unit dan jumlah barang yang ditawarkan 1000 unit . Keadaan itu jumlah barang yang diminta lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan  $\{ 4000 = 5000(D) - 1000(S) \}$  sehingga harga akan cenderung untuk naik. Diambil harga Rp 5000 pada harga tersebut jumlah barang yang diminta 1000 unit dan jumlah barang yang ditawarkan 5000 unit sehingga jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dibandingkan jumlah barang yang diminta.

$\{ 4000 = 5000 (S) - 1000(D) \}$  Keadaan tersebut akan mendorong harga untuk turun. Diambil harga Rp 2000, pada harga tersebut jumlah barang yang diminta 4000 unit sedangkan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 2000 unit, keadaan tersebut jumlah barang yang diminta lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan,  $\{ 2000 = 4000(D) - 2000(S) \}$  keadaan tersebut akan mendorong harga barang tersebut untuk naik. *Sekarang silahkan analisa pada harga Rp 4000*

*bagaimana yang terjadi?*. Pada harga Rp 3000 jumlah barang yang diminta sebanyak 3000 unit dan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 3000 unit. Pada harga tersebut merupakan harga kesepakatan antara permintaan dan penawaran, disebut harga keseimbangan atau *equilibrium*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel Permintaan dan Penawaran*

Harga Satuan (Rp)	Permintaan (D) (unit)	Penawaran (S) (unit)
1000	5000	1000
2000	4000	2000
<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
4000	2000	4000
5000	1000	5000

Berdasarkan penjual (penawaran), maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu;

- 1) Penjual super marginal, yaitu penjual yang dapat menjual barang dan jasa di bawah harga pasar.
- 2) Penjual marginal, adalah penjual yang mampu menjual pada harga keseimbangan atau sesuai dengan harga pasar.
- 3) Penjual submarginal, adalah penjual yang hanya mampu menjual barangnya di atas harga pasar.

Beberapa faktor yang menyebabkan pengelompokan penjual adalah:

- 1) Biaya produksi.
- 2) Intesitas kebutuhan akan uang cash.
- 3) Ada tidaknya fasilitas penjualan.
- 4) Kekuatan atau daya tahan barang.

Pasar membagi golongan pembeli berdasarkan kemampuan daya belinya menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Pembeli super marginal, yaitu pembeli yang kemampuan daya belinya berada di atas harga pasar atau harga keseimbangan.
- 2) Pembeli marginal adalah pembeli yang kemampuan daya belinya berada pada harga pasar (harga keseimbangan).
- 3) Pembeli Submarginal yaitu pembeli dengan daya belinya berada di bawah harga keseimbangan.

#### **b. Pengertian Pasar**

Pasar adalah tempat bertemunya penjual/produsen (penawaran) dan pembeli/konsumen (permintaan) untuk melakukan transaksi jual beli. Bertemunya penjual dan pembeli tidak harus selalu secara fisik, tetapi bisa menggunakan berbagai media komunikasi seperti telepon, fax maupun internet. Dari situ maka dikenal dua macam pasar, yaitu :

- 1) Pasar konkrit, dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung/fisik.
- 2) Pasar abstrak, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung

#### **c. Bentuk Pasar Menurut Struktur**

- 1) Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition*)  
Adalah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak sehingga tidak ada satupun penjual maupun pembeli yang bisa mempengaruhi harga
- 2) Pasar Persaingan Tidak Sempurna (*Imperfect Competition*)  
Adalah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak, akan tetapi di pasar tersebut terdapat penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga.

Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna antara lain sebagai berikut:



- 1) Pasar Monopoli adalah pasar produk di mana hanya terdapat satu penjual saja dan tidak tersedia barang substitusi.
- 2) Pasar Oligopoli adalah Pasar di mana terdapat beberapa penjual dalam pasar suatu produk tertentu.
- 3) Pasar Persaingan Monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual (produsen) sehingga ada unsure persaingan tetapi produknya dapat dibedakan
- 4) Pasar Monopsoni adalah pasar di mana pembeli produk hanya satu sementara penjualnya banyak, sehingga pembeli dapat mempengaruhi harga
- 5) Pasar Oligopsoni adalah pasar di mana pembelinya sedikit sementara penjualnya banyak

#### **d. Bentuk-bentuk Pasar**

- 1) Pasar Barang; dikenal pula sebagai bursa komoditi, yaitu pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli barang/komoditi tertentu.
- 2) Pasar Input; adalah pasar yang memperjual belikan faktor-faktor produksi.<sup>26</sup>

### **C. Kebijakan Pemerintah dalam kenaikan harga**

Pada prinsipnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional dalam pembangunan materil dan spirituil demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kebijakan secara umum meliputi pemerintah, masyarakat dan umum yang disebut kebijakan publik. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan disusun (*constructed*) dan didefinisikan dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan

---

<sup>26</sup> Anonymous, "Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ilmu Ekonomi" *Artikel*, <http://dhewiiwyyy.blogspot.com/2011/04/hukum-permintaan-penawaran-dalam-ilmu.html>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

dan agenda politik. Atau, seperti yang diungkapkan oleh *Dye, Thomas* menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Dalam dimensi subyek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Maka itu salah satu ciri kebijakan adalah "*what government do or not do*". Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik di sini adalah masyarakat. James Anderson mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, seperti berikut :

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada tujuan.
2. *Public policy consists of courses of action rather than separate, discrete decisions or actions performed by government officials.* Maksudnya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. *Policy is what government do not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diintikan akan dilakukan pemerintah.
4. *Public policy may be either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif : dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, ada beberapa tahapan diantaranya: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Sementara jika dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Seperti penjelasan sebelumnya, suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria yaitu; diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, dan berorientasi kedepan. Unsur kedua, masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Dengan kata lain, jika suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab : Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Kedua, karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan. Unsur ketiga, Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Seberapa besar dampak yang terjadi untuk tiap jenis kebijakannya sulit diperhitungkan karena : tidak tersedianya informasi yang cukup, dalam bidang sosial pengaruh dari satu kebijakannya sulit dipisahkan dari pengaruh kebijakan lain, proses berjalannya pengaruh dari sesuatu kebijakan di bidang sosial sulit untuk diamati. Unsur keempat, sarana atau alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana

yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain : kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.<sup>27</sup>

Menurut Retno Wd kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga menggunakan 3 kebijakan yaitu:<sup>28</sup>

1. Kebijakan moneter
2. Kebijakan fiskal
3. Kebijakan non moneter

### **1. Kebijakan Moneter**

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikan cash ratio.

- a. Politik Diskonto ditujukan untuk menaikan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
- b. Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya

---

27 Hans, "Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan BBM, *Makalah*, Tahun 2013

28 Retno Wd., "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi", *Artikel*, Tahun 2012

- agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.
- c. Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

## **2. Kebijakan Fiskal**

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah ( penerimaan dan pengeluaran pemerintah ). Bentuk kebijakan ini antara lain:

- a. Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- b. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

## **3. Kebijakan Non Moneter**

Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang. Yaitu:

- a. Menaikkan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingit inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu

- pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
- b. Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
  - c. Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

Menurut Ari Sucipta, cara pemerintah mengatasi inflasi, yaitu dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan kebijakan lain. Adapun penjelasan kebijakan tersebut akan diuraikan di bawah ini.<sup>29</sup>

## 1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu:

<sup>29</sup> Dikutip dari Ari Sucipta, “Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Inflasi, *Artikel*, Tahun 2013, h. 1

a. Persediaan Kas

Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

b. Operasi Pasar Terbuka

Menurut Djamil Suyuthi (dalam Pengantar Ekonoi Makro:1989) dinyatakan bahwa bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan jalan membeli atau menjual surat-surat berharga pemerintah (*government securities*). Dalam bukunya dinyatakan bahwa bila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, misalnya karena bermaksud untuk mendorong perkembangan kegiatan dalam masa resesi, maka bank sentral mengadakan pembelian-pembelian surat berharga.

Dengan tindakan ini, uang beredar akan bertambah, karena bila bank sentral melakukan pembayaran atas pembelian itu, cadangan bank-bank umum akan bertambah. Dengan bertambahnya cadangan yang dimiliki bank umum, maka bank-bank tersebut dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Sebaliknya, bila pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya pada waktu inflasi, maka bank sentral harus melakukan penjualan surat-surat berharga tersebut. Dengan penjualan surat-surat berharga tersebut, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dimiliki bank umum berkurang, dan demikian kemampuan untuk memberi pinjaman juga berkurang.

### c. Diskonto

Melalui perubahan tingkat diskonto, Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dan volume pinjaman. Misalnya dalam menekan inflasi, kebijakan diskonto dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

## 2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:

- a. Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- b. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

## 3. Kebijakan Lain

Kebijakan lain adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumlah uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi.

### a. Sanering

Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:



- 1) Penurunan nilai uang
  - 2) Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
- b. Devaluasi
- Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
- c. Menaikan hasil produksi.
- Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
- d. Kebijakan upah
- Upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
- e. Pengawasan harga dan distribusi barang.
- Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik

tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

Adapun dampak inflasi adalah:<sup>30</sup>

## 1. Akibat Buruk

Seperti pengangguran, inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Akibat buruk inflasi dapat dibedakan kepada dua aspek, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Akibat buruk kepada perekonomian
- b. Akibat buruk kepada individu dan masyarakat.

### *a. Akibat Buruk Kepada Perekonomian*

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai *stimulator* bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja, sehingga keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakan investasi dimasa datang dan ini akan mewujudkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila inflasi menjadi lebih serius keadaannya, perekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan. Pengalaman beberapa Negara yang telah mengalami inflasi hiper menunjukkan bahwa inflasi

---

30. Dikutip dari Ari Sucipta, “Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Inflasi, Artikel, Tahun 2013, h. 1

31 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi. Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 16

yang buruk akan mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik, dan tidak mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Terlebih dahulu ekonomi harus distabilkan, dan ini termasuk usaha menstabilkan harga-harga, sebelum pertumbuhan ekonomi yang teguh dapat diwujudkan.

Ketiadaan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari inflasi yang serius, hal ini disebabkan oleh beberapa factor penting seperti yang diuraikan dibawah ini:

- 1) Inflasi menggalakan penanaman modal spekulatif  
Pada masa inflasi terdapat kecenderungan di antara pemilik modal untuk menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat *spekulatif*. Dengan membeli rumah, tanah, dan barang yang berharga akan lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif.
- 2) Tingkat bunga meningkat sehingga akan mengurangi investasi.  
Untuk menghindari kemerosotan nilai modal yang mereka pinjamkan, institusi keuangan akan meningkatkan tingkat bunga kepada pinjaman-pinjaman mereka. Makin tinggi tingkat inflasi, makin tinggi pula tingkat bunga yang mereka tentukan. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanaman modal untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif.
- 3) Inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.  
Inflasi akan bertambah cepat jalannya apabila tidak dikendalikan. Pada akhirnya inflasi akan menimbulkan ketidakpastian dan arah perkembangan ekonomi tidak lagi dapat diramalkan dengan baik. Keadaan ini akan mengurangi

kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

4) Menimbulkan masalah neraca pembayaran.

Inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan didalam negeri. Dengan demikian, inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan bertambah lambat. Disamping itu aliran modal keluar akan bertambah banyak daripada yang masuk keluar negeri. Berbagai kecendrungan ini akan memperburuk keadaan neraca pembayaran, defisit neraca pembayaran yang serius mungkin berlaku. Hal ini seterusnya akan menimbulkan kemerosotan nilai mata uang.

*b. Akibat Buruk Kepada Individu Dan Masyarakat*

Akibat buruk kepada individu dan masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga aspek seperti yang diterangkan dibawah ini:

1) Memperburuk distribusi pendapatan

Dalam masa inflasi nilai harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan pabrik, dan pertokoan akan mengalami kenaikan harga yang adakanya lebih cepat dengan inflasi itu sendiri. Sebaliknya penduduk yang tidak mempunyai harta, yang meliputi sebagian besar dari golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, pendapatan riilnya merosot sebagai akibat inflasi. Dengan demikian, inflasi melebarkan ketidaksamaan distribusi pendapatan.

2) Pendapatan riil merosot

Sebagian tenaga kerja disetiap Negara terdiri dari pekerja-pekerja bergaji tetap. Dalam masa inflasi biasanya kenaikan harga-harga selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan

pendapatan riil sebagian besar tenaga kerja. Dengan demikian akan berimplikasi terhadap menurunnya kemakmuran masyarakat.

### 3) Nilai riil tabungan merosot

Dalam perekonomian biasanya masyarakat menyimpan sebagian besar kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di institusi keuangan. Nilai riil tabungan tersebut akan merosot sebagai akibat inflasi dan juga pemegang-pemegang uang tunai akan dirugikan karena kemerosotan nilai riilnya.

## 2. Akibat Positif

Selain dampak buruk, inflasi juga memiliki dampak positif yaitu, apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepadakreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil). Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

# **BAB IV**

## **DANA BLSM DALAM MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA**

### **A. Tujuan Program BLSM**

Tujuan program BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya. BLSM memang bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual

aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan sebelumnya (tahun 2005 dan 2008) membuktikan bahwa program ini telah membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam menjaga daya beli setelah kenaikan harga dengan tetap mempertahankan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011. Besaran BLSM adalah sebesar Rp.150.000/bulan/Rumah Tangga selama empat bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan rentan untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM. Penyaluran BLSM dibagi menjadi 2 (dua) kali penyaluran dengan jadwal: pembayaran pertama pada bulan Juni/Juli 2013 sebesar Rp.300.000, dan pembayaran kedua pada bulan September/Oktobre 2013 sebesar Rp. 300.000. Untuk mendapatkan BLSM, rumah tangga penerima wajib membawa KPS dan dokumen pendukung lainnya (KTP, KK) ke kantor pos terdekat. Pengambilan juga dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa dan bukti pendukung tambahan seperti KK, Surat Keterangan Domisili dan lain sebagainya. Pada wilayah terpencil dan tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus pembayaran. Pembayaran BLSM masih bisa dilakukan hingga awal Desember 2013 yang ditentukan oleh kantor pos dan Pemerintah Daerah setempat.<sup>1</sup>

Bantuan Langsung Tunai yang kemudian menjadi Santunan Langsung tunai menjadi kebijakan pemerintah permen kepada sekelompok paling miskin, memang hal ini cukup efektif, bagi keluarga

---

1. Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, Solusi Masalah Kepesertaan dan Pemutakhiran Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), (Jakarta: Sekretariat TNP2K, 2013), h. 5-6



miskin dana sangat miskin akan tetapi pemerintah sendiri telah menciptakan kondisi ketergantungan pada anggaran negara. Kebijakan ini mirip dengan JPS (*jaringan pengamanan soisla*) pada tingkat individu.

Dasar dari hukum untuk menyesuaikan kenaikan BBM bersubsidi adalah pasal 8 ayat 10 UU. No 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi, namun setelah lima bulan berjalan presiden tidak menggunakan kewenangan tersebut. Padahal dari segi momentum kenaikan harga BBM bersubsidi paling tepat justru saat ini, menaikkan inflasi jundrung lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Presiden berketetapan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi hanya akan diambil kalau program kompensasi untuk rakyat miskin, kepastian tentang adanya dana kompensasi menjadi peryarat bagi president untuk menaikkan haraga BBM bersubsidi.

Pemrintah baru memngusulkan program kompensasi rancangan APBN-P tahun 2013 makan dengan disahkan itu pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan dinaikan BBM bersubsidi makan ada lima program dengan alokasi dana sebesar Rp 30 triliun, salah satu dari rogram tersebut adalah program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebsesar Rp. 9,3 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga miskin. Dengan kenaikan BBM maka akan menurunkan inflasi sampai 7,76% dan pemerintah mempunyai sikap optimis akan bisa menekan inflansi ke 7,2%, setiap momentum kenaikan harga BBM bersubsidi mampu meyalurkan kompensasi, selalu saja potensial dikapitalisasi untuk kepentingan politik jangka pendek.

Program BLSM merupakan program jangka pendek yang di peruntukkan bagi masyarakat miskin dari hasil BBM bersubsidi bukanlah model kebijakan baru, pada awal kenaikan di tahun 2005 program kompensasi dari BBM sudah di bentuk dengan nama BLT, kemudian

di lanjutkan pada tahun 2008, program BLSM merupakan kelanjutan dari program BLT 2008, dan sampai sekarang masih menggunakan data lama, hal ini menjadi permasalahan baru bagi penerima program tersebut, dengan adanya ketidaksesuaian data statistik,

Kenaikan BBM mendapat banyak kritikan dari kalangan baik dari para elit politik maupun dari masyarakat sendiri, akan tetapi pemerintah sendiri sudah berusaha menunda yang seharusnya kenaikan BBM bersubsidi akan dinaikan pada pertengahan tahun 2012, akan tetapi dengan banyaknya yang kontra maka presiden mengundurkannya hingga bulan juni tahun 2013, salah satu alasan kuat pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena BUMN sudah tidak mampu untuk memberikan subsidi lagi untuk pembelian BBM seiring naiknya harga minyak dunia.

Program BLSM sendiri yang diperuntukan kepada masyarakat dengan harapan agar bisa mengurangi beban ekonomi, namun banyaknya program tersebut salah sasaran, karan belum di benahi pendataan secara akurat oleh pemerintah, masih menggunakan data lama, dan masih banyak orang yang tidak berhak menerima BLSM menjadi penerima, dan sebaliknya yang benar-benar berhak menerima program tersebut tidak menerimanya. Hal ini menjadi indikasi dari analisis kebijakan sendiri bahwa kebijakan tersebut belum bisa mengatasi perekonomian bagi masyarakat miskin, bukan akan menyelesaikan masalah, akan tetapi berdampak pada timbulnya masalah baru. Program BLSM masih banyak dari kalangan orang tertentu yang mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

Masyarakat miskin sebenarnya yang berhak mendapatkan dana BLSM, untuk itu yang dimaksud miskin adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal

2. Nas Suhey, "Analisis Kebijakan Program Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM)" *Artikel*, 2013, h. 5

dari tujuantujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lainlain. Kemiskinan juga diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau lebih, tujuantujuan yang dimaksud di sini tentunya dapat diinterpretasikan sesuai persepsi seseorang. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan berdasarkan kondisi seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi modal yang produktif atau asset (misalnya, tanah, perumahan, peralatan, kesehatan dan lainlain); sumber sumber keuangan (*income* dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi dan lainlain); jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barangbarang dan lainlain; pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan anda. Kemiskinan berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu batasan secara absolut dan batasan relatif. Kemiskinan secara absolut memberikan pengertian keadaan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan minimum untuk hidup tanpa melihat kondisi lingkungan masyarakat. Sedangkan pengertian kemiskinan relatif memberikan pengertian keadaan seseorang bila dibandingkan dengan kondisi masyarakatnya sering berpindah pindah lapangan pekerjaan dan sebahagian besar pendapatannya. Dari segi sosial, kemiskinan penduduk dapat juga disebutkan sebagai suatu kondisi sosial yang sangat rendah, seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang tidak mencukupi dan penerangan yang minim. Kondisi sosial lain dari penduduk miskin biasanya dicirikan oleh keadaan rumah tangga dimana jumlah anggota keluarga banyak, tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga rendah, dan umumnya rumah tersebut

berada di pedesaan<sup>3</sup>. Dari segi ekonomi, rumah tangga miskin dicirikan oleh jenis mata pencaharian pada sektor informal di pedesaan maupun di perkotaan, sering berpindah-pindah mata pencaharian dari produktivitas yang rendah sehingga menyebabkan pendapatan yang rendah. Karakteristik lain dari rumah tangga miskin adalah kecenderungan untuk menyediakan sebagian besar dari anggaran rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Alokasi pendapatan yang cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan merupakan cerminan adanya kemiskinan rumah tangga.

Sekurangkurangnya ada dua pendekatan untuk memberikan pengertian tentang kemiskinan. *Pertama* adalah pendekatan absolut yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik minimum, tolok ukur yang dipakai adalah kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang atau keluarga agar dapat melangsungkan hidupnya pada taraf yang layak. Pendekatan *kedua* adalah pendekatan relatif dimana kemiskinan ditentukan berdasarkan taraf hidupnya relatif dalam masyarakat.

Secara konsepsional, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara operasional kriteria kemiskinan itu ditetapkan dengan tolok ukur garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan target pembangunan biasanya dirumuskan sebagai upaya mengentaskan golongan masyarakat miskin agar mereka bisa berada di atas garis kemiskinan tersebut.<sup>4</sup>

Kemiskinan juga manifestasi dari keadaan keterbelakangan masyarakat, dimana melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi, kemiskinan dan keterbelakangan akan berkurang. Kemiskinan juga disebut melarat, menentukan garis kemelaratan perlu ditentukan suatu kebutuhan

3. Biro Pusat Statistik tahun 2012

4. Khairil Anwar, "Pengertian Kemiskinan", Makalah, IAIN Medan 2013

minimum yang memungkinkan orang hidup dengan layak. Menurutnya, memang sukar menentukan batas kelayakan jumlah pendapatan, pengeluaran konsumsi, kebutuhan kalori, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai titik tolak perhitungan. Esmara menyebutkan batas kebutuhan minimum tersebut sebagai "garis kemiskinan". Batas tersebut juga biasa disebut dengan "garis kemiskinan".<sup>5</sup>

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.<sup>6</sup> Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks tersebut membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan lahir sebagai dampak dari proses pembangunan yang tidak mencapai target kepada sebuah perbaikan sosial. Setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Masalah kemiskinan di Indonesia telah

5. Mubyarto dan Baswir, Revrisond, Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989.

6. Anonymous, Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, Departemen Dalam Negeri Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Jakarta: 2008), 2.

menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan meluncurkan suatu program anti kemiskinan lewat kebijakan yang dikenal dengan “politik etis”.<sup>7</sup>

Kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu yang tidak berbentuk (*amorphous*), tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional.<sup>8</sup> Beberapa kategori miskin seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyani<sup>9</sup> adalah tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2300 grm perhari yang di konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut para ulama<sup>10</sup> yaitu ; (1). Madzhab Hanafi kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk meminta-minta bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (2). Madzhab Maliki kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. (3). Madzhab Hambali kategori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separoh kecukupannya atau lebih. (4). Madzhab Syafi’i<sup>11</sup> kategori miskin adalah orang yang memiliki separoh dari kebutuhan dan yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat.

Menurut Gunawan Sumodiningrat<sup>12</sup> kemiskinan dapat dibedakan

---

7. Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan, Jakarta: IMPAC, 1998, h. 43.

8. Moeljarto Tjokrowinoto, Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan dalam buku Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999, h. 85.

9. Sri Mulyani, Dialog Tentang Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM, Selasa tgl. 8 Maret 2005, jam 21.00 WIB. di SCTV. Sri Mulyani adalah sebagai menteri perekonomian pada kabinet bersatu priode 2004-2009. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf Kala (JK).

10. Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqh ‘Alal Mazdahibil Arba’ah, Daar El-Fikr Berut, th. 1994 h.506.

11 . Muhammad Jawad Mugnyiah, al-Fiqh ala ‘al-Madzahib al-Khomsah, Daar El-Fikr Berut, th, 1996 h. 191.

12. Gunawan Sumodiningrat, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996 h.7.

dalam tiga pengertian yaitu : Pertama kemiskinan absolut yaitu apabila pendapatan seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (natural). Kedua Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh factor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Ketiga kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Beberapa pendapat lain tentang kategori kemiskinan diantaranya yaitu<sup>13</sup> : (1). Murjanto Danusaputro, kemiskinan adalah pendapatan sebesar 320 kg ekwivalen besar untuk penduduk di kota atau 240 kg untuk penduduk di pedesaan setahunnya. (2). Moh. Bambang Agustin, miskin itu masih lebih baik, karena masih ada yang lebih sengsara lagi yaitu fakir miskin. Fakir miskin sudah tidak punya apa-apa sama sekali, martabat tidak punya, baju tidak punya. (3). Firdaus Wadjdi, miskin yaitu apa bila orang tua tidak dapat membiayai anaknya sekolah. Ini sudah termasuk kategori miskin.

Menurut Dalil Hasan<sup>14</sup> ciri-ciri penduduk miskin yaitu: (1). Kelompok miskin ditingkat pedesaan; umumnya terdiri dari petani kecil /petani marginal/ pekerja pertanian /buruh tani, nelayan kecil, pengrajin

---

13. Seri kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/96 Strategi dan Evaluasi Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata Cetakan ke 2, 1996 h.44-47.

14. Dalil Hasan, Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwisata, No. 6/VII/ 1996 h. 7.

kecil, pengangkut kecil (grobak, becak, dokar/delman, ojek) dan sebagainya. (2). kelompok miskin ditingkat perkotaan; umumnya terdiri dari pekerja harian di pabrik, pekerja harian di bangunan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengerajin kecil, pengusaha kecil (kios, warung, tenda, greobak, begkel kecil, pengemudi harian (gerobak, ojek, dokar, becak, dan sebagainya). tukang jahit, tukang reparasi, (sepeda/jam/sepatu). Pembantu rumah tangga kecil, pemulung dan sebagainya. (3). Umumnya penduduk miskin tidak mempunyai pendapatan tetap, tetapi harus puas dengan pendapatan tidak tetap/berubah/berpariasi namun masih tetap dibawah batas pendapatan minimal. (4). Sebagian besar penduduk miskin tidak bekerja secara penuh (fultimer). Tidak memperoleh jaminan kesehatan / jamaian hari tua/perlindungan kerja, tidak memperoleh tingkat upah kerja minimum yang di tetapkan oleh pemma untuk berbagai jenis pekerjaan dan berbagai kota /daerah, tidak memperoleh upah lembur, tidak memperoleh hak cuti, memperoleh sedikit pendidikan /latihan latihan dan memiliki etos kerja yang sangat rendah.(5).

Penduduk miskin pada umumnya tidak meliki peralatan produksi /peralatan kerja yang memadai, misalnya pemilikan tanah yang sangat sempit (rata-rata 0,25 Ha per kepala keluarga tani di pulau jawa), tanah marginal (tidak /kurang subur, lokasinya yang tidak menguntungkan karena letaknya di daerah aliran sungai (DAS), di atas bukit / pegunungan, di pinggir hutan, di rawa-rawa). Disamping itu, kepala rumah tangga mempunyai tanggungan keluarga yang relative tinggi (height dependency ration). (6). Tingkat pendidikan miskin pada umumnya sangat rendah (SD), bahkan sebagian peduduk miskin sebagian samasekali tidak memperoleh pendidikan formal/tidak dapat menulis dan membaca.<sup>15</sup>

Dengan banyaknya masyarakat miskin yang berhak mendaptkan BLSM melakukan protes karna tidak mendapatkan dana tersebut,

---

15. Nas Suhey, "Analisis Kebijakan Program Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM)" *Artikel*, 2013, h. 5



hampir disemua daerah terjadi dan akhirnya pemerintah sendiri mengambil tindakan dengan membuat badan pengawas independent untuk memantau langsung pencairan dana BLSM tersebut. Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah telah membentuk tim pemantau untuk mengontrol program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hal itu ia sampaikan sesuai meninjau pembagian BLSM di Kantor-kantor Pos tempat pencairan BLSM. Dari pemerintah sendiri membentuk tim pemantau yang akan mengontrol program BLSM. Tim pengawas penyaluran BLSM itu, kata dia, sudah mulai berjalan. Dari tim tersebut, pemerintah telah menerima ribuan pesan singkat elektronik dari warga. SMS-SMS tersebut kemudian akan lebih lanjut akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang akan merespons, dan diarahkan kepada masing-masing kementerian terkait. Kantor pos juga akan menjadi pengawas untuk melaporkan program kompensasi penyesuaian tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Sementara itu, bagi warga yang belum menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), akan ada mekanisme musyawarah di tiap kelurahan. Musyawarah ini sebagai bentuk dari tindak lanjut daftar yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

Dari musyawarah itu, warga bersama pihak kelurahan akan saling berdiskusi untuk mendata siapa saja warga yang berhak menerima ataupun yang tidak berhak menerima KPS untuk mendapatkan BLSM. Dari sisi distribusi KPS, sudah berjalan sangat baik dan akhir bulan ini, seluruh kartu akan dibagikan semuanya Pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Syarat pengambilan BLSM adalah KPS, kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP), pembagian BLSM untuk masing-masing penerima mendapatkan senilai Rp 150 ribu dalam per bulan. “Namun, akan dibagikan setiap dua bulan sekali. Sehingga masyarakat penerima BLSM akan mendapatkan Rp 300 ribu BLSM yang dibagikan pada bulan ini, katanya, adalah untuk jatah Juli dan Agustus. Selanjutnya,

untuk jatah September dan Oktober. Pemerintah memberikan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9,5 triliun. Dana dari kenaikan subsidi yang didapat sebesar Rp 30 Triliun akan dialokasi selain BLSM juga akan dialokasikan untuk membantu biaya pendidikan beasiswa bagi anak yang tidak mampu dari SD-SMU selain itu juga akan dialokasi ke kendaraan angkutan umum.

Program BLSM tentunya sangat menarik dan mengiurkan bagi masyarakat miskin, dengan dana tersebut bisa mengurangi beban hidup yang di alami, akan tetap akan tetapi secara tidak sadar pemerintah sudah memeberikan model kehipun baru bagi masyarakat miskin dengan ketergantungan dari BLSM, jumlah dana yang sangat minim dan jarak yang terlalu jauh, maka pemerintah tidak akan berhasil untuk mengeluarkan permasalahan kemiskinan bagi rakyat miskin melalui program BLSM dengan jumlah dana yang sangat jauh dari yang seharusnya. Secara sadar kenaikan BBM berdampak pada melambungny harga bahan pokok, seharusnya pemerintah bisa lebih kreatif dalam memberikan solusi bagi rakyat miskin, dan pemerintah bisa lebih kreatif, dan membuat inovasi baru, karna melihat dari fenomena sebelumnya melalui program BLT.

Seharunya pemerintah bisa lebih memanfaatkan program BLSM tersebut dengan program yang lebih kreatif seperti:

1. Memberikan dana bergulir melalui lembaga koperasi.
2. Membangun infrastruktur.
3. Memberikan pelatihan melalui BLK untuk meningkatkan SDM.
4. Membangun saran prasaran umum yang bisa dinikmati dalam jangka waktu panjang.
5. Mengembangkan usaha, baik usaha mikro kecil dan menengah.
6. Megembangkan pertanian sehingga tidak tergantung pada impor.
7. Mengadakan padat karya.

Dengan dana sebesar Rp. 30 triliun banyak hal yang bisa dilakukan

oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BLSM hanya bersifat sangat sementara, seharusnya Program BLSM harus analisis lebih jauh, sehingga manfaatnya lebih bisa di nikmati dalam jangka waktu yang lama, melalui kerjasama dengan koperasi dengan memberikan pinjaman modal secara bergulir dan tentunya akan lebih besar, maka masyarakat tentunya akan lebih bisa memanfaatkan dana tersebut untuk membuat usaha yang lebih besar dengan demikian sedikit demi sedikit pemerintah akan bisa mengeluarkan masyarakat dari jeratan lingkaran setan kemiskinan.<sup>16</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi masyarakat, akibat kenaikan BBM akan mempengaruhi kenaikan harga pada setiap sektor, termasuk kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM tidak hanya pada zaman presiden Jokowi saja, namun sejak awal kemerdekaan RI., yaitu:<sup>17</sup>

1. Ir. Soekarno

Sang proklamator menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967, tercatat selama kepemimpinan beliau sebagai Presiden telah melakukan kebijakan menaikkan harga BBM sebanyak 12 kali ( sumber data dihimpun dari kementerian ESDM ). Meski tidak ada data pasti tentang nominal dan waktu kenaikannya, namun pada dokumen pada biro perancang negara tahun 1967 menyebutkan bahwa kenaikan yang terjadi pada masa itu adalah untuk membantu pemerintah dalam membangun sektor pendidikan, perumahan dan kesehatan.

2. Jendral Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto

Menjabat sebagai Kepala Negara terhitung sejak 12 Maret 1967

---

16. Nas Suhey, “Analisis Kebijakan Program Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM)” *Artikel*, 2013, h. 5

17. Ismail, “Sejarah Kenaikan Harga BBM Setiap Kepala Negara Republik Indonesia”, *Artikel*, 2014. 1-3

sampai 21 Mei 1998, selama 31 tahun beliau menjabat sebagai Presiden telah terjadi 18 kali kenaikan harga BBM ( menurut sumber data kementerian ESDM ) adapun pada tahun 1991, Soeharto menaikkan harga BBM yang semula Rp 150 menjadi Rp 550 per liter. Selang Dua tahun kemudian tahun 8 Januari 1993, Soeharto kembali menaikkan harga BBM dari Rp 550 menjadi Rp 700 per liter. Sampai pada akhirnya saat krisis ekonomi menghantam Indonesia, harga BBM kembali naik menjadi Rp 1.200 per liter pada 5 Mei 1998, dengan rincian;

- » Premium: Rp700 menjadi Rp1.200
- » Solar: Rp 380 menjadi Rp 600
- » Minyak tanah: Rp 280 menjadi Rp 350

### 3. B.J Habibie

Menjabat Kepala negara selama 18 bulan terhitung sejak 21 Mei 1998- 20 Oktober 1999, tidak ada data yang menyebutkan bahwa beliau pernah melakukan kebijakan dalam menaikkan harga BBM. Selama masa kepemimpinannya, B.J Habibie tidak ada kenaikan tetapi justru menurunkan harga BBM dari Rp 1.200 menjadi Rp 1.000 per liter.

### 4. Abdurrahman Wahid

Lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, menjabat sebagai Presiden dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun ( 20 Oktober 1999- 23 Juli 2001 ) tercatat telah 1 kali melakukan kebijakan dalam menaikkan harga BBM. April 2000 di masa-masa awal kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, harga BBM diturunkan menjadi Rp 600 per liter. Tidak berselang lama pada Oktober 2000, harga BBM dinaikkan menjadi Rp 1.150 per liter. Pada Juni 2001, Gus Dur kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp 1.450 per liter. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 Oktober 2000
    - » Premium : Rp 1.000 menjadi Rp 1.150
    - » Solar : Rp 550 menjadi Rp 600
    - » Minyak tanah : Rp 280 menjadi Rp 350
  - b. 16 Juni 2001
    - » Premium : Rp 1.150 menjadi Rp 1.450
    - » Solar : Rp 600 menjadi Rp 900
    - » Minyak tanah : Rp 350 menjadi Rp 400
5. Megawati Soekarnoputri  
Putri sang proklamator menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia selama 3 tahun dan 3 bulan ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 ) Melanjutkan era kepemimpinan Gus Dur yang lengser yang sebelumnya Megawati adalah Wakil Presiden semasa era Presiden Abdurahman Wahid, tercatat Mega telah melakukan kebijakan menaikkan harga BBM, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 Maret 2002
    - » Premium : Rp1.450 menjadi Rp1.550
    - » Solar : Rp900 menjadi Rp1.150
    - » Minyak tanah : Rp400
  - b. 1 April 2002
    - » Premium : Rp1.550 menjadi Rp1.600
    - » Solar : Rp1.150 menjadi Rp1.240
    - » Minyak tanah : Rp1.270 menjadi Rp1.310
  - c. 3 Mei 2002
    - » Premium : Rp1.600 menjadi Rp1.750
    - » Solar : Rp1.240 menjadi Rp1.390

- » Minyak tanah : Rp1.310 menjadi Rp1.410
- d. 1 Januari 2003
  - » Premium : Rp1.750 menjadi Rp1.810
  - » Solar : Rp1.390 menjadi Rp1.890
  - » Minyak tanah : Rp1.410
- 6. Susilo Bambang Yudhoyono

Menjabat Presiden Republik Indonesia selama 2 periode (10 tahun), beliau merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat. Tercatat pada masa pemerintahannya terhitung sejak 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014, telah melakukan kebijakan dalam menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali, antara lain :

  - a. 1 Maret 2005
    - » Premium : Rp1.810 menjadi Rp2.400
    - » Solar : Rp1.890 menjadi Rp2.100
    - » Minyak tanah : Rp700
  - b. 1 Oktober 2005
    - » Premium : Rp2.400 menjadi Rp4.500
    - » Solar : Rp2.100 menjadi Rp4.300
    - » Minyak tanah : Rp700 menjadi Rp2.000
  - c. 23 Mei 2008
    - » Premium : Rp4.500 menjadi Rp6.000
    - » Solar : Rp4.300 menjadi Rp5.500
    - » Minyak tanah : Rp2.000 menjadi Rp2.500
  - d. 21 Juli 2013
    - » Premium : Rp6.000 menjadi Rp6.500

## 7. Ir. H. Joko Widodo

Mulai menjabat sebagai Kepala Negara sejak 20 Oktober 2014, sebagai presiden pilihan rakyat di era reformasi setelah Susilo Bambang Yudhoyono. Belum genap sebulan dalam memimpin pemerintahan, akibat anggaran negara yang tak sehat, serta tingginya anggaran alokasi subsidi BBM sementara harga minyak dunia turun tetapi beliau mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, pada Senin (17 November 2014), Presiden Jokowi menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter. Mulai Selasa (18 November 2014), harga Premium naik dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Harga Solar juga naik dari semula Rp 5.500 per liter menjadi Rp 7.500 per liter.

Tetapi kemudian Pemerintah secara efektif kembali menurunkan harga dalam dua gelombang. Pertama pada tanggal 1 Januari 2015 dari semula premium seharga Rp. 8.500,- menjadi Rp. 7.500,- dan solar dari Rp. 7.500,- menjadi Rp. 7.250,-. Tidak lama berselang, pemerintah kembali menurunkan harga BBM menjadi Rp. 6.600,- untuk premium dan Rp. 6.400,- untuk solar.

Karena semakin melemahnya nilai tukar Rupiah akan US Dolar maka pemerintahpun kembali mengambil kebijakan yang diumumkan melalui Kementerian ESDM demi menjaga kesetabilan perekonomian nasional maka tanggal 28 Maret 2015 harga BBM kembali dinaikan menjadi ; Premium semula Rp. 6.600 menjadi Rp. 7.300, solar Rp. 6.400 menjadi Rp. 6.900 dan harga minyak tanah Rp. 2.500.

Sumber data dari kementerian ESDM menyebutkan pernah terjadi penurunan harga BBM sebanyak 6 kali selama periode 1986-November 2014). Pada tahun 1986, Soeharto adalah presiden pertama yang telah melakukan penurunan harga BBM. Sempat

menurunkan harga solar 17,4 % tetapi saat badai krisis moneter melanda pada tahun 1998 kembali menurunkan harga ( bensin 16,7 %, solar 8,3%, dan 20% untuk minyak tanah ). Serta pada masa pemerintahan Megawati terjadi penurunan harga solar yang semula Rp. 1890 perliter menjadi Rp. 1650 perliter. Sementara pada masa pemerintahan SBY penurunan harga BBM terjadi 3 kali, yaitu pada Desember 2008 sebesar Rp. 500 serta 2 kali pada tahun 2009 dengan nominal masing masing Rp. 500.

## **B. Dampak Positif dan Negatif Dana BLSM**

Dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang dikucurkan pemerintah kepada keluarga miskin sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM tentu ada dampak positif dan negatifnya. Berikut ini dapat dipaparkan, yaitu:

### **1. Dampak Positif**

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan BLSM dari bentuk kompensasi harga BBM, yang bertujuan agar dapat membantu ekonomi menengah kebawahnya yang diperoleh dari hasil data yang lama berjumlah 15,5 Juta Rumah Tangga Miskin, tentu saja masyarakat ada yang setuju maupun tidak setuju akan adanya program BLSM tersebut. Beberapa ahli yang berpendapat bahwa BLSM dari perspektif yang berbeda. Para ahli yang pro atau yang setuju terhadap kebijakan BLSM atau dilihat dari manfaat BLSM, bahwa bantuan tersebut memiliki dampak positif antara lain:<sup>18</sup>

- a. Mendorong pengembangan modal manusia, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas pekerja;

---

18. Aprian Jaelani, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM” Artikel, Tahun 2014



- b. Memungkinkan kelompok miskin melindungi dirinya dan asetnya, bahkan mempertahankan pendapatan jangka Panjangnya, seperti:
  - 1) Mengurangi risiko sosial
  - 2) Memerangi diskriminasi dan membuka potensi ekonomi (bias gender dalam pendidikan)
  - 3) Mendukung partisipasi kelompok miskin dalam pasar tenaga kerja karena pencarian kerja seringkali mahal dan berisiko
- c. Menstimulasi permintaan terhadap barang dan jasa lokal
- d. Menciptakan manfaat bagi kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan karena reformasi ekonomi, seperti kompensasi bagi kelompok miskin dari pengurangan harga BBM.

Program BLSM yang dilakukan pemerintah adalah untuk membatasi konsumsi BBM di tanah air, agar tidak terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada akhirnya akan menyebabkan membengkaknya beban subsidi pemerintah. Dimana langkah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini tentu saja akan mendapatkan pro dan kontra di masyarakat, karena justru hal ini akan semakin membebani dan mempersulit masyarakat yang hidup di kalangan menengah ke bawah disaat kemiskinan di negeri ini masih belum bisa diatasi. Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLSM merupakan program pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam 00.00. Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 untuk jenis Bensin dan 4.500 menjadi 5.500 untuk jenis solar. Kenaikan tersebut sangat dirasakan dampaknya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan tersebut didasari atas beberapa faktor, antara lain karena volume BBM subsidi semakin meningkat serta membengkaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) akibat besarnya anggaran untuk BBM bersubsidi. Untuk itu pemerintah telah memperkuat dana untuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial sebesar Rp12,5 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2013, hal ini sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dana sebesar Rp12,5 triliun tersebut, digunakan sebagai subsidi beras, untuk keluarga miskin (raskin) sebesar Rp 4,3 triliun, Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp700 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk program kompensasi khusus berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun dan penambahan dana untuk program infrastruktur dasar irigasi dan air bersih Rp 6 triliun.

Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. BLSM diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditandai dengan Kartu Perlindungan Sosial. Pemerintah mengucurkan dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sebesar Rp150.000 per kepala keluarga. Dengan adanya BLSM ini diharapkan dapat sedikit mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemerintah sangat serius dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai ini, hal tersebut terlihat dari intruksi langsung Presiden SBY kepada para kabinetnya untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri dan para menteri terkait agar memantau langsung ke lapangan, jalannya pembagian BLSM agar tepat sasaran.<sup>19</sup>

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) akan sangat membantu masyarakat kurang mampu

---

19. Amri Arrusdiprogram, "Blsm yang Menuai Pro Kontrauniversitas", *Makalah*, Jenderal Soedirman, Tahun 2014, h 4.

yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. “Berdasarkan pengalaman di 2005 dan 2008, uang itu justru membantu pemenuhan kebutuhan pokok. Justru itu bukan sesuatu yang negatif”.

Armida mengatakan pemerintah akan terus memberikan sosialisasi terkait pemanfaatan BLSM, karena pemberian kompensasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menekan tingkat kemiskinan dan bukan bagian dari pencitraan politik. “Kalau sudah dijelaskan lebih detail, saya rasa akan paham semuanya dan tidak usah dikhawatirkan dampak yang seakan-akan ini politik, padahal tidak,” katanya. Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM akan dirasakan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah paling tidak selama lima bulan, dan dalam jangka waktu itu pemerintah memberikan BLSM. “Bantuan ini akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat miskin dalam menjaga daya beli dan tingkat konsumsinya,” kata Armida.

Pemerintah telah memperkuat dana untuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial sebesar Rp12,5 triliun, sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Alokasi sebesar Rp12,5 triliun tersebut, digunakan untuk subsidi beras untuk keluarga miskin (raskin) sebesar Rp4,3 triliun, Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp0,7 triliun. Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana untuk program kompensasi khusus berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp11,6 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran selama lima bulan dan penambahan dana untuk program infrastruktur dasar irigasi dan air bersih Rp 6 triliun.

Mekanisme penyaluran BLSM tersebut dilakukan di kantor pos seluruh Indonesia dan akan diberikan sebesar Rp150.000 per bulan selama lima bulan setelah kenaikan harga premium dan solar berlaku. Pemberian BLSM tersebut akan dilakukan dua kali, pada Juli sebesar Rp450.000

per rumah tangga sasaran dan pada September disalurkan sebanyak Rp300.000 per rumah tangga sasaran. Semua penyaluran program kompensasi tersebut dilakukan menggunakan kartu perlindungan sosial yang dicetak pemerintah, kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan status sosial ekonomi terendah dalam basis data terpadu. Pendistribusian kartu dan penyaluran bantuan ke masyarakat akan melibatkan koordinasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kepala desa, pendamping sosial dan aparat terkait lainnya di daerah.<sup>20</sup>

BLSM diluncurkan oleh pemerintah mulai 22 Juni 2013 dan diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan besaran Rp 150.000,- per bulan selama empat bulan. Tujuan program BLSM ini, antara lain: 1). Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 2). Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 3). Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.<sup>21</sup>

Program BLSM ini sudah lancar diimplementasikan secara makronya. Seperti Lembaga Penelitian SMERU bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaksanakan pemantauan cepat terhadap pelaksanaan BLSM penyaluran pertama. Akan tetapi untuk mendapatkan bantuan tersebut masyarakat tentunya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diberikan pemerintah. Pemantauan kualitatif ini dilakukan di empat kecamatan yang terdapat di Kota Administrasi Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Karawang, dan Kota Bandung pada minggu ke empat Juli 2013. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa BLSM telah terlaksana dengan lancar tanpa mengalami kendala dan konflik sosial yang berarti. Angka *inclusion error* yang sangat rendah menunjukkan bahwa program

20. Satyagraha, Editor; Ruslan Burhani “BLSM dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu”, *Artikel*, Tahun 2013.

21 Anonymous, “Bantuan Langsung Sementara Masyarakat” *Artikel*, Biro Humas Setda Prov. Sumbar, 2013.

ini menyasar target yang tepat, namun angka *exclusion error* masih tinggi. Rumah tangga menerima dana bantuan secara penuh tanpa potongan, melalui mekanisme pencairan yang umumnya mudah. Akan tetapi, pelaksanaan program yang cenderung mendadak, membuat informasi tentang tata kelola program kepada publik, khususnya pemerintah daerah, terbatas dan terlambat.

Dari hasil evaluasi kebijakan BLSM ini Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mencatat sebesar 88,40 persen atau 13.729.996 rumah tangga sasaran sudah bisa menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sejak program itu diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2013. Data tersebut tercatat hingga 25 Juli dan jumlah penyerapan tersebut sudah cukup tinggi dan dibagikan di seluruh provinsi,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Hal itu diinformasikan saat dirinya menyampaikan evaluasi pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (BLSM) dan program perlindungan sosial lain sebagai bagian kompensasi kenaikan harga BBM. Dikatakannya, sementara Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang belum terserap sebesar 11,60 persen atau 1.800.901 rumah tangga sasaran (RTS). Karena disebabkan masyarakat masih belum mengambil atau juga mereka sudah merasa kaya sehingga tidak memerlukan BLSM. Untuk BLSM yang belum terserap, pemerintah daerah masih diberi kesempatan untuk memperbaharui data RTS yang berhak menerima hingga akhir Agustus 2013. “Jika nanti tidak terserap juga maka dananya harus dikembalikan lagi ke negara,” kata Bambang. Diakuinya peluncuran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diikuti pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menjadi sorotan utama masyarakat. Meskipun pelaksanaannya jauh lebih baik dibanding pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 dan 2008, tidak dapat dipungkiri masih terdapat sejumlah masalah di

lapangan, terutama terkait ketepatan sasaran.

Esensi ketepatan sasaran pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (untuk selanjutnya disingkat: KPS) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh dana BLSM dan pembagian BLSM adalah memastikan bahwa KPS yang diterima oleh yang berhak. Jika tidak sampai kepada yang berhak maka KPS harus dikembalikan kepada aparat desa/kelurahan dan selanjutnya dilakukan mekanisme musyawarah desa/kelurahan untuk menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Nomor 541/3150/SJ sudah menjelaskan peran pemerintah Daerah mulai dari gubernur, bupati/walikota, camat hingga lurah/kepala desa dan pendistribusian KPS termasuk mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima KPS/BLSM.<sup>22</sup>

## 2. Dampak Negatif

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan Harga BBM dengan dalih penghematan APBN, pemerintah tega menjadikan rakyat sebagai korban. Betapa tidak, sebelum kebijakan itu disahkan, harga-harga kebutuhan pokok sudah lebih dulu naik. Sebagai ‘pelipur lara’, pemerintah mengucurkan dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sebesar Rp150.000 per kepala keluarga. Pemerintah berharap, dampak naiknya harga BBM bisa diredam dengan BLSM, Raskin, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan dan program infrastruktur dasar khususnya di pedesaan.

Ternyata, BLSM bukannya memberikan solusi, malah menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu: *Pertama*, Penyalurannya dinilai tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran diduga karena sistem data yang kurang akurat. Banyak penerima yang ternyata sudah meninggal,

22. Aprian Jaelani, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM” Artikel, Tahun 2014

atau bahkan tidak terkategori miskin. Sehingga tidak tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan yang benar-benar miskin.

*Kedua*, Kebijakan BLSM bernuansa politis. Kebijakan mengucurkannya langsung kepada masyarakat sangat rentan ditunggangi kepentingan politik tertentu. Bahkan bisa jadi sebagai bentuk 'suap' kepada rakyat untuk mendapatkan citra yang positif. Apalagi dalam menghadapi pemilu 2014.

*Ketiga*, BLSM tak memberikan solusi, tidak bisa mencegah inflasi. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menjelaskan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan meredam dampak inflasi, yang bisa muncul dari kenaikan harga BBM.

*Keempat*, berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat meski skalanya terbatas. Salah satunya seperti yang terjadi di Purewkerto, Anggota DPRD Banyumas Yoga Sugama mengungkapkan konflik sosial mulai terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLSM. Kondisi desa yang tadinya adem ayem, sekarang mulai menghangat, karena banyaknya protes warga yang tidak memperoleh BLSM. Pemerintah seharusnya belajar dari kegagalan program BLT yang pernah dikocorkan beberapa tahun lalu.

Banyak pihak menilai bahwa sistem bantuan langsung sangat tidak efektif dan tidak mendidik dalam memecahkan masalah kemiskinan. BLSM dengan sistem yang sama, akan mendulang hasil yang sama. Lihat saja, besaran BLSM pun minim dibandingkan naiknya biaya yang harus ditanggung. Begitu harga BBM naik rata-rata 33,3 % (premium naik 44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos transportasi pun naik rata-rata 20 – 35 persen. Naiknya ongkos transportasi dibarengi oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. BLSM kiranya lebih pantas

disebut sebagai Bantuan Langsung Sengsarakan Masyarakat. Lebih dari itu, meski harga BBM dinaikkan namun subsidi tetap saja dalam angka Rp 120 triliun - akibat konsumsi meningkat. Lalu ditambah BLSM menjadi sekitaran Rp 180 triliun. Rupanya kebijakan member subsidi hanyalah akal-akalan. Kenaikan harga BBM tidak menghapus subsidi. Peluang pencurian dan korupsi serta penyelundupan BBM menjadi hal yang dapat dilestarikan dan dilanjutkan. Harus mempertanyakan, sebenarnya ada apa dibalik kebijakan ini? Benarkah kebijakan BLSM ini adalah kebijakan yang pro rakyat? Ataukah kebijakan yang sebenarnya tidak pro rakyat bahkan mengandung kebohongan publik?. Dengan riuhnya kontraversi BBM dan BLSM, kebanyakan orang lupa bahwa pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan kewajiban Pemerintah sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. BLSM adalah hak masyarakat, bukan kebaikan hati atau sogokan politik, tapi tanggung-jawab Pemerintah (pasal 4). Kewajiban pemerintah untuk melakukan Catur Program Kesejahteraan Sosial, yakni rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial (pasal 6). Jadi, kebijakan semacam ini seharusnya bukan kebijakan pelipur lara, tapi merupakan kebijakan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya.<sup>23</sup>

Program BLSM terkesan untuk mencari simpati masyarakat menjelang pemilu tahun 2014. Masyarakat mengharapkan jangan sampai bantuan tersebut di politisir demi keuntungan suatu kelompok tertentu. Pemerintah seharusnya belajar dari kegagalan program BLT yang pernah dikocorkan beberapa tahun lalu. Banyak pihak menilai bahwa sistem bantuan langsung sangat tidak efektif dan tidak mendidik dalam memecahkan masalah kemiskinan. BLSM dengan sistem yang sama, akan mendulang hasil yang sama. Lihat saja, besaran BLSM pun minim

---

23. Aprian Jaelani, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM” Artikel, Tahun 2014



dibandingkan naiknya biaya yang harus ditanggung. Begitu harga BBM naik rata-rata 33,3 % (premium naik 44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos transportasi pun naik rata-rata 20 – 35 persen. Naiknya ongkos transportasi dibarengi oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. BLSM kiranya lebih pantas disebut sebagai Bantuan Langsung Sengsarakan Masyarakat. Lebih dari itu, meski harga BBM dinaikkan namun subsidi tetap saja dalam angka Rp 120 triliun – akibat konsumsi meningkat. Lalu ditambah BLSM menjadi sekitaran Rp 180 triliun. Dengan riuhnya kontroversi BBM dan BLSM, kebanyakan orang lupa bahwa pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan kewajiban Pemerintah sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. BLSM adalah hak masyarakat, bukan kebaikan hati atau sogokan politik, tapi tanggung-jawab Pemerintah (pasal 4). Kewajiban pemerintah untuk melakukan Catur Program Kesejahteraan Sosial, yakni rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial (pasal 6). Jadi, kebijakan semacam ini seharusnya bukan kebijakan pelipur lara, tapi merupakan kebijakan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya.<sup>24</sup>

Selama ini, pemerintah selalu mengklaim bahwa kebijakannya disetujui oleh rakyat, karena para wakil rakyat di DPRMPR mnyetujuinya. Padahal kebijakan kenaikan harga BBM itu bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang tidak ingin harga BBM dinaikkan. Hal itu terungkap dalam hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1200 responden yang dilakukan pada 18 Juni, selepas rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 di DPR. Hasil survey itu menunjukkan, 79,21 persen tak setuju kenaikan harga BBM. Sebanyak 19,1 persen tidak tahu dan hanya 1,69 persen yang setuju kenaikan harga BBM (Republika, 24/6). Tapi tetap saja, pemerintah mengklaim bahwa kenaikan harga

---

24. Satyagraha, Editor; Ruslan Burhani “BLSM dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu”, *Artikel*, Tahun 2013.

BBM itu adalah demi rakyat, sebab disetujui oleh para wakil rakyat.

Pemerintah pun lebih sayang kepada para kapitalis asing daripada kepada rakyat. Pemerintah lebih senang membayar hutang kepada asing daripada memberikan kesejahteraan epada rakyatnya. Ternyata hal ini memang sesuai dengan skenario Memorandum of Economic dan Financial Policies atau LoI dengan IMF tahun 2000. Juga untuk memenuhi apa yang disyaratkan bagi pemberian utang Bank Dunia seperti tercantum dalam Indonesia Country Assistance Strategy tahun 2001.

Semua itu agar sempurna liberalisasi migas untuk kepentingan bisnis asing. Hal itu ditegaskan oleh Purnomo Yusgiantoro, menteri ESDM kala itu, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk. Jelaslah bahwa bahwa keputusan kenaikan harga BBM berikut kebijakan BLSM tak sesuai aspirasi rakyat, tapi sesuai dengan aspirasi para politisi partai pengusungnya. hal ini akibat sistem demokrasi dan kapitalisme yang melahirkan kebijakan penguasa dan politisi tidak demi rakyat dan mengabaikan aspirasi rakyat. Kebijakan lebih demi kepentingan elit, pemilik modal, dan kapitalis asing.

Kebijakan BLSM ini berpendapat Bagi kelompok yang kontra terhadap program BLSM, secara filosofis BLSM telah menempatkan masyarakat sebagai pengemis dan tidak menempatkan masyarakat secara bermartabat atau berdaya, bahkan masyarakat harus menanggung kenaikan harga-harga di sektor lainnya, misalnya biaya transportasi, sembilan kebutuhan pokok. Asumsi pemerintah melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menyehatkan anggaran adalah tidak tepat, sebenarnya cara penghematan lain dapat dilakukan pemerintah,

misalnya pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur, yang dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Selain itu BLSM juga di prediksi sulit untuk mencapai tujuan awalnya. BLSM dapat menjadi benteng inflasi bagi masyarakat miskin jika BLSM tersebut dibelanjakan secara produktif.<sup>25</sup>

Dampak dari kenaikan harga BBM itu, dipastikan harga pangan akan naik, sehingga beban kehidupan masyarakat akan semakin berat. Kenaikan harga BBM dipastikan akan berpengaruh pada harga sembako. Dengan demikian, daya beli masyarakat akan menurun. Padahal, sembako adalah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi setiap hari. “Kalau BBM sudah naik, pasti beras naik, minyak goreng naik, gula naik, dan barang-barang lainnya juga naik,”. kenaikan harga BBM yang akan dilakukan karena seolah-olah pemerintah tak punya opsi lain. Padahal, jika pemerintah mau serius, masih ada opsi lain yang bisa ditempuh agar harga BBM tidak terus naik. Kesimpulannya, manajemen energi Indonesia memang butuh banyak pembenahan. Opsi yang seharusnya dilakukan pemerintah sejak dulu, adalah mengolah minyak hasil dalam negeri sendiri, terutama untuk minyak tanah dan premium. Sudah saatnya mengolah minyak tanah sendiri. Indonesia harus punya banyak mesin pengolahan minyak. APBN kita yang sebesar 1.435 Triliun cukup untuk itu. Ini untuk kepentingan jangka panjang.

Sejumlah kebutuhan pokok khususnya pangan di berbagai daerah sejak ditundanya kenaikan harga BBM pekan ini mulai menunjukkan kenaikan. Kebutuhan pangan, seperti cabai, beras, bawang merah dan putih, daging dan telur ayam, gula pasir, naik sekitar 30-75% bahkan bisa mencapai dua kali lipat dengan kalau dilihat dari faktor musim dan yang meningkat tajam adalah cabai keriting dan cabai merah dengan lonjakan harga hingga mencapai dua kali lipat. Praktek nya dalam ilmu-

25. Aprian Jaelani, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM” Artikel, 2014

ilmu Ekonomi, harga merupakan salah satu faktor utama meskipun bukan faktor satu-satunya yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga menjadi faktor utama pilihan pembeli semakin terlihat di antara kelompok-kelompok miskin. Namun, harga bukan menjadi faktor utama pilihan pembeli bagi masyarakat yang mampu/kaya. Namun, teori ini hanya berlaku bagi produk-produk di luar kebutuhan bahan pangan. Untuk kebutuhan bahan pangan yang termasuk kebutuhan primer, akan memiliki dampak garis lurus dengan turunnya pembelian pada kebutuhan sekunder dan pertumbuhan ekonomi.

Situasi pasar dan kondisi pasar yang tidak stabil terlihat beberapa gambaran, yaitu:

*Pertama*, Jika harga barang primer meningkat, sementara pendapatan tetap, akan menyebabkan harga barang sekunder pun akan meningkat. *Kedua*, Pembelian terhadap barang sekunder pun akan menurun. *Ketiga*, Perubahan harga barang konsumsi menyebabkan tingkat substitusi (pergantian) terhadap barang konsumsi akan berubah pula. Dari tiga gambaran yang sudah dijelaskan, dapat dilihat kasusnya di masyarakat, di mana pada saat cabai rawit harganya meningkat maka pedagang makanan yang banyak menggunakan cabai akan menggantikannya dengan cabai oplosan atau mengurangi kadar cabainya.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas, maka harga kebutuhan primer harus dikendalikan oleh pemerintah. Jika tidak, maka akan terjadi kelesuan ekonomi negara, yang berimbas pada penurunan daya saing produk lokal dan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Keputusan sidang paripurna DPR yang menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ternyata tidak membuat harga bahan kebutuhan bahan mentah pangan terkoreksi ke harga normal. Harga terus melambung tinggi menunjukkan pemerintah tidak memiliki sistem yang jelas tentang tata niaga kebutuhan pokok. "Harga kebutuhan pokok

yang tetap melambung tinggi menunjukkan pemerintah tidak pernah serius dalam menata sistem perekonomian nasional, salah satunya terkait tata niaga kebutuhan pokok.

Kenaikan komoditas pangan pokok terjadi di berbagai pasar di Indonesia, salah satunya di Pasar Depok Jaya, cabai rawit justru terus mengalami kenaikan. Pada Kamis 29 Maret harga cabai rawit sebesar Rp50 ribu per kilogram. Kini harga cabai rawit tersebut justru semakin naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih dari Rp12 ribu per kg menjadi Rp18 ribu per kg. Harga gula putih mengalami kenaikan sejak tiga minggu yang lalu menjadi Rp12 ribu per kg. Begitu juga dengan harga minyak goreng yang sebelumnya naik menjadi Rp11 ribu per kg. Sedangkan di Pasar Anyar Bogor, harga daging ayam sejak beberapa hari terakhir, harganya naik menjadi Rp27 ribu per kg dari biasanya Rp25 ribu. Hal serupa terjadi pada daging sapi, yakni Rp70 ribu per kg dari Rp65 ribu.

Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi alasan bagi pemerintah dalam mendorong perubahan APBN-P 2012 untuk subsidi BBM. Kemudian, kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini bukan hanya karena spekulasi atau adanya penimbunan barang.

Di sisi lain murni karena adanya ketidakpastian harga BBM. Sehingga banyak distributor yang menunda belanja pasokan sambil menanti keputusan naik atau tidaknya harga BBM. Dua situasi diatas menunjukkan bahwa sistem kita sangat rapuh, sehingga mudah sekali dipengaruhi faktor eksternal. Dampak yang dirasakan dari kenaikan harga bahan paku pangan. Lonjakan harga pangan sepanjang Maret 2012 telah menyurutkan rasa optimisme masyarakat terhadap perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, konsumen melihat tiga bulan mendatang harga barang bakal terus melambung tinggi.

Survei menggambarkan perilaku konsumen sudah pesimistis

sejak enam bulan silam. Kini rasa pesimistis itu sudah menyentuh dasar yakni di angka 84,8. Penyumbang rasa pesimistis adalah menghadapi situasi sekarang. Indeks situasi sekarang melorot ke level 70,2 pada Maret, padahal Februari masih di posisi 77,2. Tak hanya itu, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga terus merosot. Februari lalu, angkanya di 80,3. Maret 2012 berada di 76,1. Menanggapi hasil survei ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui kenaikan harga barang menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Harga bahan pangan naik akibat rencana kenaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 1 April 2012. Celaknya, kendati BBM urung naik, harga barang telanjur melambung.

Karena itu kini pemerintah tengah berupaya mengembalikan kepercayaan konsumen. “Ini kan sesuatu yang memang sedang kami tangani. Rencana kenaikan harga BBM, walau batal naik, membuat ekspektasi inflasi. Ini harus dilawan”. Frustrasi meningkat, catatan lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah rasa frustrasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini meningkat. Survei menunjukkan masyarakat makin pesimistis bisa mendapatkan pekerjaan akibat minimnya jumlah lapangan kerja. Masyarakat melihat penghasilannya akan merosot akibat kenaikan harga BBM yang tercermin pada penurunan indeks penghasilan konsumen. Kini pemerintah punya tugas tambahan selain menjaga APBN-P; memulihkan kepercayaan dan optimisme masyarakat dengan aksi nyata.<sup>26</sup> Sebab dengan dana BLSM yang dikeluarkan pemerintah belum bisa berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, karena:<sup>27</sup>

a. BLSM merupakan solusi yang tidak berdampak jangka panjang

26. Aprian Jaelani, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM” Artikel, 2014

27. Eko Riyanto dan Solikhin, “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Menggunakan Metode Profile Matching Berbasis Web”, Artikel, STMIK Himsya, 2013, h 3.

- hanya saja bantuan sesaat;
- b. Masih kurangnya wawasan masyarakat akan mekanisme penyaluran BLSM secara teknis di lapangannya;
  - c. Beberapa kategori masyarakat miskin atau tidak mampu masih belum terlalu jelas;
  - d. BLSM sebagai alat politik untuk mencari perhatian pada masyarakat;
  - e. Banyaknya masyarakat yang menerima BLSM yang tidak produktif dan hanya mengandalkan bantuan dari masyarakat saja;

Solusi yang dapat ditawarkan untuk meredam faktor ekspektasi positif ini mungkin bisa diharapkan dari operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah di beberapa titik konsumsi di seluruh Indonesia. Pemerintah berencana akan melaksanakan pasar murah serentak di 50 titik konsumsi atau kota besar di seluruh Indonesia. Operasi pasar seperti ini dapat bermanfaat untuk mengendalikan faktor psikologis pasar yang dipicu oleh "ekspektasi positif" seperti disebutkan di atas, agar kenaikan harga pangan tidak terjadi secara permanen.

Pada saat operasi pasar murah, pemerintah dapat menyampaikan pesan kepada spekulan tentang keseriusan upayanya dalam menjaga stabilisasi harga pangan pokok. Sasaran pasar murah dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat umum dan konsumen di kota besar, yang telah demikian berat harus menanggung kenaikan harga pangan secara bersamaan. Kelompok kedua adalah masyarakat miskin yang hidup di kantong-kantong kemiskinan di perkotaan (dan perdesaan). Sasaran pasar murah bagi kelompok kedua ini hanya akan efektif apabila dilaksanakan secara terpadu dengan tingkatan pemerintah yang paling bawah, dalam hal ini Kepala Desa, beserta aparat Rukun Warga dan Rukun Tetangga, yang seharusnya memiliki informasi lengkap tentang status warga miskin di wilayah kerjanya.

Faktor kedua pemicu kenaikan harga pangan adalah kinerja pasokan

yang sedikit terganggu, walau pemerintah berkali-kali membantah bahwa pasokan pangan aman dan terkendali. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem produksi dan sistem distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana dan prasarana transportasi banyak rusak. Beberapa media nasional dan daerah melaporkan rusaknya jalan di beberapa ruas di Pantai Utara Jawa, buruknya jalan Lintas Tengah dan Lintas Timur di Sumatera, sebagai dua poros utama jalur distribusi pangan.

Sebagaimana diketahui, aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatra merupakan 84 persen penyumbang terhadap kinerja ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Betapa besar dan dahsyatnya apabila sarana infrastruktur di Jawa dan Sumatra terganggu. Dampak buruk yang ditimbulkannya tidak hanya ditanggung konsumen di perkotaan, tetapi juga harus ditanggung oleh petani di pelosok pedesaan. Kenaikan harga pangan kali ini sedikit sekali yang dapat dinikmati petani karena persentase kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan harga di tingkat produsen.

Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi faktor produksi dan distribusi ini adalah peningkatan produksi pangan dan pertanian yang diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur vital, terutama jalan negara sampai jalan desa. Peningkatan produktivitas pangan (per satuan lahan dan per satuan tenaga kerja) wajib menjadi acuan strategi kebijakan, karena Indonesia tidak dapat mengandalkan cara-cara konvensional dan sistem budidaya yang telah diadopsi selama 40 dekade terakhir.

Pada aspek distribusi, selain upaya pemberantasan atau pengurangan pungutan resmi dan tidak resmi terhadap perdagangan komoditas pangan, perbaikan jaringan jalan dan infrastruktur vital lain menjadi sesuatu yang hampir mutlak. Rencana perbaikan jalan negara,



jalan provinsi, kabupaten, sampai pada jalan desa dan jalan produksi usahatani, wajib segera diwujudkan. Masa-masa mudik menjelang lebaran adalah momentum yang tepat untuk segera merealisasikan tender beberapa proyek infrastruktur yang tertunda karena menunda kepastian pengesahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Kenyataan di lapangan, walaupun APBN-P tersebut telah disahkan, para aparat birokrasi yang terlalu hati-hati masih sering memberikan alasan yang sulit diterima akal sehat untuk tidak segera merealisasikan proyek infrastruktur yang terbengkalai. Misalnya, mereka berargumen masih menunggu kepastian pembiayaan beberapa tahun (*multi-years*) yang akan ditetapkan pada APBN 2011 mendatang. Maksudnya, para pemimpin di tingkat pusat dan daerah wajib memberikan pengarahan kepada staf dan anak-buah agar segera memberikan prioritas perbaikan sekian macam infrastruktur ekonomi sangat vital itu. Tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan harus dibuat.

Faktor ketiga yang memicu kenaikan harga pangan adalah perubahan iklim atau tepatnya musim kemarau basah yang diperkirakan masih akan berlangsung sampai November 2010. Gangguan produksi memang tidak terlihat pada musim panen raya padi April-Mei lalu, walaupun hal itu tidak berarti bahwa kualitas gabah akan lebih baik karena musim panen yang basah akan selalu meningkatkan butir mengapur dan derajat patah yang semakin tinggi. Akibat berikutnya, petani tidak menerima harga jual gabah yang layak, walaupun sebenarnya masih lebih tinggi dibandingkan harga jual gabah tahun-tahun sebelumnya.

Dengan harga faktor produksi yang juga ikut meningkat, maka tingkat keuntungan relatif petani padi di Indonesia juga tidaklah terlalu tinggi. Demikian pula, rendahnya pasokan cabe dan produk hortikultura lain juga ikut memicu eskalasi harga komoditas penting bagi konsumsi

rumah tangga dan industri kuliner Indonesia. Ancaman fenomena bulan basah La Nina masih akan mengganggu dan meningkatkan harga eceran pangan pokok pada siklus panen raya tahun 2011, sehingga Indonesia wajib melakukan analisis penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap perubahan-perubahan yang disebabkan faktor eksternal tersebut.

Analisis serupa juga wajib dilakuka terhadap beberapa komoditas pangan Indonesia yang berasal dari impor, terutama gandum, karena beberapa negara produsen gandum di Eropa Timur mengalami gangguan musim kemarau yang diperkirakan mengurangi produksi dan cadangan gandum dunia secara signifikan.

Solusi yang dapat ditawarkan untuk menanggulangi faktor perubahan iklim ini memang tidak ada yang berdimensi jangka pendek, karena proses adaptasi dan mitigasi memerlukan waktu dan proses penyesuaian yang relatif lama. Namun demikian, strategi penguatan cadangan pangan di tingkat pusat melalui Perum Bulog, serta di daerah melalui divisi regional dan sub-regional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dijadikan langkah penting dalam jangka menengah.

Paling tidak, untuk menjaga tingkat aman dan stabilitas harga pangan yang lebih berkelanjutan, cadangan beras yang dikuasai Bulog harus di atas 1,5 juta ton atau lebih. Cadangan beras pemerintah (CBP) di bawah 1 juta ton bukan angka yang aman dalam mengantisipasi eskalasi harga pangan pokok. Artinya, penanggulangan lonjakan harga pangan ini memerlukan kombinasi solusi jitu pada tingkat keputusan politik dengan presisi tinggi pada tingkat teknis ekonomis. Persoalan pangan dan kebutuhan pokok lain bukan ajang eksperimen pencitraan para pemimpin, tetapi merupakan uji kepatutan dan hati nurani kaum elit di negeri ini yang pantas disebut negarawan dan orang yg memiliki keyakinan.<sup>28</sup>

---

28. Wisnu Sukma Darmawan, Kenaikan Harga Kebutuhan Bahan Baku Pangan” *Makalah*, Universitas Gunadarma 2012

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dasar BBM, secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Meningkatnya harga barang kebutuhan pokok sebagai salah satu akibat langsung dari kenaikan harga dasar BBM, akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Imbas dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga menimbulkan dampak sosial berupa semakin menurun tingkat kesejahteraannya atau menjadi semakin miskin. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net Program*). Program tersebut melalui penambahan nilai bantuan dan *coverage* program rutin yang sudah ada atau yang dikenal saat ini sebagai Percepatan dan Perluasan Program Perlindungan Sosial (P4S), antara lain: Bantuan Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Harapan dengan adanya program BLSM ini, maka Rumah Tangga Sasaran diharapkan masih konsisten untuk melakukan fungsi sosialnya sehingga kondisi kenaikan kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga BBM tidak menjadikannya berpengaruh signifikan dan tetap dapat hidup sejahtera<sup>29</sup>

BLSM diluncurkan oleh pemerintah mulai 22 Juni 2013 dan diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan besaran Rp150.000,- per bulan selama empat bulan. Tahap awal BLSM diberikan dua bulan sekaligus, yaitu Rp 300.000,- di mana akan dibagikan bertahap sampai Juli. Pembagiannya fokus pada dua tempat, yaitu PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintahan. Penyaluran ini didahului dengan mencetak

29. Anonymous, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Artikel*, Biro Humas Setda Prov. Sumbar, 2013.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai bukti pengambilan dana BLSM dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Untuk mendanai BLSM tersebut, alokasi anggarannya mencapai Rp 9,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013.<sup>30</sup>

### **C. Efektifitas Dana BLSM Dalam Menanggulangi Kenaikan Harga**

Efektifitas yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari dua sudut pandang, yaitu; efektifitas sasaran pembagian kepada masyarakat miskin dan efektifitas dalam menanggulangi kenaikan harga, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Efektifitas Sasaran Pembagian Kepada Masyarakat Miskin**

Pada pelaksanaannya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini disinyalir kurang tepat sasaran, di antaranya banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai, sementara orang yang mampu justru mendapatkan. Data yang ada belum dimutakhirkan, sehingga warga yang sudah meninggal dunia masih mendapatkan jatah bantuan tersebut. Di beberapa daerah juga masih ditemukan pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima BLSM. Penyaluran BLSM dinilai masih mengacu kepada data lama sehingga banyak menimbulkan masalah di dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang keberatan dengan penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran ini sehingga ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan bantuan tersebut karena masih ada masyarakat yang layak menerima tapi malah tidak mendapatkan BLSM. Karena pada umumnya penerima BLSM itu pada usia produktif dengan berbagai pernak-pernik perhiasan dan kendaraannya. Penerima BLSM

---

30 Iwan Hermawan, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/1/P3D1/Juli/2013.

itu pasti hanya mau uang BLSM, tapi tidak mau disebut miskin.

Harus diakui program BLSM ini ada yang sudah berjalan dengan sesuai yang di inginkan, mungkin hanya saja kebanyakan berita yang didengar melalui dari masyarakat ini adalah berita mengenai BLSM yang ‘salah sasaran’. Walaupun sebenarnya penyaluran BLSM terkesan seperti dipaksakan padahal pemerintah belum siap, khawatir bukan manfaat yang dirasakan dari BLSM tersebut tapi akan terjadinya konflik horizontal antara masyarakat dan pemerintahan daerah terutama lurah yang akan menjadi sasaran masyarakat.

Sebaiknya pemerintah harus mempersiapkan program tersebut dengan matang sebelum menyalurkannya sehingga tidak menimbulkan konflik akibat penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Program BLSM terkesan untuk mencari simpati masyarakat menjelang pemilu tahun 2014. Masyarakat mengharapkan jangan sampai bantuan tersebut di politisir demi keuntungan suatu kelompok tertentu.

Pemerintah seharusnya belajar dari kegagalan program BLT yang pernah dikocorkan beberapa tahun lalu. Banyak pihak menilai bahwa sistem bantuan langsung sangat tidak efektif dan tidak mendidik dalam memecahkan masalah kemiskinan. BLSM dengan sistem yang sama, akan mendulang hasil yang sama. Lihat saja, besaran BLSM pun minim dibandingkan naiknya biaya yang harus ditanggung. Begitu harga BBM naik rata-rata 33,3 % (premium naik 44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos transportasi pun naik rata-rata 20 – 35 persen. Naiknya ongkos transportasi dibarengi oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. BLSM kiranya lebih pantas disebut sebagai Bantuan Langsung Sengsarakan Masyarakat. Lebih dari itu, meski harga BBM dinaikkan namun subsidi tetap saja dalam angka Rp 120 triliun – akibat konsumsi meningkat. Lalu ditambah BLSM menjadi sekitaran Rp 180 triliun. Dengan riuhnya kontroversi BBM dan BLSM, kebanyakan

orang lupa bahwa pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan kewajiban Pemerintah sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. BLSM adalah hak masyarakat, bukan kebaikan hati atau sogokan politik, tapi tanggung-jawab Pemerintah (pasal 4). Kewajiban pemerintah untuk melakukan Catur Program Kesejahteraan Sosial, yakni rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial (pasal 6). Jadi, kebijakan semacam ini seharusnya bukan kebijakan pelipur lara, tapi merupakan kebijakan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Sehingga BLSM bukannya memberikan solusi, malah menimbulkan permasalahan yang baru.

Pertama, Penyalurannya dinilai tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran diduga karena sistem data yang kurang akurat. Banyak penerima yang ternyata sudah meninggal, atau bahkan tidak terkategori miskin. Sehingga tidak tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan yang benar-benar miskin.

Kedua, Kebijakan BLSM bernuansa politis. Kebijakan mengucurkan dana langsung kepada masyarakat sangat rentan ditunggangi kepentingan politik tertentu. Bahkan bisa jadi sebagai bentuk 'suap' kepada rakyat untuk mendapatkan citra yang positif. Apalagi dalam menghadapi pemilu 2014.

Ketiga, BLSM tak memberikan solusi, tidak bisa mencegah inflasi. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menjelaskan pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan meredam dampak inflasi, yang bisa muncul dari kenaikan harga BBM.

Keempat, berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat meski skalanya terbatas. Salah satunya seperti yang terjadi di Kota Serang, Anggota DPRD Aminudin mengungkapkan konflik sosial mulai terjadi

dalam pelaksanaan penyaluran BLSM. Kondisi desa yang tadinya adem ayem, sekarang mulai menghangat, karena banyaknya protes warga yang tidak memperoleh BLSM.

Selama ini, pemerintah selalu mengklaim bahwa kebijakannya disetujui oleh rakyat, karena para wakil rakyat di DPR MPR meyetujuinya. Padahal kebijakan kenaikan harga BBM itu bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang tidak ingin harga BBM dinaikkan. Hal itu terungkap dalam hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1200 responden yang dilakukan pada 18 Juni, selepas rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 di DPR. Hasil survey itu menunjukkan, 79,21 persen tak setuju kenaikan harga BBM. Sebanyak 19,1 persen tidak tahu dan hanya 1,69 persen yang setuju kenaikan harga BBM.<sup>31</sup> Tapi tetap saja, pemerintah mengklaim bahwa kenaikan harga BBM itu adalah demi rakyat, sebab disetujui oleh para wakil rakyat. Pemerintah pun akhirnya lebih sayang kepada para kapitalis asing daripada kepada rakyat. Pemerintah lebih senang membayar hutang kepada asing daripada memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini akibat sistem demokrasi dan kapitalisme yang melahirkan kebijakan penguasa dan politisi tidak demi rakyat dan mengabaikan aspirasi rakyat. Kebijakan lebih demi kepentingan elit, pemilik modal, dan kapitalis asing. Ternyata hal ini memang sesuai dengan skenario *Memorandum of Economic dan Financial Policies* atau LoI dengan IMF tahun 2000. Juga untuk memenuhi apa yang disyaratkan bagi pemberian utang Bank Dunia seperti tercantum dalam Indonesia *Country Assistance Strategy* tahun 2001. Jadi kebijakan pemerintah sebaiknya mengoreksi pengucuran dana BLSM.

Penyaluran dana BLSM ini karena adanya kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam 00.00. Sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah mengadakan 2 bantuan untuk

---

31. Harian Republika “Pendapat Penyaluran Dana BLSM” 24 Juni 2013.

rakyat Indonesia, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dan Bantuan Siswa Miskin. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Walaupun begitu, BLSM sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun sudah tidak asing lagi bahwa kelanjutan dari bantuan langsung tunai ini tidak tepat sasaran. Sehingga, kenyataannya membuat BLSM merupakan kelanjutan dari BLT. Karena dalam pelaksanaannya, eksekusi daripada BLSM ini menghadapi banyak masalah. Tidak hanya masalah yang datang dari data pemerintah yang kurang valid saja, dari rakyatnya pun juga mendapatkan masalah karena banyak rakyat yang sudah mampu namun ingin sekali mendapatkan bantuan langsung tunai ini dan beberapa kalangan juga menilai BLSM ini tidak tepat, dan juga tidak merata. Dalam perkembangan selanjutnya, dapat dilihat bahwa ruang lingkup BLSM tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya penyaluran untuk rakyat kurang mampu melainkan juga pada hal-hal lain sepanjang kemiskinan masih merajalela.

Pada pertengahan bulan juni ini di tahun 2013, masyarakat Indonesia digemparkan dengan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk membatasi konsumsi BBM di tanah air, agar tidak terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada akhirnya akan menyebabkan membengkaknya beban subsidi pemerintah. Dimana langkah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini tentu saja akan mendapatkan pro dan kontra di masyarakat, karena justru hal ini akan semakin membebani dan mempersulit masyarakat yang hidup di kalangan menengah ke bawah disaat kemiskinan di negeri ini masih belum bisa diatasi. Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLSM adalah program pemberian bantuan



tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam 00.00. Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 untuk jenis Bensin dan 4.500 menjadi 5.500 untuk jenis solar. Kenaikan tersebut sangat dirasakan dampaknya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan tersebut didasari atas beberapa faktor, antara lain karena volume BBM subsidi semakin meningkat serta membengkaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat besarnya anggaran untuk BBM bersubsidi. Untuk itu pemerintah telah memperkuat dana untuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial sebesar Rp12,5 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2013, hal ini sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dana sebesar Rp12,5 triliun tersebut, digunakan sebagai subsidi beras, untuk keluarga miskin (raskin) sebesar Rp 4,3 triliun, Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp700 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk program kompensasi khusus berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun dan penambahan dana untuk program infrastruktur dasar irigasi dan air bersih Rp 6 triliun.

Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. BLSM diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditandai dengan Kartu Perlindungan Sosial. Pemerintah mengucurkan dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sebesar Rp150.000 per kepala keluarga. Dengan adanya BLSM ini diharapkan dapat sedikit mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemerintah sangat serius dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai ini, hal tersebut terlihat dari intruksi

langsung Presiden SBY kepada para kabinetnya untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri dan para menteri terkait agar memantau langsung ke lapangan, jalannya pembagian BLSM agar tepat sasaran.<sup>32</sup>

Berikut adalah kasus-kasus di mana bantuan BLSM salah sasaran:

- a. Pada Tanggal 25 Juni 2013, di Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Gemblek, yang berusia 60 tahun, malah tidak menerima BLSM, padahal ia adalah hidup sebatang kara pada rumah yang berukuran .
- b. Pada Tanggal 25 Juni 2013, di Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sejumlah ibu-ibu yang menggunakan kalung, gelang, dan giwang emas malah menerima bantuan BLSM. Tujuan ibu-ibu tersebut menerima bantuan BLSM bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, namun digunakan untuk bermewah-mewahan.
- c. Pada Tanggal 25 Juli 2013, di Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Ayu, yang berusia 26 tahun, menerima bantuan BLSM, padahal ia sudah termasuk kategori orang yang sudah mampu. Hal ini dapat dilihat dari kalung, cincin, dan anting-anting yang membaluti tubuh Ayu. Sementara itu, Atikah, menerima BLSM dengan tujuan membayar utang yang ditagihkan rentenir yang dibebankan padanya.
- d. Pada Tanggal 3 Juli 2013, di Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Ibu ibu mendatangi Kelurahan melaporkan banyak warga miskin yang tidak mendapatkan BLSM.
- e. Pada Tanggal 3 Juli 2013, di Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Bapak Bapak mendatangi Kelurahan melaporkan bahwa beberapa warga yang sudah meninggal

---

32. Amri arrusdi, “Universitas Jenderal Soedirman” *Artikel*, Fakultas biologi Tahun 2014

masih tercatat sebagai penerima bantuan BLSM.

- f. Pada Tanggal 3 Juli 2013, di Kelurahan Kemantikan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Bapak Bapak dan Ibu ibu mendatangi Kelurahan melaporkan data penerima bantuan BLSM masih menggunakan data yang lama, belum dimutakhirkan.

Salah satu penyebab kurang tepat sasaran dalam penyaluran bantuan BLSM karena masih menggunakan data lama, yaitu tahun 2012. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi Abdul Karim mengatakan bahwa proses penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat disampaikan melalui PT. Pos Indonesia. Tarmizi mengatakan data yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri “Menggunakan data BPS 2012 yang digunakan juga untuk pembagian raskin,” ujar Tarmizi kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2013. Ia mengatakan pendataan penerima BLSM tersebut dilakukan oleh BPS.

Tarmizi menjelaskan, data perolehan BPS tersebutlah yang disampaikan dalam rapat dengan DPR, untuk menentukan besaran yang akan disalurkan kepada rakyat miskin. Dari rapat dengan DPR didapatkan jumlah 15,5 juta masyarakat akan menerima BLSM. Berdasarkan hasil data tersebut, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) disalurkan kepada para penerima melalui PT. Pos Indonesia, begitu juga dengan penyaluran dana BLSM tersebut. PT. Pos ditunjuk sebagai lembaga penyalur bantuan kepada masyarakat. Setiap masyarakat penerima KPS, melakukan pengambilan BLSM dengan membawa identitas sebagai bukti.<sup>33</sup>

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin memastikan keakuratan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BSLM). Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Suryamin menjelaskan asal

33. Anonymous, “ Penyaluran BLSM Menggunakan Data BPS 2012”. *Media Harian Tempo*, Kamis, 11 Juli 2013.

mula penentuan masyarakat penerima bantuan pemerintah, termasuk BLSM. «Data BLSM ini asalnya dari sensus penduduk 2010 yang mencatat jumlah penduduk 237,6 juta orang dengan rumah tangga sekitar 60 juta lebih,» ujarnya. Dari jumlah tersebut, dibuat sebuah modal yang dicocokkan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan dipadukan dengan besaran pengeluaran. Dari data tersebut, BPS mengurutkan dari pendapatan tertinggi sampai terendah sehingga diperoleh angka 40 persen masyarakat pendapatan terbawah. «Jadi, ini data dasar yang terpadu untuk digunakan sebagai dasar bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk berbagai program. Baik itu raskin, BSM, maupun BLSM,» kata Suryamin. Oleh karena itu, apabila ada penambahan data di satu desa, Suryamin mengatakan tidak mungkin bertambah atau berkurang secara masif. Misalnya ada 20 kepala keluarga miskin, tidak mungkin melonjak menjadi 50 kepala keluarga. «Paling ada tambahan satu atau dua orang karena meninggal atau pindah,» ujar Suryamin. Lebih lanjut, Suryamin meyakinkan data ini berasal dari sumber yang sangat bagus. Sebab, setelah dilakukan perhitungan dari sisi pendapatan, juga dilakukan verifikasi ulang di lapangan. «BPS punya *by name by address*. Akan didatangi dan apabila ada penambahan atau pengurangan kita masukkan.»<sup>34</sup>

Pemerintah tak akan menambah daftar jumlah penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), walaupun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembagian dana BLSM ada yang salah sasaran dan tak merata. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa 15,5 juta kepala keluarga yang terdaftar yang berhak mendapatkan dana kompensasi tersebut. “Pada prinsipnya, (jumlahnya) tidak akan ditambah,” kata Hatta, di Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. Terkait kesalahan data dan administrasi, Hatta memaklumi segala

---

34. Anonymous, “Begini Cara BPS Buat Data Calon Penerima BLSM” *Harian Republika*, Selasa, 25 Juni 2013.

kesalahan tersebut. Misalnya, saja sewaktu Hatta meninjau pembagian BLSM di Kantor Pos Kramat Jati, seorang ibu curhat kepadanya karena ia tak bisa mengambil BLSM hanya karena kesalahan ketik alamat di Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Padahal, telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut. “Semua itu bisa saja terjadi, *human error* sering terjadi. Tidak usah terlalu diributkan, karena namanya juga itu kesalahan itu manusiawi,” kata Hatta.

Sementara itu, bagi warga yang belum menerima KPS, akan ada evaluasi di tiap kelurahan, sebagai bentuk dari tindak lanjut daftar yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Dari musyawarah itu, kata dia, warga bersama pihak kelurahan akan saling berdiskusi untuk mendata warga yang berhak menerima BLSM. Dalam evaluasi, Hatta Rajasa mengklaim bahwa penyaluran KPS sudah berjalan baik. «Dari sisi distribusi KPS, sudah berjalan sangat baik dan akhir bulan ini, seluruh kartu akan dibagikan semuanya,» ujar Hatta. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Syarat pengambilan BLSM adalah KPS, kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP).<sup>35</sup>

Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kali ini sangat tidak tepat sasaran dibandingkan pembagian BLT pada 2008 silam. Saat itu ada data yang baik, ada sosialisasi, dan persiapan cukup waktu. BLSM kali ini tidak ada sosialisasi. Iklan-iklan di teve atau koran yang disampaikan pemerintah, bukan untuk sosialisasi, tapi untuk mengubah pikiran, bahwa pemakai BBM saat ini tidak tepat sasaran, karena 60% digunakan oleh orang kaya. “Kalau pembagian BLSM kali ini, mau sok cepat, memang cepat, tapi banyak yang ditolak penerima, karena merasa tidak berhak menerima. Ini jelas terlihat semua karena didasari oleh kepentingan politik, bukan untuk pembagian kepada rakyat dengan baik,” ujarnya. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi

35. Anonymous, “Jumlah Penerima BLSM Tak Akan Diubah” *Harian Kompas*, Kamis 27 Juni 2013.

Golkar Tubagus Ace Hasanudin menyatakan, data 15 juta kaum miskin yang dipakai oleh pemerintah untuk pembagian BLSM memang sangat tidak cocok lagi, karena hal itu merupakan hasil sensus tahun 2011.

Seharusnya ada sensus baru agar jumlah kaum miskin yang ada sekarang benar-benar cocok dengan kenyataan. Menurut Ace, pemerintah sendiri sudah menyatakan, jumlah angka kemiskinan sudah turun sekian persen. Ini artinya, kalau masih memakai data BPS 2011, jelas bertentangan dengan penjelasan pemerintah itu sendiri. Data itu makin mendesak untuk diperbarui, karena juga untuk pembagian raskin (Beras untuk keluarga miskin), dan Bantuan Sosial Miskin (BSM). “Kemungkinan besar, jumlah 15,5 juta rakyat miskin itu memang sudah berubah, jadi perlu pendataan lagi,” ujarnya. Ace juga menjelaskan, kepada Komisi VIII DPR, PT Pos sudah menjelaskan, setelah pemerintah membagikan 10 juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ternyata sejak 30 Juni 2013 ada 9386 KPS yang dikembalikan. Ini karena ada yang salah sasaran, misalnya yang meninggal 12%, salah penerima 16%, pindah alamat rumah tanpa pemberitahuan 53%, tidak dikenal ada 21%, pindah, dan sebab lainnya.<sup>36</sup>

Pemerintah dianggap mengambil jalan pintas, ketika menggunakan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan data masyarakat miskin pada 2011. Perlu diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, menyatakan alasan penggunaan data masyarakat miskin 2011, agar lebih mudah dalam proses pendataan. Mengingat BLSM hanya akan dilakukan selama empat bulan saja. Padahal, selama 2012 hingga 2013 jumlah masyarakat miskin terus bertambah. “Iya, saya kira begitulah cara kerja pemerintah saat ini, hanya mengambil jalan pintasnya saja, tanpa memikirkan dampak atau implikasi atas kebijakan apa yang akan diambil,” ungkap Ketua Fraksi

36. Anonymous, “Pembagian BLSM 2013 Sangat Buruk” *Pikiran Rakyat*, Tanggal 5 Juli 2013

Hanura, Syarifuddin Suding, di Jakarta, Menurut Suding, sejak awal, partainya memang tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain melamahkan daya beli masyarakat yang rendah, lanjut Suding, angka kemiskinan justru akan terus meroket. “Kebijakan kenaikan harga BBM itu kan juga berimplikasi kepada tingkat kemiskinan yang akan bertambah. Apalagi mengenai penerima bantuan BLSM dan masalah penyalurannya. Apakah itu tepat sasaran atau bagaimana mengidentifikasi penerimanya?”.

Sejauh ini, Anggota Komisi III DPR ini, tidak melihat adanya transparansi dari pemerintah terkait pendataan penerima BLSM. Sehingga, BLSM yang diberikan ini bukan untuk orang-orang yang berhak menerima, karena tidak jelas data-data yang digunakan oleh pemerintah. “Makanya kenapa harus menyoroti itu, disamping kebijakan tidak tepat sasaran. Juga berimplikasi terhadap orang-orang yang katakan-lah data-data yang digunakan ini tidak begitu valid,”. Sementara itu, Suding juga tidak menampik adanya banyak penyimpangan pemberian BLSM di daerah, khususnya wilayah Indonesia bagian timur. “Ya saya kira waktu BLSM ini cuma empat bulan. Kalau misalnya ini sudah berlangsung, lalu ke depannya dilakukan suatu perbaikan, saya kira itu sudah terlambat,” terangnya. Partai Hanura, lanjut Suding akan menyoroti pemberian perdana BLSM yang berlangsung selama Juni 2013. “Hal itu akan disoroti dan akan disikapi. Pasti itu, pasti akan dikritisi.”<sup>37</sup>

Tidak ada data yang sempurna, data disusun dengan standar pengumpulan data yang tinggi serta kontrol kualitas yang kuat. Tapi beberapa hal akan mempengaruhi ketepatan sasaran dan persepsi tentang akurasi data, yang menghasilkan keluhan semacam “saya sama

---

37. Anonymous, “ Pemerintah Ambil Jalan Pintas soal Data Penerima BLSM” *Pikiran Rakyat*, Tanggal 28 Juni 2013.

miskinnya dengan tetangga saya, tapi saya tidak mendapatkan BLSM.”<sup>38</sup> BLSM ‘hanya’ dibagikan pada 25 persen penduduk angka 25 persen adalah angka nasional. Bukan berarti di setiap propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa, akan ada 25 persen warga yang menerima BLSM. Di wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi seperti Papua, penerima BLSM bisa mencapai 40 persen penduduk. Sebaliknya di DKI Jakarta, hanya sekitar tiga persen yang menerima BLSM. Sedang Kota Serang memakai angka standar nasional, konsekuensinya di satu wilayah pasti akan menemui warga yang dapat dan yang tidak. Persepsi mengenai ketidak tepatan sasaran akan makin besar di wilayah yang semakin kecil luasnya tapi kepadatan penduduk semakin tinggi seperti di kota besar. Ini tentu bukan berarti BLSM salah sasaran. Tapi masyarakat akan mempersepsikan demikian karena dalam satu wilayah ada yang menerima dan ada yang tidak.

Secara historis, Indonesia (dan negara-negara Asia Tenggara) memiliki ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan Amerika Latin, juga India atau Cina. Implikasinya, menargetkan penduduk miskin menjadi lebih sulit. Banyak rumah tangga di kelompok 40 persen terbawah punya karakteristik yang mirip dan sulit dibedakan mana yang lebih miskin dari yang lain. Sebagai contoh, 7 dari 10 tangga penerima BLSM (25 persen terbawah) di Jakarta memiliki telepon selular. Sama halnya, tujuh dari sepuluh rumah tangga yang ada di kelompok 26-40 persen (tidak menerima BLSM) juga memiliki telepon selular. Atau dari segi karakteristik rumah, 4 dari 10 rumah tangga penerima BLSM di Indonesia memiliki rumah yang dindingnya tembok, dan 6 dari 10 punya rumah berlantai bukan tanah. Ini tidak jauh berbeda dengan rumah tangga di kelompok 26-40 persen terbawah. Perbandingan karakteristik rumah tangga BLSM dan non-BLSM, yaitu:

---

38. Wawancara Bapak Romli, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang Tanggal 26 Juli 2015



Kelompok kriteria	Detail kriteria	Jakarta Utara		Muko Muko		Rata-rata Nasional	
		Penerima KPS	Rentan Non-KPS	Penerima KPS	Rentan Non-KPS	Penerima KPS	Rentan Non-KPS
Karakteristik rumah tangga	Status Ka RT: Menikah	8	7	8	8	8	7
	Status Ka RT: Tunggal perempuan	2	2	1	2	1	2
Kondisi sosial ekonomi	Tingkat pendidikan Ka RT: SD	4	3	4	3	4	4
	Tingkat pendidikan Ka RT: SMA	2	3	0	1	1	1
Keadaan rumah tinggal	Status kepemilikan rumah: Milik sendiri	4	5	8	9	8	8
	Dinding terluas adalah tembok	6	8	1	2	4	6
	Lantai terluas bukan tanah	8	8	7	8	6	8
Kepemilikan aset	Telepon seluler	7	7	7	8	5	6
	Kendaraan: sepeda motor	1	3	4	6	2	4

*Perbandingan karakteristik rumah tangga BLSM dan non-BLSM*

Bandingkan dua gambar rumah di gambar di bawah ini, jika hanya ada satu yang bisa diberikan BLSM, mana yang lebih layak?



Sepintas rumah yang sebelah kiri akan dianggap lebih layak, karena secara fisik kondisinya lebih buruk. Sekarang pertimbangkan informasi tambahan ini. Di rumah sebelah kiri, kepala rumah tangga bekerja sebagai penjual siomay, istrinya bekerja sebagai guru honorer, dan mereka memiliki satu anak. Sementara di rumah sebelah kanan, kepala rumah tangga bekerja sebagai guru, istrinya tidak bekerja dan memiliki tujuh anak. Mungkin jawaban kita akan berubah, mungkin tidak. Yang pasti, adanya informasi tambahan ini membuat pilihan tidak lagi jelas. Mungkin akan semakin rumit jika kita tambahkan berbagai informasi lagi seperti sumber air yang digunakan, jenis sanitasi dan lain sebagainya. Poinnya adalah, tidak bisa menentukan sebuah rumah tangga lebih layak menerima bantuan atau tidak hanya dari satu variabel. Apalagi hanya variabel yang kasat mata seperti kondisi rumah. Sering keluhan mengenai akurasi penargetan hanya didasarkan atas 1-2 indikator yang kasat mata, sementara penentuan sasaran didasarkan atas beberapa informasi.

Penentuan sasaran BLSM dilakukan tahun 2013 dari basis data di tahun 2011. Dalam dua tahun, pasti ada rumah tangga yang membaik kondisinya. Sebaliknya, ada juga yang memburuk. Pasti ada rumah tangga yang sudah pindah atau meninggal semua. Ini semua tidak terhindarkan. Tidak ada data yang sempurna, sekali lagi. Meski kontrol kualitas sudah dimaksimalkan, pasti ada *error* dalam proses pengumpulan data. Bahkan satu persen error saja ekuivalen dengan hampir sepuluh juta penduduk atau dua setengah juta rumah tangga. Di sisi lain, melakukan pemutakhiran data untuk 96 juta penduduk tidak realistis untuk dilakukan setiap tahun. Jadi perlu mekanisme lain untuk memutakhirkan data di antara dua pencacahan data. Mekanisme yang ditawarkan adalah musyawarah desa dan kelurahan.

Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan,

kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan rumah tangga dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan data penerima. Musyawarah desa/kelurahan atau musyawarah kecamatan dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan lokal mengenai kepesertaan, yang bertujuan untuk mengganti rumah tangga.

Mekanisme musyawarah desa untuk mengganti penerima BLSM yang dianggap tidak layak adalah sebuah mekanisme yang perlu didorong. Ini adalah solusi yang coba menggabungkan mekanisme teknokratik yang *top-down* dengan kearifan komunitas yang *bottom-up*. Ini adalah solusi yang lebih baik dan praktikal ketimbang melakukan validasi tahunan.

Kemiskinan memang problem yang belum terselesaikan. Karena itu upaya untuk mengatasinya tidak akan pernah selesai. BDT adalah bagian kecil dari upaya itu. Data dan metode yang ada akan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Berbagai kritik terhadap Basis Data Terpadu (BDT) adalah bagian dari upaya perbaikan. Tidak ada data yang sempurna. Itu adalah keniscayaan. Tapi kita juga perlu bijak dalam membedakan mana fakta yang sifatnya anekdotal, mana yang bukan. Tentu dari sekian juta penerima BLSM, pasti kita temukan kasus pemilik kalung emas atau pegawai negeri sipil ikut mengantre. Pertanyaannya bukan ada atau tidak, tapi apakah temuan-temuan itu sifatnya kasuistik atau sistematis. Anekdot tidak bisa menjawab itu. Saat ini kita belum bisa menilai seberapa besar kesalahan penargetan dalam BLSM. Beberapa bulan lagi setelah data Survey Sosial Ekonomi Nasional keluar mungkin kita bisa mengatakan hal itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang bagaimana data sasaran BLSM ditentukan, dan karakteristik data yang bisa mempengaruhi penentuan sasaran.

Penargetan BLSM menggunakan metode *Proxy Means Testing* (PMT). Dalam metode PMT, rumah tangga diprediksi pendapatannya

dan posisi relatifnya dalam distribusi pendapatan menggunakan sejumlah variable seperti kondisi fisik rumah, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, sumber air, sumber penerangan, dan beberapa *proxy* atas aset. Daftar penerima BLSM berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang memuat informasi empatpuluh persen penduduk Indonesia berpendapatan terbawah. BDT adalah sebuah sensus parsial yang dilakukan tahun 2011 untuk lebih dari 96 juta rumah tangga Indonesia. Data ini memuat informasi tentang kondisi rumah (jenis atap, lantai, dinding), pekerjaan dan pendidikan kepala rumah tangga, sumber penerangan, jumlah anggota rumah tangga. Indikator-indikator dalam PPLS 2011, yaitu:

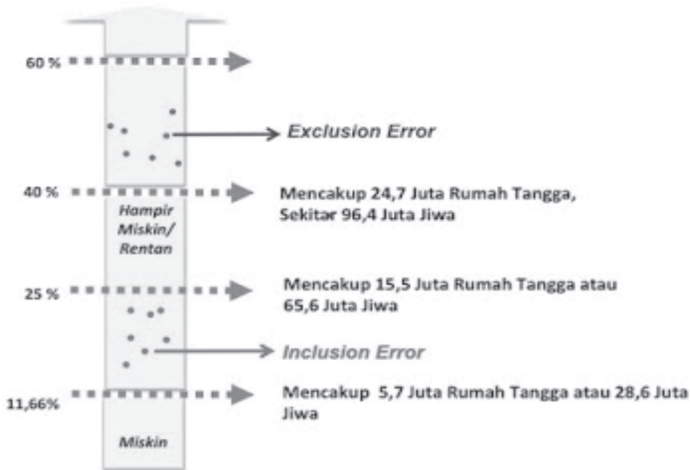
*Indikator-indikator dalam PPLS 2011*

Kelompok kriteria	Detail kriteria	Deskripsi pilihan pada kriteria
Karakteristik rumah tangga	Status kepala rumah tangga	Kepala rumah tangga tunggal/menikah
	Jumlah anggota rumah tangga	Lebih banyak/sedikit
	Jumlah anggota rumah tangga usia produktif	Lebih banyak/sedikit
Kondisi sosial ekonomi	Jumlah anak bersekolah	Lebih banyak/sedikit
	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga	Pendidikan dasar, menengah, tinggi
	Tingkat pendidikan anggota rumah tangga	Pendidikan dasar, menengah, tinggi
Keadaan rumah tinggal	Status pada pekerjaan utama	Berusaha sendiri, buruh, karyawan
	Status kepemilikan rumah	Milik sendiri/keuarga/sewa
	Dinding	Bahan/kondisi
	Atap	Bahan/kondisi
	Lantai	Bahan/kondisi
	Sumber penerangan/listrik	PLN/non PLN; daya terpasang
	Bahan bakar untuk memasak	Listrik/gas/minyak tanah/arang
	Sumber air minum	Air kemasan/isi ulang/leding/sumur/terlindungi- tidak terlindungi
	Cara memperoleh air minum	Beli/tidak membeli
	Pemakaian fasilitas tempat buang air/toilet	Bersama/milik sendiri
Kepemilikan aset	Tempat buang air	Tangki/lubang tanah/kolam/sungai/lapangan
	Kulkas	Memiliki/tidak memiliki
	Tabung gas 12 kilogram	Memiliki/tidak memiliki
	Telepon seluler	Memiliki/tidak memiliki
	Kendaraan	Sepeda/perahu/sepeda motor/perahu motor/mobil/kaos bermotor

Penentuan responden PPLS 2011 dilakukan sebagai berikut. Dari Sensus Penduduk 2010, ditentukan sejumlah target rumah tangga yang akan didatangi (sebagai contoh: rumah tangga yang beralamat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, tidak masuk dalam target PPLS). Di setiap rumah tangga yang didatangi, petugas mengumpulkan informasi-informasi yang ada. Selain mengguakan Sensus Penduduk 2010, petugas pencacah juga ‘menyisir’ calon responden dengan bertanya pada penduduk miskin yang diwawancarai, apakah mereka mengetahui ada penduduk miskin lain di lingkungan mereka yang mungkin luput dari pendataan. Ini berbeda dengan PPLS sebelumnya (2005 dan 2008) yang mengandalkan informasi dari Ketua RT/RW, Kepala Dusun/Desa atau tokoh masyarakat. Informasi yang diberikan oleh elit komunitas punya potensi bias bahkan terjebak pada *elite capture*.

Sementara informasi yang dikumpulkan dari sesama penduduk miskin – dalam teori – lebih kecil kemungkinan biasnya. Informasi yang ada di PPLS 2011 kemudian digunakan dalam sebuah kalkulasi untuk menentukan sebuah rumah tangga ada di posisi mana dalam distribusi pendapatan. (Ingat, kita tidak bisa memiliki data pendapatan yang akurat untuk tiap rumah tangga, jadi kita mengestimasiya menggunakan sejumlah indikator). Dari situ kita bisa menentukan rumah tangga mana saja yang ada di 25 persen terbawah yang menjadi sasaran BLSM. Angka 25 persen rumah tangga dengan status sosial ekonomi terbawah ini ekuivalen dengan 15,5 juta rumah tangga atau sekitar 65,6 juta jiwa. Ini jauh lebih tinggi dari jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang jumlahnya sekitar 5,7 juta rumah tangga (28,6 juta jiwa) di tahun 2012, atau 11,66 persen dari populasi. Target BLSM dan penduduk miskin, yaitu:

## Target BLSM dan Penduduk Miskin



Mengapa 25 persen? Mengapa bukan 11,66 persen sesuai angka kemiskinan? Jawaban pendeknya: itu adalah kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR, karena kita punya cukup anggaran untuk menargetkan 25 persen penduduk termiskin. Jawaban yang agak panjang adalah karena situasi kemiskinan di Indonesia cukup dinamis. Sumarto dan Suryahadi (2010) menghitung, berdasarkan data SUSENAS panel, 55% penduduk miskin pada 2010 ternyata bukan penduduk miskin pada 2009. Karena sifat dinamisnya itulah program perlindungan sosial perlu menyasar target bukan hanya penduduk miskin tapi juga mereka yang rentan. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah dalam program BLSM.

Empat pertanyaan penting dalam kebijakan kemiskinan adalah berapa, siapa dan di mana, serta bagaimana mengatasinya. Pertanyaan pertama adalah persoalan pengukuran. Pertanyaan terakhir adalah soal pilihan kebijakan.

Pertanyaan siapa dan di mana membawa kita pada isu penargetan. Salah satu kata kunci dalam diskusi terkait pengurangan subsidi BBM adalah “subsidi umum (*universal*)” menjadi “subsidi terarah (*targeted*)”. Dalam literatur memang ada pembahasan soal apakah kebijakan perlindungan sosial sebaiknya berlaku umum atau bersifat terarah. Ini bukanlah suatu pilihan biner. Beberapa kebijakan perlindungan sosial di banyak negara bersifat universal. Contohnya adalah kebijakan pensiun, layanan pendidikan atau kesehatan dasar. Sementara kebijakan seperti bantuan tunai, kupon makanan, beasiswa siswa tidak mampu umumnya diberikan secara terarah.

Ada dua alasan. Pertama, alasan keadilan. Akan tidak adil jika negara memberikan subsidi yang sama pada penduduk berpendapatan rendah dan tinggi – apalagi jika mereka yang berpendapatan tinggi secara efektif menikmati lebih banyak. Kedua, alasan keterbatasan. Dengan sumber daya anggaran yang terbatas, maka dana publik untuk perlindungan sosial akan jauh lebih efektif jika diarahkan pada kelompok yang paling tidak beruntung. Adanya perkembangan dalam hal teori serta aplikasi statistik juga membuat kebijakan yang terarah lebih mudah untuk dijalankan. Dalam satu-dua dekade terakhir, metode seperti *poverty mapping* dan lainnya makin meningkatkan akurasi dalam menentukan sasaran kebijakan. Selain itu, teknologi dalam hal pengumpulan serta pengolahan data survey atau sensus membuat biaya untuk membangun basis data penargetan juga makin kecil. Meski demikian, kebijakan yang terarah menimbulkan sejumlah biaya (bukan hanya biaya finansial), yaitu:

- a. *Biaya administratif*. Biaya yang timbul dari usaha mengumpulkan informasi mengenai siapa kelompok atau individu sasaran.
- b. *Biaya privat*. Individu atau rumah tangga penerima kebijakan mungkin harus mengeluarkan uang untuk membuat kartu identitas, membuka rekening bank, atau mengantre untuk mendapatkan bantuan.
- c. *Disinsentif bagi penerima*. Adanya kriteria bagi penerima

kebijakan bisa mendorong calon penerima mengubah perilakunya agar termasuk dalam daftar penerima (atau tetap menjadi penerima). Misalnya dengan mengurangi jam kerja agar penghasilan tetap rendah.

- d. *Biaya sosial*. Penerima kebijakan terarah bisa mendapat stigma negatif dari status ‘miskin’ atau marjinal. Di sisi lain, kebijakan yang terarah bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi mereka yang tidak menjadi penerima
- e. *Biaya politik*. Kebijakan yang terarah berisiko tidak didukung secara politik oleh kelompok yang tidak menerima kebijakan, yang kebanyakan berasal dari kelas menengah. Politisi yang konstituennya kebanyakan bukan dari penerima kebijakan juga cenderung menolak. Biaya-biaya ini tidak terelakkan, tapi bisa dikelola agar tidak melebihi keuntungan yang ditawarkan.

Ada tiga kelompok metode penargetan: *self-targeting*, penargetan kategoris (*categorical targeting*) serta penargetan individu atau rumah tangga (*individual/household targeting*). Tiap metode punya kelebihan dan kekurangan, dan akan menjadi pilihan yang paling efektif dalam konteks yang berbeda, yaitu:

Self-targeting	Categorical targeting	Individual/household targeting
	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Geographic</li> <li>» Demographic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Simple means-testing</li> <li>» Community targeting</li> <li>» Proxy means-testing</li> </ul>

***Self-targeting.*** Dalam *self-targeting*, sebuah program atau kebijakan tidak menetapkan kriteria siapa yang berhak mendapatkan. Tapi program didesain sedemikian rupa agar hanya mereka yang benar-



benar membutuhkan yang akan mendaftar. Contohnya adalah program-program padat karya (*employment guarantee*). Upah yang diberikan sedikit di bawah upah pasar, dan sifat pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan kasar atau fisik. Mereka yang mampu dari segi fisik maupun kapabilitas akan lebih suka mencari pekerjaan di pasar kerja. Beberapa skema kredit mikro juga menggunakan metode *self-targeting*. Untuk mengakses kredit mikro mereka hanya bisa meminjam dengan jumlah terbatas, dengan bunga efektif lebih tinggi dan beberapa ketentuan lain seperti pinjaman kelompok. Mereka yang produktif akan lebih memilih kredit komersial.

*Self-targeting* bisa jadi pilihan jika kita ingin menargetkan penerima program dengan kebutuhan yang spesifik (seperti pekerjaan sementara atau kredit mikro). Ia juga bisa jadi pilihan ketika informasi yang akurat mengenai calon penerima program tidak tersedia, atau butuh biaya besar. Juga ketika kapasitas administrasi relatif terbatas untuk memisahkan mana penerima yang layak mana yang tidak. Tapi metode ini bisa berjalan efektif jika desain dan manfaat program benar-benar bisa membuat disinsentif bagi mereka yang mampu. Sebaliknya, tidak menciptakan stigma negatif bagi yang membutuhkan. Metode ini juga tidak cocok untuk program berskala besar atau yang bentuknya seperti bantuan tunai.

***Categorical targeting.*** Sebuah program bisa ditargetkan pada penduduk dari wilayah tertentu yang dianggap terbelakang, atau dimana jumlah penduduk miskin relatif banyak. Ini dikenal sebagai penargetan wilayah atau *geographic targeting*. Alternatifnya, program diberikan pada penduduk berdasarkan karakteristik demografis (ras, usia, gender, pendidikan) yang dianggap marginal. Ini dikenal sebagai penargetan demografis atau *demographic targeting*.

Metode penargetan kategoris bisa jadi pilihan ketika informasi mengenai siapa individu atau rumah tangga yang layak tidak tersedia. Di saat yang sama ada korelasi yang tinggi antara kemiskinan (atau risiko

sosial) dengan lokasi atau karakteristik demografi. Di negara-negara yang memiliki ketimpangan wilayah atau demografis tinggi, penargetan kategoris bisa berjalan efektif. Ini mirip seperti kebijakan *affirmative action* di banyak negara. Kekurangannya, di dalam satu lokasi atau karakter demografi yang sama, ada individu yang pada dasarnya beruntung atau tidak miskin. Ini akan mengurangi efektifitas dari penargetan. Untuk negara-negara dimana kemiskinan atau risiko sosial tidak ditentukan oleh lokasi atau karakter demografi, metode ini jadi tidak efektif. Ada juga pertanyaan soal sampai seberapa lama sebuah kelompok bisa dianggap marginal – ini yang jadi perdebatan soal *affirmative action* di Amerika Serikat. ***Individual/household targeting***. Dalam situasi ideal, sebuah kebijakan perlindungan sosial diberikan pada tiap individu atau rumah tangga yang benar-benar membutuhkan. Ini menyaratkan adanya informasi yang akurat tentang kondisi tiap individu/rumah tangga. Informasi yang sempurna tentu mustahil didapat. Tapi ada beberapa cara untuk melakukan penargetan individu atau rumah tangga:

- a. *Means testing*. Melakukan verifikasi sederhana untuk menentukan kriteria penerima. Misalnya dengan meminta dokumen yang menunjukkan pendapatan (slip gaji, faktur pajak) jika syaratnya adalah penghasilan yang rendah; rekening listrik untuk menunjukkan kelas rumah tangga, atau bahkan wawancara sederhana. Banyak program *welfare* di Amerika Utara, Australia atau Eropa menggunakan metode ini. Bolsa Familia di Brazil juga menggunakan metode ini, digabung dengan penargetan komunitas. *Means testing* bisa efektif jika pencatatan kependudukan dan penghasilan di sebuah negara relatif baik. Jika tidak, kesalahan penargetan akan tinggi karena penerima bisa memberi jawaban yang tidak jujur.
- b. Penargetan komunitas (*community targeting*). Dalam metode ini, komunitas diminta menentukan sendiri siapa di antara mereka

yang layak untuk menjadi penerima program. Asumsi dari metode ini adalah komunitas memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak luar. Dalam banyak hal, ini adalah asumsi yang tepat. Selain itu penargetan komunitas juga bisa memitigasi konflik serta meningkatkan dukungan terhadap program. Tapi penargetan komunitas juga mengasumsikan bahwa komunitas bisa melakukan identifikasi dan pilihan. Seringkali ini tidak terjadi, karena modal sosial yang rendah, konflik internal yang tinggi, atau *elite capture*.

- c. *Proxy means testing* (PMT). Ini adalah bentuk lebih rumit dari *means testing*. Singkatnya, pendekatan ini dimulai dengan membangun basis data yang isinya informasi di tingkat individu atau rumah tangga. Dari variabel yang ada, setiap individu atau rumah tangga akan diberi skor berdasarkan sebuah model atau pembobotan tertentu. Mereka yang skornya di atas nilai tertentu akan mendapatkan program. Pendekatan PMT tergolong baru, tapi semakin populer di banyak negara. Banyak negara Amerika Latin menggunakan metode ini (Oportunidades di Meksiko, Solidario di Chile, dan banyak lagi). Kelebihan dari pendekatan ini adalah karena didasarkan atas berbagai variabel, jika dilakukan dengan baik maka akurasinya cukup tinggi. Untuk program berskala besar dengan kondisi penerima yang kompleks, atau di negara dimana ketimpangan antarindividu rendah sehingga sulit membedakan mana yang lebih mampu atau tidak, metode PMT jadi pilihan yang baik. Tapi di sisi lain, karena sifatnya yang sangat ilmiah, agak sulit menjelaskan dengan argumen sederhana mengapa si A menerima program, si B tidak. Jika tidak dikelola dengan baik, PMT justru bisa membuat sebuah program kehilangan dukungan politik maupun sosial.

## 2. Efektifitas Dalam Menanggulangi Kenaikan Harga

BLSM diluncurkan oleh pemerintah mulai 22 Juni 2013 dan diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan besaran Rp150.000,- per bulan selama empat bulan. Tahap awal BLSM diberikan dua bulan sekaligus, yaitu Rp 300.000,- di mana akan dibagikan bertahap sampai Juli. Pembagiannya fokus pada dua tempat, yaitu PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintahan. Penyaluran ini didahului dengan mencetak Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai bukti pengambilan dana BLSM dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Untuk mendanai BLSM tersebut, alokasi anggarannya mencapai Rp 9,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013.<sup>39</sup>

Tujuan Pemerintah meluncurkan program BLSM ini, antara lain: 1). Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 2). Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 3). Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.<sup>40</sup>

Target yang hendak dicapai dalam penelitian ini selain efektifitas sasaran penerima BLSM, juga sejauhmana efektifitas dana BLSM itu dalam menanggulangi kenaikan harga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, akibat naiknya harga BBM sebagai kongklusi dari tujuan pemerintah di atas. Untuk itu penulis mengumpulkan data penerima BLSM di Kota Serang. Dari populasi data penerima dana BLSM sebanyak 17121 orang yang tersebar di enam kecamatan, yaitu:<sup>41</sup> Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen, Kecamatan

---

39. Iwan Hermawan, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/1/P3DI/Juli/2013.

40. Anonymous, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Artikel*, Biro Humas Setda Prov. Sumbar, 2013.

41. Sumber PT. Pos Indonesia cabang Serang Tahun 2013.

Curug dan Kecamatan Walantaka. Penulis ambil sampel 100 orang penerima BLSM dari 17121 orang penerima BLSM, yaitu:

*Sampel Data Penerma Blsm Se Kota Serang  
Dilihat Dari Puas, Sedang Dan Tidak Puas  
Juni Sd September 2013*

NO	NAMA	ALAMAT	PUAS	SEDANG	TIDAK PUAS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SUNTI	KAMPUNG KALI TANJUNG RT 004 RW 01 CURUG				
2	HENDAR	KP KADONG- KELAN RW 03 RT 013 CURUG	✓			
3	HOMSU	KP CIDEHENG KIDUL RT 010 RW 003. CURUG	✓			
4	SARBAH	KP CIDEHENG LOR RW 03 RT 012 CURUG		✓		
5	SANIMAN	KP CIDEHENG KIDUL RT 010 RW 003 CURUG		✓		
6	JAMI	KP CIDEHENG LOR RW 03 RT 012 CURUG		✓		
7	ROBI ALI	KP KADONG- KELAN RW 03 RT 013 CURUG		✓		
8	SOLIHIN	KP.WARU LOR RT 016 RW 04 CURUG			✓	

9	SAAD	KP SARONGGE RT 003 RW 01 CURUG			✓	
10	MUSLIK	KP CIDEHENG LOR RW 03 RT 012 CURUG		✓		
11	AAM AMI- NAH	KP.WARU KIDUL RT.015 RW.04 CURUG		✓		
12	SAKAR	KP CIDEHENG LOR RW 03 RT 012 CURUG	✓			
13	SANTIMAH	KP SARONGGE RT 003 RW 01 CURUG	✓			
14	SATRI	KP CIDEHENG LOR RW 03 RT 012 CURUG		✓		
15	SOPIAN	KP KALAPITAN RT 017 RW 04 CURUG				
16	NURSAID	KP JAYABAYA RW 02 RT 006 CURUG				
17	MAD SURI	KP CIDEHENG LOR RW 03 RT 012 CURUG		✓		
18	SUKRI	KP. CIGOER TIMUR RT 012 RW 03 WALANTAKA		✓		
19	A KATIB	NYAPAH KANTOR RW 03 RT 001 WALANTAKAN		✓		

20	SARNAKA	KP. NYAPAH MAS- JID RT 005 RW 02 WALANTAKAN			✓	
21	DULHAMID	KP. NYAPAH MAS- JID RT 005 RW 02 WALANTAKAN		✓		
22	KASIAH	KP NYAPAH IN- PRES RT 008 RW 02 WALANTAKAN	✓			
23	MADNUR	KP NYAPAH IN- PRES RT 008 RW 02 WALANTAKAN		✓		
24	KAMID	KP. CIGOER BARAT RT 004 RW 03 WALANTAKAN			✓	
25	TUGAH	KP. NYAPAH MAS- JID RT 005 RW 02 WALANTAKAN			✓	
26	JANURI	KP KARANG SUKA RT 010 RW 03 WALANTAKAN		✓		
27	SANTA	KP NYAPAH IN- PRES RT 008 RW 02 WALANTAKAN		✓		
28	MARWI	KP NYAPAH IN- PRES RT 008 RW 02 WALANTAKAN	✓			
29	ILYAS	KP. CIGOER BARAT RT 004 RW 03 WALANTAKAN	✓			
30	SARBINI	KP KARANG SUKA RT 010 RW 03 WALANTAKAN		✓		

31	NIAN	KP KARANG SUKA RT 010 RW 03 WALANTAKAN		✓		
32	SARNATA	KP KARANG SUKA RT 010 RW 03 WALANTAKAN		✓		
33	SUHENI	KP NYAPAH IN- PRES RT 008 RW 02 WALANTAKAN		✓		
34	JASARI	KP NYAPAH IN- PRES RT 008 RW 02 WALANTAKAN		✓		
35	ROBANI	LINGKUNGANN SUMBER JAYA RT 003 RW 01 CIPO- COK JAYA	✓			
36	RAME	LINK. CIGIN- TUNG RT 004 RW 05 CIPOCOK JAYA		✓		
37	JAWAWI	LING IPIK RT 004 RW 001 CIPOCOK JAYA	✓			
38	SOLIHIN	LING WINONG RT 004 RW 04 CIPO- COK JAYA			✓	
39	NARIAH	LINK BABAKAN RT 002 RW 001 CIPOCOK JAYA		✓		
40	HOLILAH	LINK KANDANG KURUNG RT 01 RW 06 CIPOCOK JAYA	✓			
41	SAPAAT	LINGK CIGIN- TUNG RT 002 RW 05 CIPOCOK JAYA	✓			



42	MISBAK	LINGKUNGAN CIMAS RT 001 RW 04 CIPOCOK JAYA		✓		
43	MUHAMAD	JAGARAYU GELAM RT 002 RW 03 CIPOCOK JAYA		✓		
44	JAHADI	LINGK CIGIN- TUNG RT 002 RW 05 CIPOCOK JAYA			✓	
45	SAMIAN	LING CIGINTUNG RW 05 RT 003 CIPOCOK JAYA			✓	
46	DAAH	JAGARAYU GELAM RT 002 RW 03 CIPOCOK JAYA			✓	
47	JAMARI	LINGKUNGAN KABUL RT 001 RW 05 CIPOCOK JAYA		✓		
48	ROMELI	LINGKUNGANN SUMBER JAYA RT 003 RW 01 CIPO- COK JAYA		✓		
49	KASBIAH	JAGARAYU GELAM RT 002 RW 03 CIPOCOK JAYA	✓			
50	ROSIKIN	LINGK PUDAK RT 001 RW 02 CIPO- COK JAYA		✓		
51	ROMELAH	LING IPIK RT 004 RW 001 CIPOCOK JAYA		✓		
52	SUHERMAN	SAYABULU BARU RT 003 RW 07 SERANG			✓	

53	TABRANI	KAUJON BARU RT 003 RW 13 SERANG			✓	
54	JAINUL	JLN MAYOR HM MUSLICH RT 02 RW 05 SERANG			✓	
55	ATIM	JL. RAYA SEPANG RT 005 RW 06 SERANG		✓		
56	SUSI ISMI- YATI	KP MUNTIL RT 001 RW 04 SERANG		✓		
57	KASMIN	KP SEPANG RT 003 RW 06 SERANG	✓			
58	JUMENAH	KP MUNTIL RT 001 RW 04 SERANG		✓		
59	SUPENO	JL SEPANG RT 001 RW 006 SERANG SEPANG		✓		
60	SALAKAH	KP MUNTIL RT 001 RW 04 SERANG	✓			
61	SIMAN	TIRTALAYA RT 002 RW 07 SERANG		✓		
62	MARIFAH	LINK SEPANG RT 002 RW 06 SERANG	✓			
63	HASURI	KEPANDEAN KIDUL RT 02 RW 05 SERANG		✓		

64	JAMANI	KP MUNTIL RT 001 RW 04 SERANG			✓	
65	SARKA	SAYABULU BARU RT 003 RW 07 SERANG			✓	
66	MISKA K	KP KURANJI RW 04 RT 005 SERANG		✓		
67	FUTANAH	LINGKUNGAN SAYABULU RT 001 RW 07 SERANG				
68	ROHAYAH	BATOK BALI RT 001 RW 18 SERANG		✓		
69	NANO	KP PERENG RT 018 RW 08 TAKTA- KAN	✓			
70	PEI	KP JAKUNG SELER RT 001 RW 01 TAK- TAKAN		✓		
71	SALMIAH	KP PASIR GA- DUNG WADAS RT 12 RW 06 TAKTA- KAN			✓	
72	AHMAD DAWI	KP CILOWONG RT 016 RW 07 TAKTA- KAN			✓	
73	SAMSUDIN	KP CIBETUNG RT 020 RW 09 TAKTA- KAN	✓			
74	SAID	KP CILOWONG RT 013 RW 07 TAKTA- KAN		✓		

75	SUKRI	KP PERENG RT 018 RW 08 TAKTA- KAN	✓			
76	ASMAN	KP. CILOWONG RT 015 RW 07 TAK- TAKAN		✓		
77	HAERUDIN	KP CIKOAK RT 022 RW 04 TAKTAKAN	✓			
78	KASTOBI	KP JAKUNG SELER RT 001 RW 01 TAK- TAKAN			✓	
79	SAMAN	KP. CILOWONG RT 015 RW 07 TAK- TAKAN			✓	
80	JENUL M	KP CIBETUNG RT 021 RW 09 TAKTA- KAN		✓		
81	YANTO	KP PASIR GA- DUNG RT 010 RW 06 TAKTAKAN		✓		
82	KALISAH	KAMPUNG CIBE- DUG RT 009 RW 05 TAKTAKAN	✓			
83	HAMDANI	KP. CILOWONG RT 015 RW 07 TAK- TAKAN		✓		
84	ABDUL HA- MID	KP PASIR GA- DUNG RT 010 RW 06 TAKTAKAN		✓		
85	DIDI ROSIDI	KP.SUKADANA RW 03 RT 005 KASE- MEN		✓		

86	ISA	KP.SUKADANA RW 03 RT 005 KASE- MEN	✓			
87	ENCON SUNDARI	KP KELUNCING RT 002 RW 11 KASEMEN		✓		
88	SUBHI	KP. KERONJEN RT 003 RW 04 KASE- MEN		✓		
89	HAYATI	KP. ANGSANA RT 001 RW 06 KASE- MEN		✓		
90	IKSAN	KP. KEDUNG LE- LES RT 004 RW 05 KASEMEN		✓		
91	SYAMSUDIN	JL RAYA BANTEN KP SUKADANA 1 RT 001 RW 03 KASEMEN RT 001 KASEMEN			✓	
92	APANDI	KP.SUKADANA RW 03 RT 005 KASE- MEN			✓	
93	MIFTA- HURO- HMAN	KP. KEROJEN RT 02 RW 04 KASE- MEN	✓			
94	SITI RO- HIMAH	KP KELUNCING RT 002 RW 11 KASEMEN	✓			
95	KOSDI	KP.SUKADANA 1 RW 03 RT 003 KASEMEN	✓			

96	SAN'AH	KP. KEROJEN RT 02 RW 04 KASEMEN	✓			
97	HASBULLOH	KP. KEGANTERAN RT 002 RW 05 KASEMEN		✓		
98	FAHRI	KAMPUNG KATULISAN RT 001 RW 07 KASEMEN	✓			
99	MUHAMAD SAID	KP ANGSOKA JAYA RW 09 RT 002 KASEMEN		✓		
100	RONI	KP. KAGENTERAN RT 005 RW 03 KASEMEN			✓	

Dari hasil angket yang penulis sebar kepada penerima BLSM di Kota Serang dari enam kecamatan, dilihat dari puas, sedang dan tidak puas. Puas sebanyak 27%, sedang sebanyak 50% dan tidak puas 22%. Rata rata penerima BLSM sebanyak 50% berarti kategori sedang, artinya penerima BLSM kaitannya dengan kenaikan harga BBM hanya dapat tertanggulangi sementara saja, selanjutnya mereka hidup kembali dalam keadaan kekurangan. Sebagaimana Rame dari link. Cigitung rt 004 rw 05 cipocok jaya “Saya mendapatkan BLSM Rp.150.000 selama 4 Bulan Juni-September 2013 hanya sementara saja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, akan tetapi selanjutnya harga harga semakin melonjak sementara bantuan terhenti ini sama saja dengan keadaan sebelumnya tetap kekurangan”.<sup>42</sup> Demikian juga dengan Bapak Nano dari Kp Pereng Rt 018 Rw 08 Taktakan. Ia mengaku bersyukur sudah mendapatkan kompensasi Rp 300 ribu untuk dua bulan ke depan. Meski kebutuhannya sebenarnya lebih dari itu.

42. Wawancara dengan Rame dari link. Cigitung rt 004 rw 05 cipocok jaya, Tanggal 27 Mei 2015

“Namanya manusia ya *nggak* puas-puas. Dikasih *segini* ya terima sajalah,” ujarnya usai mencairkan BLSM.<sup>43</sup>

Penerima dana bantuan BLSM kategori puas sebanyak 27% karena berpikir pemerintah masih perhatian kepada masyarakat miskin, sebagaimana Isa dari Kecamatan Kasemen “Alhamdulillah pemerintah masih perhatian ditengah tengah harga melonjak akibat kenaikan BBM pemerintah memberikan dana kompensasi untuk menanggulangi kenaikan harga tersebut dengan dana BLSM ketimbang tidak menerima sama sekali.<sup>44</sup>

Kemudian penerima bantuan BLSM kategori tidak puas sebanyak 22%, mereka merasa tidak puas, sebab dengan kenaikan BBM harga harga semakin melonjak tidak cukup untuk biaya hidup ketimbang dana yang diberi dengan kenaikan harga yang melonjak. Misalnya Salmiyah, janda satu cucu dari KP Pasir Gadung Wadas Rt 12 Rw 06 Taktakan. “Uang 300 ribu bagi saya kurang, karena saya sudah janda dan masih menanggung satu cucu yang sekarang SMA,” kata Samiah yang datang sendirian. Jika boleh berpendapat, ia mengaku kebutuhan untuk dua bulan ke depan sedikitnya Rp 600 ribu. Senada dengan Salmiah, ibu Daah Jagarayu Gelam Rt 002 Rw 03 Cipocok Jaya dua anak penerima BLSM, mengaku kebutuhan yang pas untuk keluarganya kisaran Rp700 ribuan. “Untuk kebutuhan sekolah anak saya, yang satu sudah SMP. Apalagi harga kebutuhan sudah mahal, kebutuhan sekunder dan sehari-hari sudah naik.”<sup>45</sup>

---

43. Wawancara dengan Rame dari link. Cigitung rt 004 rw 05 cipocok jaya, Tanggal 27 Mei 2015

44. Wawancara dengan Isa Kp.Sukadana Rw 03 Rt 005 Kasemen, Tanggal 25 Mei 2015

45. Wawancara dengan Daah Jagarayu Gelam Rt 002 Rw 03 Cipocok Jaya, Tanggal 26 Mei 2015





# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Tujuan Pemerintah meluncurkan program BLSM ini, antara lain:
  - 1). Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 2). Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
  - 3). Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
2. Dampak positif dan negatif dana BLSM, adalah:
  - 1). Dampak positif antara lain:
    - a. Mendorong pengembangan modal manusia, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas pekerja;
    - b. Memungkinkan kelompok miskin melindungi dirinya dan asetnya, bahkan mempertahankan pendapatan jangka Panjangnya,

seperti: Mengurangi risiko sosial, Memerangi diskriminasi dan membuka potensi ekonomi (bias gender dalam pendidikan), mendukung partisipasi kelompok miskin dalam pasar tenaga kerja karena pencarian kerja seringkali mahal dan berisik, menstimulasi permintaan terhadap barang dan jasa lokal dan menciptakan manfaat bagi kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan karena reformasi ekonomi, seperti kompensasi bagi kelompok miskin dari pengurangan harga BBM. 2). Dampak negatif; BLSM bukannya memberikan solusi, malah menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu: *Pertama*, Penyalurannya dinilai tidak tepat sasaran. *Kedua*, Kebijakan BLSM bernuansa politis, menghadapi pemilu 2014. *Ketiga*, BLSM tak memberikan solusi, tidak bisa mencegah inflasi. *Keempat*, berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat meski skalanya terbatas.

Efektifitas dana BLSM terdiri dari efektifitas sasaran pembagian kepada masyarakat miskin dan efektifitas dalam menanggulangi kenaikan harga. a. Efektifitas sasaran pembagian kepada masyarakat miskin disinyalir kurang tepat sasaran, di antaranya banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai, sementara orang yang mampu justru mendapatkan. Data yang ada belum dimutakhirkan, sehingga warga yang sudah meninggal dunia masih mendapatkan jatah bantuan tersebut. b. Sedangkan efektifitas dalam menanggulangi kenaikan harga penerima BLSM menyatakan kategori sedang berkisar 50%, artinya dengan bantuan BLSM tersebut hanya dapat tertanggulangi sementara saja, selanjutnya mereka hidup kembali dalam keadaan kekurangan. Bahkan yang menyatakan tidak puas 22% dana BLSM besar pasak daripada tiang, biaya hidup dalam satu bulan menghabiskan Rp. 600.000 sedangkan kompensasi BBM hanya Rp. 150.000. Sedangkan penerima yang menyatakan puas dengan dana BLSM 27%, Ia mengaku bersyukur sudah mendapatkan

kompensasi Rp 300 ribu untuk dua bulan ke depan (Juni-Juli = Rp.300.000 dan Agustus-September Rp. 300.000 jumlah yang diterima Rp. 600.000). Meski kebutuhannya sebenarnya lebih dari itu, sebagai bentuk perhatian pemerintah mesti dihargai.

## **B. Saran Saran**

Dari pembahasan yang telah diauraikan di atas penulis memberikan saran saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah hendaklah lebih selektif dalam mendata penerima BLSM, supaya tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya.
2. Pemerintah hendaklah lebih memihak kepada kepentingan rakyat dari pada mendahulukan kepentingan golongan atau kepentingan politik.
3. Kepada penerima BLSM hendaklah memanfaatkan bantuannya sesuai kebutuhan dengan skala prioritas.
4. Kepada semua pihak hendaklah menyadari terhadap persoalan persoalan yang ada dan bersama sama membangun bangsa ini ke masa depan yang lebih baik.



# DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazdahibil Arba'ah*, Daar El-Fikr Beirut, th. 1994

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004)

Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Baerut: Dar al-Ma'arif, 1979)

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

-----, *Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974)

- Amri Arrusdiprogram, “Blsm yang Menuai Pro Kontrauniversitas”, *Makalah*, Jenderal Soedirman, Tahun 2014
- Amri arrusdi, “Universitas Jenderal Soedirman” *Artikel*, Fakultas biologi Tahun 2014
- Anonymous, “Bantuan Langsung Sementara Masyarakat” *Artikel*, Biro Humas Setda Prov. Sumbar, 2013.
- , “Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP ), Draft Buku Putih Sanitasi Kota Serang, Pokja PPSP Kota Serang 2011
- , *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014)
- , “Hukum Permintaan dan Penawaran” *Artikel*. <http://www.psb-psma.org/content/powerpoint/hukum-permintaan-dan-penawaran>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.
- , “Pembentukan Harga Keseimbangan” *Artikel*. <http://aburaffi.wordpress.com/tag/harga-keseimbangan>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.
- , “Pembentukan Harga Keseimbangan” *Artikel*. <http://aburaffi.wordpress.com/tag/harga-keseimbangan>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.
- , *Petunjuk Teknis Operasional PNPB Mandiri Pedesaan, Departemen Dalam Negeri Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* (Jakarta: 2008)
- Ari Sucipta, “ Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Inflasi, Artikel, Tahun 2013 Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2000

Aprian Jaelani, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM” *Artikel*, Tahun 2014

Biro Pusat Statistik tahun 2012

Dalil Hasan, *Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwara, No. 6/VII/ 1996

Eko Riyanto dan Solikhin, “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Menggunakan Metode Profile Matching Berbasis Web”, *Artikel*, STMIK HimSYa, 2013

Giddens, Antony, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997)

Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC, 1998

Hafizah, Yulia, Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam, *Jurnal Milllah* Vol. IV, No. 2 Januari 2005.

Hasan, Dalil, *Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwara, No. 6/VII/ 1996

Harian Republika “Pendapat Penyaluran Dana BLSM” 24 Juni 2013.

Hans, “Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan BBM, *Makalah*, Tahun 2013

Iwan Hermawan, “Bantuan Langsung Sementara Masyarakat” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/I/P3DI/Juli/2013.

- Iklima Nur Annisa, “ Pengaruh Tingkat Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang Terhadap lingkungan Setempat” *Makalah*, 2013
- Ismail, “Sejarah Kenaikan Harga BBM Setiap Kepala Negara Republik Indonesia”, *Atikel*, 2014.
- Iwan Hermawan, “Bantuan Langsung Sementara Masyarakat” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/I/P3DI/ Juli/2013.
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *al-Fiqh ala ‘al-Madzahib al-Khomsah, Daar El-Fikr Beirut*, th, 1996
- Kementerian PPN/BAPPENAS “Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM dan Program Kompensasinya” *Artikel*, Menkokesra, Jakarta, 2013.
- Khairil Anwar, “Pengertian Kemiskinan”, *Makalah* , IAIN Medan 2013
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan dalam buku Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991
- Mubyarto dan Baswir, Revrison, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989.
- Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada. Edisi Kedua, 2005)
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010)
- M. Deden Ridwan, Ed, Metodologi Penelitian Agama, dalam tulisan



- U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001)
- Nas Suhey, “Analisis Kebijakan Program Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM)” *Artikel*, 2013
- Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Philip kolter, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, terjemahan AB susanto, (Jakarta: salemba empat, 2000)
- Retno Wd., “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi”, *Artikel*, Tahun 2012
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi. Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Salim, Agus, (Pey). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Seri kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/96 “Strategi dan Evaluasi Mengentaskan Kemiskinan” *Artikel*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996
- Sumodiningrat, Gunawan, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC, 1998
- Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota serang tahun 2011
- Sumodiningrat, Gunawan, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996

- Satyagraha, Editor; Ruslan Burhani “BLSM dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu”, *Artikel*, Tahun 2013.
- Sri Mulyani, Dialog Tentang Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM, Selasa tgl. 8 Maret 2005
- Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, *Solusi Masalah Kepesertaan dan Pemutakhiran Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)*, Jakarta: Sekretariat TNP2K, 2013
- Sumber PT. Pos Indonesia cabang Serang Tahun 2013.
- Umar Faruq, “Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional” *Artikel*, Pascasarjana UIN “Sunan Gunung Djati” Bandung.
- Wiratha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006
- William Eachern, A. Mc. *Ekonomi Makro: Pendekatan Temporer, Terjemahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
- Wisnu Sukma Darmawan, Kenaikan Harga Kebutuhan Bahan Baku Pangan” *Makalah*, Universitas Gunadarma 2012
- Yulaswati, Vivi, dkk., *Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu PNPM Mandiri* (Jakarta:2009).
- A. Zambrana “Hukum Permintaan dan Penawaran “ *Artikel*, <http://www.buletinekonomi.blogspot.com/2008/04/kekuatan-penawaran-dan-permintaan.html>.